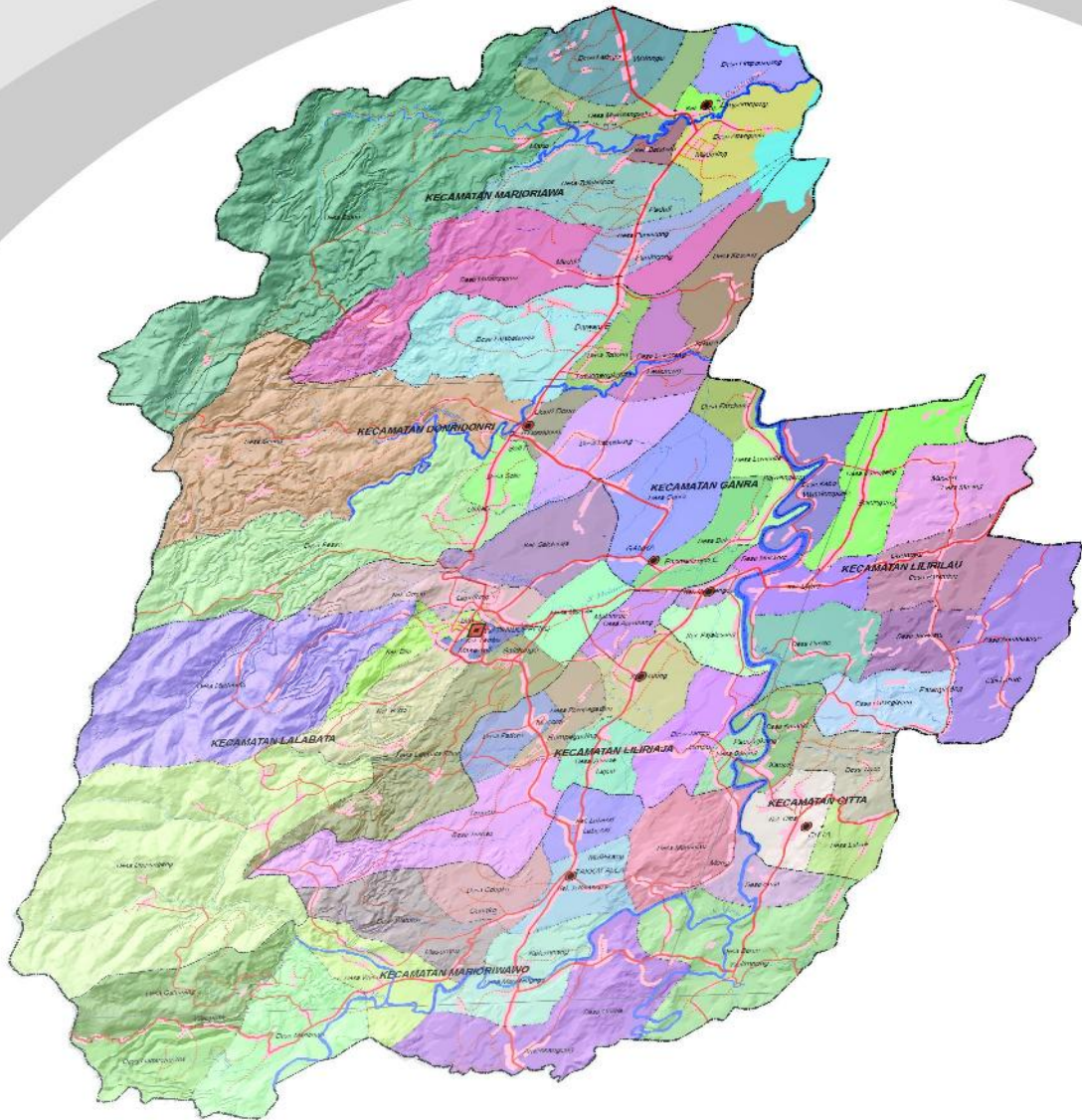




KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) APBD TAHUN ANGGARAN 2016



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG



DAFTAR ISI

		HALAMAN
DAFTAR ISI		i
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	17
	1.3. Dasar Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	18
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO	
	2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya.....	23
	2.2. Target Ekonomi Makro Tahun 2015.....	26
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	
	3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	28
	3.2. Laju Inflasi	28
	3.3. Pertumbuhan PDRB.....	29
	3.4. Lain-Lain Asumsi.....	31
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	
	4.1. Pendapatan Daerah	34



4.1.1.	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.....	34
4.1.2.	Target Pendapatan Daerah yang akan dilakukan	48
4.1.3.	Upaya-upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target	52
4.2.	Belanja Daerah	53
4.2.1.	Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	54
4.2.2.	Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga	55
4.2.3.	Kebijakan Pembangunan, Prioritas Pembangunan Daerah dan Kendala yang dihadapi.....	61
4.2.4.	Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah	68
4.3.	Pembiayaan Daerah.....	70
4.3.1.	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	70
4.3.2.	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	70
BAB V	PENUTUP	72



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain itu perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud diatas menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah; dan rencana pembangunan tahunan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 310 ayat (1) yang mengamanatkan Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Selanjutnya KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang mengacu pada RKPD sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai stakeholders dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2016 mengacu pada RKP Tahun 2016, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 dan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015. Dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 merupakan tahun masa transisi dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng, sehingga evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya mutlak diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil yang dicapai dari target RPJMD dan renstra SKPD yang telah ditetapkan. Sehingga dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2016 harus melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, dan mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi baik lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, hasil musrenbang RKPD di tingkat kecamatan dan kabupaten serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah. Selain itu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2016 juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan provinsi maupun pemerintah pusat.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dimaksud merupakan bagian perwujudan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam bidang perencanaan pengelolaan keuangan yang memuat kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan; asumsi dasar penyusunan RAPBD Tahun 2015 meliputi laju inflansi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah; kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah; kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah; kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Terkait dengan Prioritas pembangunan, pemerintah Kabupaten Soppeng mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah,



mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 dijelaskan bahwa tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 adalah "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Pondasi Pembangunan yang Berkualitas".

Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional. Berdasarkan tema dan sasaran tersebut di atas, diajabarkan kedalam 1 (satu) lintas bidang dan 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang:

a. Pengarusutamaan

1) Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan difokuskan pada upaya tetap menjaga pertumbuhan ekonomi pada yang dapat menjaga stabilitas makro, pertumbuhan ekonomi yang meluas dan terutama percepatan pertumbuhan di luar pulau Jawa dan khususnya wilayah perbatasan, pembangunan sosial yang meningkat, serta efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pelestarian alam.

2) Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik



Diarahkan untuk penguatan kapasitas pemerintah dan perluasan ruang partisipasi masyarakat, dengan penekanan pada:

- a) Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik;
- b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan;
- c) Peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di pusat dan daerah; dan
- d) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

3) Pengarusutamaan Gender

Merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan, yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

b. Pembangunan Lintas Bidang

1) Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan

Membangun landasan yang kuat agar ekonomi tumbuh menghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas, penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif, pengembangan penghidupan berkelanjutan (peningkatan kesejahteraan keluarga), perluasan dan peningkatan pelayanan dasar.

2) Perubahan Iklim

Melalui pelaksanaan mitigasi, yaitu pengurangan penyebab emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan adaptasi yaitu peningkatan ketahanan masyarakat dan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim, yaitu petani dan nelayan serta



wilayah yang rentan seperti pesisir atau kota yang terletak dekat dengan pantai, pegunungan yang mudah terkena kekeringan serta upaya peningkatan kesehatan atas berbagai gangguan kesehatan akibat dampak perubahan iklim.

3) Revolusi Mental

Pembangunan kebudayaan pada tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan kemandirian bangsa yang ditandai oleh tegaknya kedaulatan politik, ekonomi yang berdikari, dan kuatnya kepribadian bangsa dalam kebudayaan, yang bersumber dari nilai-nilai luhur budaya Nasional (gotong royong, toleransi, harmoni, solidaritas, kesetiakawanan) untuk mengembangkan budaya pelayanan.

2. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Arah kebijakan pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan melalui:

- a. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana yang diarahkan untuk mengendalikan kuantitas penduduk melalui program kependudukan, Keluarga Berencana (KB), meningkatkan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga untuk mendorong masyarakat Indonesia dalam membentuk keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, pengarahan dan penataan persebaran penduduk, serta penguatan data dan informasi kependudukan dalam pengembangan kebijakan dan program pembangunan yang berbasis bukti.
- b. Pembangunan pendidikan, khususnya program Indonesia Pintar yang diarahkan untuk mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat, melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas, meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya



saing pendidikan menengah dan tinggi, menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial ekonomi, antar wilayah dan antar jenis kelamin, yang berpihak pada seluruh anak dari terutama anak dari keluarga kurang mampu, meningkatkan kualitas pembelajaran untuk peningkatan pendidikan karakter, dan meningkatkan profesionalitas guru, pengelolaan, serta pendistribusiannya.

- c. Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat terutama melalui program Indonesia Sehat yang diarahkan untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, menurunkan kekurangan gizi dan kelebihan gizi melalui pendekatan lintas sektor, serta mengendalikan penyakit baik menular maupun tidak menular, menguatkan sistem kesehatan terutama pengembangan jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat, sistem pemantauan dan evaluasi melalui pengembangan sistem informasi dan penelitian dan pengembangan, serta pemenuhan tenaga kesehatan, farmasi dan alat kesehatan.
- d. Pembangunan perpustakaan yang diarahkan untuk meningkatkan budaya gemar membaca dan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan akses, maupun utilitas, melalui sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan, promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan dan pola partisipasi industri penerbitan dan masyarakat dalam menciptakan komunitas baca.
- e. Pembangunan pemuda dan olahraga yang diarahkan untuk meningkatkan peran aktif dan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan serta menumbuhkan dan meningkatkan budaya dan prestasi olahraga.
- f. Pembangunan agama yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan pelayanan kehidupan beragama



yang berkualitas antara lain dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, serta mewujudkan harmonisasi sosial dan kerukunan umat beragama.

- g. Pembangunan kebudayaan yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya insan Indonesia yang bermartabat, berkarakter dan berjati diri yang mampu menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dan peradaban luhur ditengah pergaulan global.
- h. Pembangunan pelayanan kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk memenuhi hak-hak dasar mereka, menyediakan akses layanan dasar dan kesempatan yang sama dan setara, serta menciptakan layanan publik dan lingkungan masyarakat yang inklusif, sehingga penyandang disabilitas dan lanjut usia dapat menjadi sumber daya manusia yang produktif dan berkontribusi dalam pembangunan.
- i. Pembangunan pemberdayaan perempuan yang diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) di berbagai bidang pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- j. Pembangunan perlindungan anak yang diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju, yang jauh lebih baik, yang mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tercapainya kesejahteraan rakyat ini harus didukung oleh berbagai kondisi penting yang meliputi:

- a. Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta berkelanjutan;



- b. Terciptanya sektor ekonomi yang kokoh; serta
- c. Terlaksananya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang akan dilaksanakan diantaranya melalui sistem jaminan sosial nasional.

Penguatan bidang ekonomi juga dilakukan pada pembangunan kedaulatan pangan, perwujudan kedaulatan energi, dan akselerasi industri dan pariwisata yang didukung oleh penguatan infrastruktur, pertanian, maritim dan kelautan, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun kebutuhan ekspor.

4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi dalam bentuk memberikan sumbangan nyata bagi daya saing sektor produksi, keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam dan penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern.

5. Pembangunan Politik

Pembangunan politik dalam negeri merupakan satu proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja lembaga-lembaga demokrasi, meningkatkan kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik warga negara, termasuk memberikan akses yang lebih luas untuk kelompok-kelompok marjinal pada proses pengambilan keputusan politik. Pembangunan politik dalam negeri merupakan bagian dari kondisi perlu untuk mendukung tiga dimensi pembangunan nasional, yang menjadi amanat Nawa Cita yakni membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

6. Pembangunan Pertahanan dan Keamanan

- a. Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan almatsus POLRI;



- b. Kesejahteraan dan profesionalisme prajurit TNI, serta profesionalisme POLRI;
- c. Intelijen dan kontra intelijen;
- d. Penanganan gangguan keamanan di wilayah perbatasan dan pelanggaran hukum di laut;
- e. Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba;
- f. Sistem keamanan yang integratif.

7. Hukum dan Aparatur

Pembangunan bidang hukum dan aparatur memiliki peran yang penting dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai kondisi yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

a. Sub Hukum

- 1) Penegakan hukum yang berkualitas,
- 2) Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif,
- 3) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.

b. Sub Bidang Aparatur

Terwujudnya birokrasi pemerintah yang berkinerja tinggi, bekerja efektif dan efisien, berintegritas tinggi, dan berpegang pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

8. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

1) Informasi Geospasial meliputi:

- 1) Kebijakan Data dan Informasi Geospasial untuk Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimana kedudukan bidang data dan informasi geospasial memiliki nilai strategis pada proses perencanaan berbasis kewilayahan, khususnya dalam



memenuhi kebutuhan perencanaan penyusunan RTRW yang meliputi peta dasar dan peta tematik;

- 2) Kebijakan Pembatasan pada Skala 1:25.000, dimana dengan kebijakan ini, penggunaan APBN hanya difokuskan untuk pengadaan data dasar untuk peta dasar minimal skala 1:25.000;
 - 3) Kebijakan Kurva Tertutup bagi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana kebijakan ini ditujukan untuk memetakan batas wilayah Negara NKRI secara tuntas dan mencantumkannya dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan;
 - 4) Kebijakan Super Data Bank dan PNBPN, dimana kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan distribusi data dan informasi spasial telah dilakukan Pemerintah melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dengan membangun web yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder; dan
 - 5) Kebijakan Kerjasama Pengadaan Tenaga Surveyor dan Tenaga Ahli Geospasial, dimana dengan kebijakan ini diharapkan dapat tersedia tenaga surveyor dan tenaga ahli data dan informasi spasial sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Tata Ruang
- 1) Memperkuat sistem pertahanan;
 - 2) Memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
 - 3) Membangun transparansi dan tata kelola pemerintahan;
 - 4) Menjalankan reformasi birokrasi melalui pembentukan perangkat PPNS Bidang Tata Ruang;
 - 5) Membuka partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha secara aktif dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - 6) Mewujudkan kedaulatan pangan.



3) Pertanahan

- 1) Reforma Agraria 9 (sembilan) juta hektar (*land reform*); dan
- 2) Jaminan kepastian hukum atas tanah.

4) Perkotaan dan Perdesaan

Difokuskan pada pembangunan wilayah perkotaan dalam rangka membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing, memenuhi standar pelayanan minimum khususnya di desa-desa tertinggal dan perbatasan, yang akan diisi oleh penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang baik.

5) Kawasan Strategis

Pemerataan pembangunan antar wilayah, terutama di kawasan timur Indonesia.

6) Kawasan Perbatasan

Difokuskan pada percepatan pembangunan di lokasi-lokasi prioritas perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan.

7) Daerah Tertinggal

Dukungan dan pemihakan yang lebih konkrit dari seluruh sektor terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal.

8) Otonomi Daerah

- 1) Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsif, akuntabel, transparan dan efisien;
- 3) Menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan/susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan;



- 4) Menata pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah;
- 5) Menata hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem NKRI.

9. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Arah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana dilaksanakan dalam rangka:

- a. pemenuhan terhadap layanan dasar, melalui: peningkatan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, dengan menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi neraca air domestik dan peningkatan layanan sanitasi, menyediakan infrastruktur produktif dengan menerapkan manajemen aset baik pada tahapan perencanaan, penganggaran, dan investasi, serta meningkatkan sinergi pembangunan air minum dan sanitasi;
- b. pemenuhan terhadap hunian yang layak bagi masyarakat berpendapatan rendah, dengan meningkatkan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian, yang didukung peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan perumahan, mengembangkan sistem karir perumahan (housing career system) sebagai dasar penyelesaian backlog kependudukan dan pengembangan industrialisasi perumahan, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian perkotaan.

10. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- a. Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber daya dan modal pembangunan;
- b. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan untuk mendukung kekuatan industri nasional;



- c. Melakukan konservasi dan menjaga pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari untuk menjaga pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan sinkronisasi program dan kegiatan dengan prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan tema pembangunan tahun 2016 " **Akselerasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Dalam Upaya Pencapaian Sasaran Tahunan RPJMD Sulawesi Selatan**" dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Pengembangan ekonomi kerakyatan;
2. Pengembangan Kependidikan, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan, serta Pembangunan Kesehatan;
3. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Wilayah;
4. Pengembangan Kawasan Strategis
5. Peningkatan Kapasitas Birokrasi dan Kelembagaan.

Sementara itu berdasarkan RPJMD 2011-2015 Kabupaten Soppeng pada pedoman transisi dimaksudkan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada Tahun 2016, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 yang harus segera disusun pada tahun 2015 mempunyai dasar acuan. Program-program pembangunan daerah pada masa transisi diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan daerah, maka program pembangunan pada tahun 2016 tetap melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, setiap SKPD dalam menyusun perencanaan pembangunan sektoralnya pada tahun 2016 tetap mengacu pada program-program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD 2011-2015. RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2016 disusun mengikuti arah dan kebijakan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng (RPJMD) 2011-2015



dengan visi “**TERWUJUDNYA SOPPENG YANG LEBIH MAJU, BERDAYA SAING DAN RELIGIUS**” sehingga tema pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2016 adalah : “**Peningkatan Daya Saing Kompetitif Daerah Melalui Peningkatan Aksesibilitas Layanan Dasar dan Penguatan Sendi Perekonomian Daerah Dengan Dukungan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien**”. Beranjak dari tema tersebut, maka tema tersebut memiliki 4 (empat) kalimat kunci yaitu :

1. **Peningkatan Daya Saing Kompetitif Daerah** dimaknai sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas daerah menghadapi persaingan dengan tetap menjaga keunggulan kompetitif daerah (*comprative advantage*) sehingga pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan tetap terjaga secara berkelanjutan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.
2. **Peningkatan Aksesibilitas Layanan Dasar** dimaknai sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan dasar yaitu layanan kesehatan dan layanan pendidikan serta layanan dasar lainnya yang bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, Indeks Daya Beli, melalui pengendalian penduduk, peningkatan taraf pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.
3. **Penguatan Sendi Perekonomian Daerah** dimaknai sebagai upaya pemerintah daerah dalam melakukan penguatan struktur ekonomi daerah, berupa penguatan sektor primer, sekunder dan tersier secara terpadu, serta menumbuh kembangkan ekonomi perdesaan berbasis sektor pertanian. Isu lain yang masih tertinggal dan memerlukan perhatian adalah dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian petani miskin, usaha perikanan baik tangkap maupun budi daya, dan usaha skala mikro lainnya yang menunjang rantai produksi usaha kecil yang menjadi potensi. Selain itu pembangunan infrastruktur yang



menghubungkan antar desa juga sangat diperlukan dalam menunjang perekonomian daerah.

4. **Birokrasi Yang Efektif dan Efisien** dimaknai sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan di berbagai bidang, yang ditandai dengan: birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan pemerintahan; meningkatnya kualitas aparat pemerintah daerah; peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan; pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran;; serta penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat. Isu lain yang juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah yaitu perlunya menata ulang organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah kabupaten Soppeng sehingga lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hal tersebut diatas garis besar kebijakan umum penyusunan KUA–PPAS Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

- Memperhatikan Arah Kebijakan Nasional Yang Termuat Dalam RPJMN Tahun 2015-2019 Serta Menyikapi Dinamika Pembangunan Nasional;
- Memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
- Mengacu Pada RKPD Tahun 2016 Yang Merupakan RKPD Transisi Berdasarkan RPJMD Tahun 2011-2015;
- Memperhatikan Dan Mengantisipasi Perkembangan Dinamika Strategis Internal Dan Eksternal;
- Meningkatkan Sinergitas Kesyntingan Pembangunan Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi;



- Mengutamakan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat Melalui ,Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Penguatan Sektor Ekonomi Prioritas, Peningkatan Akses Layanan Dasar, Dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
- Penguatan Sektor Ekonomi Prioritas Melalui Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditi Andalan;
- Memantapkan Kondisi Dan Tingkat Pelayanan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Irigasi);
- Percepatan Implementasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Urusan Wajib Yang Telah Ditetapkan Pada Kementrian/Lembaga Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
- Membangun Keterbukaan Informasi Dan Komunikasi Publik Dengan Keterlibatan Semua Stakeholders Dalam Rangka Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan;
- Dalam Rangka Pengelolaan Pembangunan Perdesaan Sebagai Antisipasi Atas Berlakunya Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dengan Langkah Sinergitas Perencanaan Pembangunan Antardesa Dan Kabupaten, Pelaksanaan Program Pembangunan Sektoral Yang Masuk Kedesa Harus Terinformasi Dan Terintegrasi Dengan Rencana Pembangunan Desa;
- Sebagai Upaya Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien Agar Diimplementasikan Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi;
- Dengan Ditetapkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sehingga Terjadi Beberapa Perubahan Mendasar Terkait Dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah. Hal Ini Harus Menjadi Perhatian Dalam Menyusun Program Dan Kegiatan Untuk Tahun 2016;
- Meningkatkan Kualitas Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah Dengan Meningkatkan Kualitas Belanja Daerah Yang Berbasis Kinerja, Efektif, Efisien,Transparan Dan



Akuntabel Serta Mengutamakan Belanja Yang Berdampak Langsung Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2016 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD tahun anggaran 2016;
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016 yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016.
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016.
4. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
5. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2016 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.
6. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.



3. Dasar Penyusunan Kebijakan Umum APBD

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)



9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568),
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2014-2019;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Setda, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 91);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah



Pemerintah Kabupaten Soppeng, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 92);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 93);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 94);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 98);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor Tahun 2010 111);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng 2011–2015, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 116 Tahun 2011);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 5);



32. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Soppeng;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
36. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;
37. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016.



BAB II

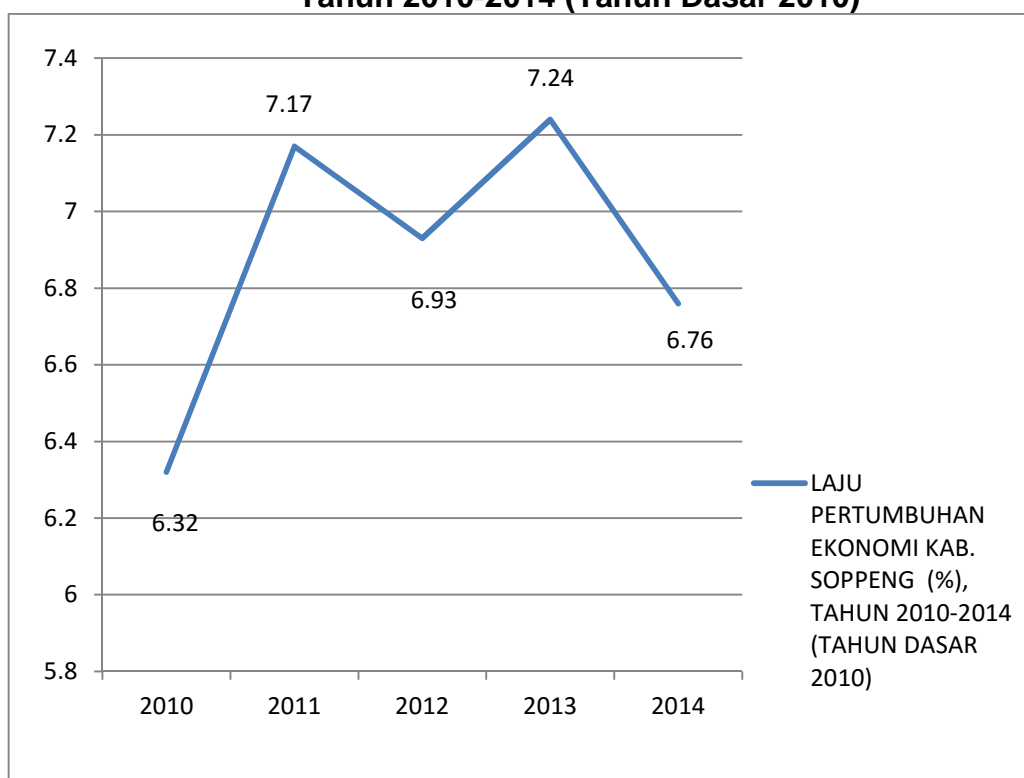
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berkualitas akan berpengaruh terhadap pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, historis pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk dijadikan dasar perencanaan pembangunan daerah.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 sebesar 6,76 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan yang dicapai pada tahun 2013 yang sebesar 7,24% Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terlihat pada gambar berikut.

Gambar II.1 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Soppeng (%) Tahun 2010-2014 (Tahun Dasar 2010)

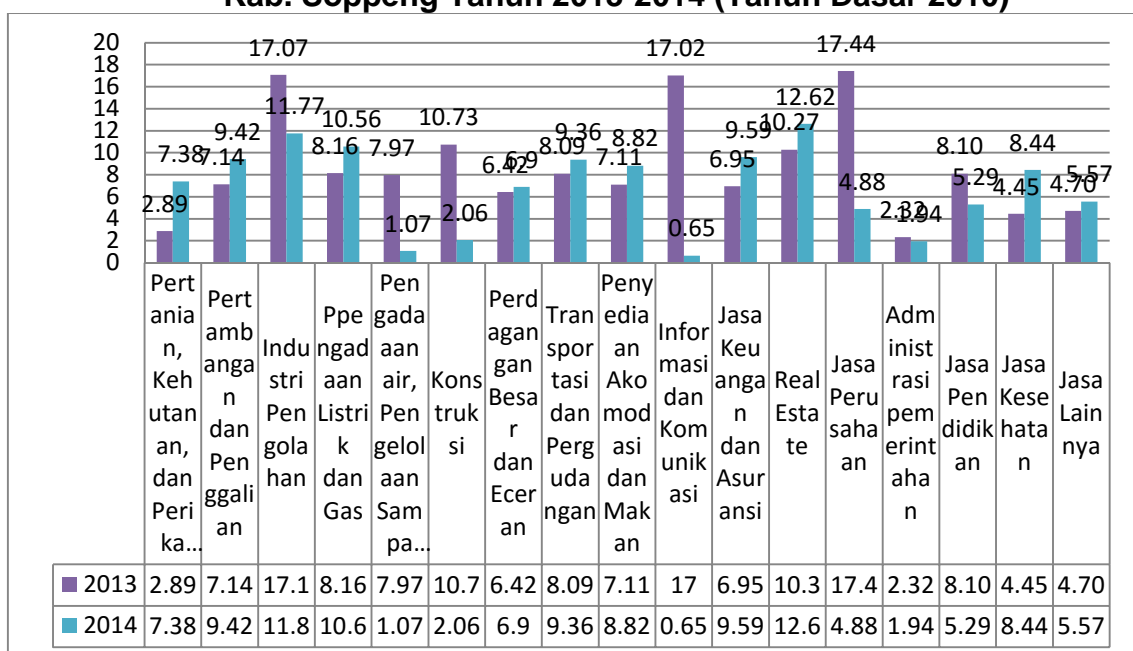


Sumber: BPS Kab. Soppeng Tahun 2015



Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar II.1 diatas bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 bila dibandingkan dengan yang dicapai tahun 2013 terjadi penurunan. Hal ini disebabkan karena pelambatan beberapa sektor pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Walaupun demikian terdapat juga beberapa sektor yang mengalami peningkatan pertumbuhan pada tahun 2014 dibanding pada tahun 2013. Kondisi tersebut tergambarkan dari grafik berikut.

Gambar II.2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kab. Soppeng Tahun 2013-2014 (Tahun Dasar 2010)



Sumber: BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2015

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kab. Soppeng tahun 2014 mengalami pelambatan disebabkan karena melambatnya beberapa sektor dibanding tahun 2013. Sektor yang cukup melambat yaitu sektor informasi dan komunikasi yang melambat sebesar 16,37 persen dari tahun 2013 yang sebesar 17,02 persen menjadi 0,65 persen pada tahun 2014,. Selain itu sektor yang dapat tumbuh secara positif yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang dapat tumbuh secara positif sebesar 4,49 persen dari tahun 2013 yang sebesar 2,89 persen menjadi 7,38 persen pada tahun 2014..



Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga merupakan indikator ekonomi makro yang penting. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi Kabupaten selama tahun 2014 adalah sebesar 8,38 persen, lebih rendah dibanding inflasi nasional yang sebesar 8,4 persen.

Kondisi eksternal yang menjadi ancaman untuk kondisi inflasi di Kabupaten Soppeng yaitu kondisi inflasi nasional yang sangat rentan terhadap ekonomi global. Di samping itu, pada tahun 2016 juga terdapat potensi faktor internal inflasi yang berasal dari administered price, faktor musiman, dan iklim yang diperkirakan mendominasi pergerakan inflasi.. Demikian pula faktor musiman seperti panen raya, Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan tahun ajaran baru sekolah, serta kondisi iklim seperti El Nino yang berpotensi memundurkan waktu tanam bahkan gagal panen karena kekeringan.

Sementara dalam kaitannya dengan ekspektasi inflasi, dengan memerhatikan faktor-faktor yang memengaruhi inflasi tersebut, laju inflasi tahun 2016 diperkirakan mencapai 5 persen atau berada pada kisaran rentang sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar $\pm 1,0$ persen. Sementara itu dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Kab. Soppeng tahun 2015 sebesar 7,5 persen.

Dalam rangka pencapaian sasaran inflasi maka diperlukan bauran kebijakan yang tetap kondusif bagi pengembangan sektor riil. Pemerintah akan berupaya untuk meminimalisasi gejolak harga komoditas bahan pangan dan energi di pasar domestik dari sisi produksi, distribusi, dan konsumsi. Tingkat inflasi yang diperkirakan stabil diharapkan mampu meningkatkan keyakinan konsumen sehingga pertumbuhan konsumsi masyarakat tetap terjaga. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan penguatan kebijakan struktural terutama



yang terkait dengan pengembangan sentra produksi dan tata niaga bahan pangan pokok guna mencegah gejolak kenaikan harga. Sementara itu, upaya yang dilakukan Pemerintah dari sisi distribusi antara lain, pemantauan dan pengendalian harga pangan melalui operasi pasar serta penetapan dan penyimpanan bahan pokok dan barang strategis, adapun dari sisi konsumsi, upaya yang akan dilakukan Pemerintah antara lain percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, penguatan pengawasan keamanan pangan, pengembangan kawasan mandiri pangan, Kemudian, untuk mengoptimalkan upaya pengendalian inflasi oleh Pemerintah dalam ketiga jenis aktivitas ekonomi tersebut, maka Pemerintah juga melakukan antisipasi gangguan ketahanan pangan antara lain pengembangan benih yang adaptif terhadap perubahan iklim, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penyakit hewan, serta penyaluran bantuan pangan pada saat terjadi bencana alam.

2.2. Target Ekonomi Makro Tahun 2015

Melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada tahun 2014 serta memperhatikan perkembangan perekonomian nasional dan global, kondisi perekonomian Kabupaten Soppeng pada tahun 2015 relatif lebih stabil dan prospektif. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng diproyeksi akan bergerak positif. Proyeksi tersebut diperkuat oleh adanya potensi dukungan dengan kembali bergairahnya sektor primer dan sektor sekunder yang stabil. Selanjutnya membaiknya prospek pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng tahun 2015 ditopang oleh prospek peningkatan investasi dengan adanya akselerasi proyek pembangunan infrastruktur, oleh pemerintah. Selain itu pelaksanaan pilkada pada akhir tahun 2015 juga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tingginya biaya pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada akhir tahun 2015 ini mampu menjadi stimulasi pembangunan daerah selain itu Pilkada juga dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat di daerah ini, sehingga menopang pertumbuhan ekonomi, ini dengan catatan pilkada pada akhir tahun 2015



ini dapat berjalan dengan lancar, aman dan damai. Sementara itu, meningkatnya perkembangan konsumsi rumah tangga terkait dengan pertumbuhan kelas menengah dan meningkatnya tingkat pendapatan akan mempengaruhi kondisi ekonomi makro.

Sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah Kabupaten Soppeng juga harus mengantisipasi resiko tekanan inflasi yang dapat diakibatkan oleh gejolak harga diantaranya kenaikan LPG 3 kg, kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) golongan rumah tangga dan TDL kelompok industri disamping penyesuaian harga BBM yang berdampak pada biaya transportasi. Berdasarkan hal tersebut beberapa antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2015 yaitu dengan meningkatkan gairah untuk bekerja dan melaksanakan diversifikasi usaha, menabung dan mengadakan investasi yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah. Pengendalian laju inflasi sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat dan pelaksanaan lelang dapat dilaksanakan pada awal tahun sehingga pekerjaan juga dapat cepat terlaksana.



BAB III

ASUMSI ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Beberapa tahun terakhir, perekonomian nasional masih dan sedang dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup berat, khususnya yang berasal dari persoalan gejolak dan ketidakpastian ekonomi global. Menurunnya kinerja ekspor akibat pelemahan permintaan global dan merosotnya harga komoditas internasional merupakan faktor utama melambatnya aktivitas ekonomi nasional. Melemahnya kinerja ekspor juga telah berdampak pada kondisi neraca pembayaran Indonesia terus mengalami defisit cukup besar.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 Pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2016 diperkirakan akan mencapai 6,6 persen, yang diharapkan akan lebih bertumpu pada faktor-faktor domestik seperti aktivitas investasi, khususnya infrastruktur, yang lebih tersebar ke berbagai kawasan dan terfokus pada pengembangan potensi daerah. Inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 persen sampai dengan 5,0 persen yang terutama didukung oleh semakin membaiknya koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil. Jumlah penduduk miskin berkisar 9,0 persen sampai dengan 10,0 persen. Dan tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,2 persen sampai 5,5 persen.

3.2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Fluktuasi inflasi daerah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten soppeng yang cukup tinggi beberapa tahun terakhir tentu tidak akan terlalu bermakna terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat manakala



laju inflasi juga cukup tinggi. Oleh karena itu, penentuan asumsi indikator inflasi merupakan langkah strategis dan penting.

Sebagai daerah yang sektor ekonominya dominan pada sektor pertanian tentunya Kabupaten Soppeng sangat rentan terhadap pengaruh inflasi nasional hal ini tidak terlepas pada biaya yang dikeluarkan petani untuk kebutuhan lahan pertaniannya tetap saja lebih besar dibandingkan hasil yang mereka produksi. Walaupun pengendalian laju inflasi tidak dapat dilakukan secara lokal atau regional oleh karena perkembangan suatu daerah akan berimbas pada daerah sekitarnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dapat melakukan beberap langkah dalam hal mengantisipasi peningkatan inflasi diantaranya pertama, mempertegas komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga dengan mewujudkan strategi 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, komunikasi yang efektif). Kedua, melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan mewujudkan kedaulatan pangan di daerah, upaya ini dilakukan melalui kemudahan perizinan, optimalisasi alokasi APBD, dan melakukan pengawasan intensif pada distribusi sarana produksi pertanian, dan merealisasikan pembenahan rantai distribusi. Ketiga, melakukan penajaman langkah pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran.

Laju inflasi di kabupaten Soppeng diharapkan pada kisaran dibawah 5%. Penetapan laju inflasi yang demikian merupakan perkiraan optimis, sebagaimana penetapan laju inflasi nasional. Jika laju inflasi terkendali, maka nilai barang dan jasa akan stabil sehingga secara akumulasi pertumbuhan ekonomi akan terasa dampaknya.

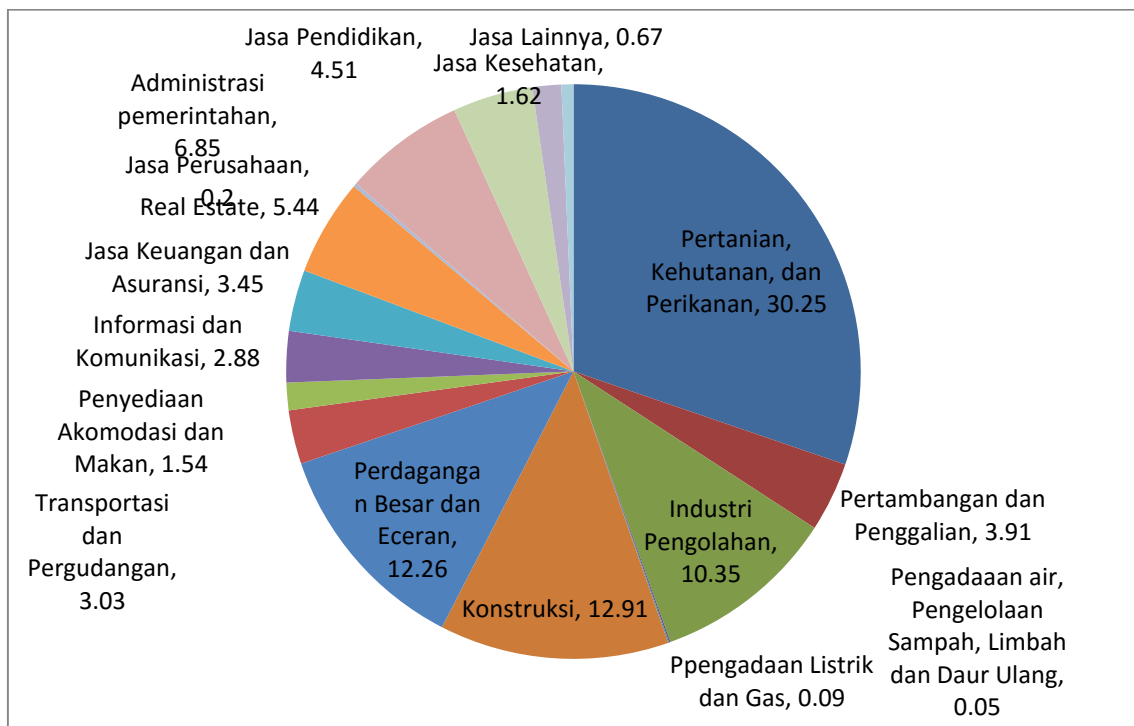
3.3. Pertumbuhan PDRB

Sebutan Kabupaten Soppeng sebagai daerah pertanian tercermin dari struktur perekonomian Soppeng yang diukur dengan PDRB menurut sektoral (lapangan usaha) atas dasar harga berlaku dimana sekitar 30,25 persen PDRB Kabupaten Soppeng berasal dari sektor pertanian, pada tahun 2014 sumbangsih sektor ini terhadap PDRB Soppeng sebesar 30,25 persen ini lebih tinggi dibanding tahun 2013 yang sebesar 30,07 persen. Selanjutnya sektor yang paling



berkontribusi yaitu sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 12,91 persen pada tahun 2014, nilai ini menunjukkan penurunan dibanding tahun 2013 yang sebesar 13,36 persen. Sementara itu sektor dengan kontribusi yang paling rendah terhadap PDRB Kabupaten Soppeng yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan kontribusi sebesar 0,05 persen pada tahun 2014, sedikit pelambatan dibanding tahun 2013 yang sebesar 0,06 persen. Distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Soppeng atas dasar harga berlaku tahun 2000-2014 dapat dilihat pada diagram dibawah ini.

Gambar III.1 Distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha tahun 2014 Kabupaten Soppeng atas dasar harga berlaku (Tahun Dasar 2010)

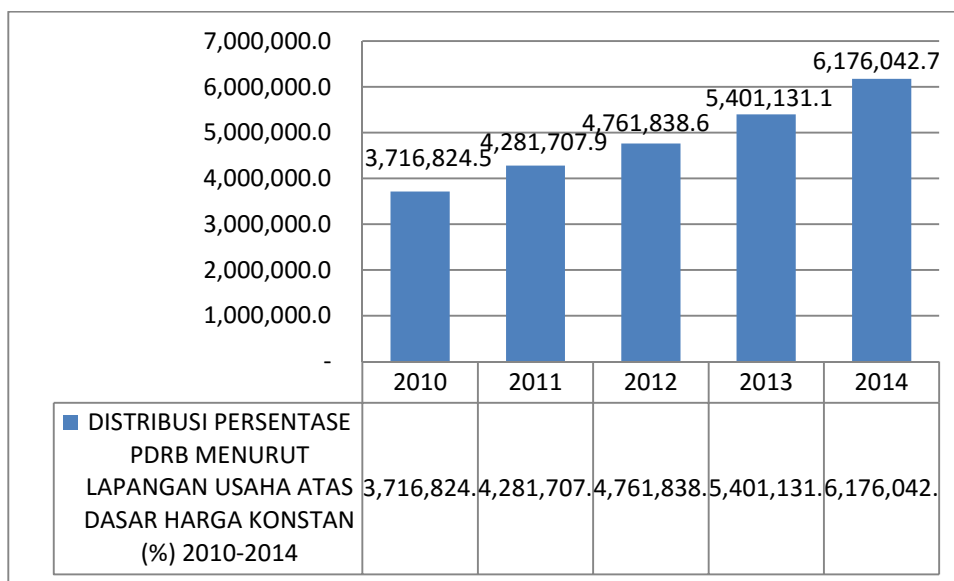


Sumber: BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2015

Sedangkan berdasarkan harga berlaku PDRB Kabupaten Soppeng pada tahun 2014 sebesar Rp. 6,176 triliun meningkat Rp.0,74 Triliun dibanding tahun 2013 sebesar Rp.5,404 Triliun.. Besaran PDRB harga berlaku dari tahun 2010 sampai tahun 2014 terlihat pada gambar berikut.



Gambar III.2 PDRB Kabupaten Soppeng atas dasar harga berlaku 2010-2014 (Juta Rp) (Tahun Dasar 2010)



Sumber: BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2015

Berdasarkan Gambar III.2 di atas, perkembangan PDRB Kabupaten Soppeng dari tahun 2010 sampai dengan 2014 cenderung meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian Soppeng terus membaik yang perlu untuk dipertahankan agar aktivitas perekonomian seperti ini terus dapat berlanjut dan berkesinambungan.

3.4. Lain – Lain Asumsi

Tahun 2016 merupakan tahun awal pemerintahan kepala daerah terpilih pada pilkada akhir tahun 2015, berdasarkan regulasi yang ada perencanaan pembangunan pada tahun 2016 tetap mengacu pada RPJMD 2011-2015. Pedoman transisi dimaksudkan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada Tahun 2016, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 yang harus segera disusun pada tahun 2015 mempunyai dasar acuan. Program-program pembangunan daerah pada masa transisi diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan daerah, maka program pembangunan pada tahun 2016 tetap melanjutkan program-program



yang telah dilaksanakan pada tahun–tahun sebelumnya. Oleh karena itu, setiap SKPD dalam menyusun perencanaan pembangunan sektoralnya pada tahun 2016 tetap mengacu pada program-program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD 2011-2015. Berdasarkan hal tersebut beberapa asumsi pada kebijakan umum APBD 2016 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2016.
2. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (SPM), 18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dan 8 Urusan Pemerintahan Pilihan (berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)
3. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang – kurangnya 20 persen dari belanja daerah, termasuk Tunjangan sertifikasi guru dan gaji tenaga pengajar.
4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran urusan kesehatan sekurang – kurangnya 10 persen dari total belanja, termasuk gaji tenaga kesehatan.
5. Mengingat bahwa penetapan garis kemiskinan yang semakin tinggi sehingga perlunya Perkuatan program dalam rangka penanggulangan kemiskinan (*pro poor*).
6. Kebijakan Pemerintah Pusat terhadap peningkatan gaji PNS, dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Kenaikan gaji pokok sebesar rata-rata 6 % sesuai dengan tahun 2015 akan diberikan kepada PNS, TNI, Polri dan Pensiunan. Demikian halnya dengan pemberian gaji ke-13 dan adanya pengangkatan calon pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Soppeng



7. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Stabilitas ketentraman dan keamanan dapat terkendali dan terkelola dengan baik sehingga aktivitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

4.1. Pendapatan Daerah

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Perencanaan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya serta mendapat dukungan dari masyarakat yang dilakukan secara terencana, dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian dan segala aspek kendala, potensi dan cakupan pelayanan yang ada sehingga tidak membebani masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Secara umum, optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui program intensifikasi yang selama ini telah dijalankan, seperti peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan informasi perpajakan dan retribusi daerah kepada masyarakat serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah akan terus ditingkatkan dan dikembangkan.



Rasionalisasi pungutan pajak dan retribusi yang dipandang dapat menggairahkan dunia usaha maupun masyarakat luas khususnya dalam menunjang produk unggulan daerah yang berorientasi pasar, terus diupayakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Soppeng mengupayakan untuk tidak menambah beban masyarakat dengan melakukan pungutan-pungutan yang berimplikasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inflasi serta menyebabkan arus modal dari luar tidak bertambah dan bahkan mungkin dihindari mengalirnya sejumlah modal yang tertanam di Soppeng keluar daerah.

Upaya pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui berbagai macam antara lain adalah penegakan peraturan terhadap item pendapatan asli daerah, pemberian insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi dan tidak membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya lain ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD.

Penyiapan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan perencanaan penerimaan pendapatan yang tepat, perkiraan terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum. Untuk menjaga kesinambungan kemampuan fiskal daerah penetapan potensi pendapatan daerah merupakan pertimbangan utama.

Kemampuan Fiskal Daerah menggambarkan kemampuan keuangan daerah dan besarnya dana transfer ke daerah. Kemampuan Keuangan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan



dana transfer ke daerah meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) serta Dana Penyesuaian. Dengan demikian dapat diketahui besaran alokasi dana yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat secara leluasa dan fleksibel.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Adapun kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2016 adalah sebagai berikut :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah
 - a) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
 - b) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - c) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2016 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta



realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

- d) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah.
 - e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - f) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - g) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
2. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Kebijakan perencanaan yang akan dilakukan pada tahun 2016 dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan melalui langkah-langkah:

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

- a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
- b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya

B. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

- a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB



Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2016 dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada:

1. Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2014, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012; atau
2. Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2016 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah



tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

- b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016, dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH-CHT selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-CHT didasarkan pada:

1. Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2014, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012; atau
2. Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran



2016 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.

- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian



APBN Tahun 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2016.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada:

1. Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2014, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (lifting) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2016, serta dengan memperhatikan adanya pengalihan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; atau
2. Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang



Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2016 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2015, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) tahun-tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan dan masih ada di rekening kas umum daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015, pemerintah daerah Kabupaten/Kota menganggarkan kembali dalam Peraturan daerah tentang APBD Tahun 2016 atau Peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 untuk menunjang program dan kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut dilakukan



sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2016 sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarnya adalah 0,5% (nol koma lima per seratus) dari total DBH-Migas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

2. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2016 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2015. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.



3. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

DAK dan/atau DAK Tambahan dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2016 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD. Penyediaan



dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaraan TPG tersebut didasarkan pada alokasi TPG Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2014.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi TPG dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

- 2) Pendapatan yang diperuntukan bagi desa yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014



tentang Desa, dianggarkan dalam APBD pemerintah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai alokasi APBN yang diperuntukan bagi desa.

- 3) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2016.
- 4) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2016. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2016, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2015, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
- 5) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam



APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah yang akan dilakukan

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 didasarkan pada realisasi 2014 dan kebijakan pendapatan daerah 2016. Dari rencana Pendapatan Daerah pada APBD tahun 2014 sebesar Rp.829.201.218.469,- sampai dengan 31 Desember 2014 telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 846.005.874.469,54 atau 102,03 persen, sebagaimana pada Tabel IV.1 berikut.

Gambar IV.1 Rencana Pendapatan Daerah dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2014

NOMOR REKENING	URAIAN	2014		%
		APBD	REALISASI	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.400.012.080	60.315.273.131,67	119,67
4 1 1	Hasil Pajak Daerah	9.064.500.000	10.353.366.859	114,22
4 1 1 01	Pajak Hotel	40.000.000	50.598.500	126,50
4 1 1 02	Pajak Restoran	62.000.000	48.993.000	79,02
4 1 1 03	Pajak Hiburan	12.000.000	1.050.000	8,75
4 1 1 04	Pajak Reklame	135.000.000	130.080.825	96,36
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	3.400.000.000	4.304.076.376	126,59
4 1 1 07	Pajak Parkir	3.000.000	3.766.500	125,55
4 1 1 08	Pajak Air Tanah	500.000	476.940	95,39



NOMOR REKENING	URAIAN	2014		%
		APBD	REALISASI	
4 1 1 09	Pajak Sarang Burung Walet	2.000.000	-	0,00
4 1 1 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	110.000.000	57.498.500	52,27
4 1 1 12	Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.000.000.000	5.212.118.256	104,24
4 1 1 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	300.000.000	544.707.962	181,57
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	10.039.047.259	9.388.998.677	93,52
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	6.124.172.259	5.629.362.052	91,92
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	3.568.875.000	3.444.014.750	96,50
4 1 2 03	Retribusi Perizinan tertentu	346.000.000	315.621.875	91,22
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.341.166.186	6.331.166.186	99,84
4 1 3 01	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	6.341.166.186	6.331.166.186	99,84
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24.955.298.635	34.241.741.410	137,21
4 1 4 02	Jasa Giro	1.000.000.000	3.034.553.332	303,46
4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito	700.000.000	1.249.006.929	178,43
4 1 4 04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	900.000.000	935.650.447,74	103,96
4 1 4 13	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	68.139.660	60.409.600	88,66
4 1 4 14	Lain-lain PAD Yang Sah	0	748.211.606	100
4 1 4 15	Pendapatan BLUD	18.162.000.000	24.379.348.441,93	134,23
4 1 4 16	Pendapatan dari Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	4.125.158.975	3.834.561.053	92,96
4 2	DANA PERIMBANGAN	635.144.135.944	635.227.489.289	100,01
4 2 1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	22.297.839.944	22.381.193.289	100,37
4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	18.602.551.113	19.518.343.435	104,92
4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	3.695.288.831	2.862.849.854	77,47
4 2 2	Dana Alokasi Umum	569.126.996.000	569.126.996.000	100,00
4 2 2 01	Dana Alokasi Umum	569.126.996.000	569.126.996.000	100,00
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	43.719.300.000	43.719.300.000	100
4 2 3 01	Dana Alokasi Khusus	43.719.300.000	43.719.300.000	100
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	143.657.070.445	150.463.112.049	104,74
4 3 1	Pendapatan Hibah	679.960.000	576.232.544	84,75
4 3 1 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	679.960.000	576.232.544	84,75
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	24.022.513.765	30.932.282.825	128,76
4 3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Sulsel	24.022.513.765	30.932.282.824,87	128,76
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	106.392.484.000	106.392.484.000	100
4 3 4 01	Dana Penyesuaian	106.392.484.000	106.392.484.000	100
4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	12.562.112.680	12.562.112.680	100
4 3 5 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	12.562.112.680	12.562.112.680	100
PENDAPATAN		829.201.218.469	846.005.874.469,54	102,03

Sumber : DPPKAD Kab. Soppeng Tahun 2015



Berdasarkan proyeksi kondisi perekonomian tahun 2015 dan 2016 dan realisasi pendapatan daerah sampai 31 Desember 2014 serta kebijakan umum pendapatan maka rencana Pendapatan Daerah tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp.1.169.745.017.101,- atau meningkat 26,99 persen terhadap Penetapan APBD Pokok 2015 sebesar Rp.921.134.600.410,-. Secara lebih rinci, target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat dalam Tabel IV.2 berikut.

Gambar IV.2 Target Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016

REKENING	URAIAN	ASUMSI APBD	ASUMSI APBD	SELISIH
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	
1	2	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	921.134.600.410	1.169.745.017.101	248.610.416.691
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	58.056.188.882	59.817.709.386	1.761.520.504
4 1 1	Hasil Pajak Daerah	9.591.100.000	10.196.100.000	605.000.000
4 1 1 01	Pajak Hotel	40.000.000	40.000.000	0
4 1 1 02	Pajak Restoran	62.000.000	62.000.000	0
4 1 1 03	Pajak Hiburan	15.000.000	20.000.000	5.000.000
4 1 1 04	Pajak Reklame	135.000.000	135.000.000	0
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	3.500.000.000	4.000.000.000	500.000.000
4 1 1 07	Pajak Parkir	3.500.000	3.500.000	0
4 1 1 08	Pajak Air Tanah	600.000	600.000	0
4 1 1 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	115.000.000	115.000.000	0
4 1 1 12	Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.200.000.000	5.300.000.000	100.000.000
4 1 1 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	520.000.000	520.000.000	0
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	9.574.862.575	6.443.109.000	(3.131.753.575)
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	5.626.987.575	2.678.234.000	(2.948.753.575)



REKENING	URAIAN	ASUMSI APBD	ASUMSI APBD	SELISIH
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	
1	2	4	5	6
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	3.556.875.000	3.329.875.000	(227.000.000)
4 1 2 03	Retribusi Perizinan tertentu	391.000.000	435.000.000	44.000.000
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.786.895.195	8.452.817.334	1.665.922.139
4 1 3 01	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	6.786.895.195	8.452.817.334	1.665.922.139
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.103.331.112	34.725.683.052	2.622.351.940
4 1 4 02	Jasa Giro	1.250.000.000	1.388.992.891	138.992.891
4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito	1.000.000.000	1.366.690.161	366.690.161
4 1 4 04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	900.000.000	900.000.000	0
4 1 4 13	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	70.000.000	70.000.000	0
4 1 4 15	Pendapatan BLUD	22.883.331.110	25.000.000.000	2.116.668.890
4 1 4 16	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	6.000.000.002	6.000.000.000	(2)
4 2	DANA PERIMBANGAN	672.835.721.163	999.032.153.000	326.196.431.837
4 2 1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	24.472.197.163	26.118.645.000	1.646.447.837
4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	22.905.616.163	22.459.389.000	(446.227.163)
4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	1.566.581.000	3.659.256.000	2.092.675.000
4 2 2	Dana Alokasi Umum	589.049.244.000	635.976.768.000	46.927.524.000
4 2 2 01	Dana Alokasi Umum	589.049.244.000	635.976.768.000	46.927.524.000
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	59.314.280.000	336.936.740.000	277.622.460.000
4 2 3 01	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	191.519.170.000	191.519.170.000
4 2 3 02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	145.417.570.000	145.417.570.000
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	190.242.690.365	110.895.154.715	(79.347.535.650)



REKENING	URAIAN	ASUMSI APBD	ASUMSI APBD	SELISIH
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	
1	2	4	5	6
4 3 01	Pendapatan Hibah	0	1.086.146.550	1.086.146.550
4 3 01 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	0	1.086.146.550	1.086.146.550
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	25.722.513.765	25.722.513.765	0
4 3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Sulsel	25.722.513.765	25.722.513.765	0
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	151.949.159.920	72.021.764.000	(79.927.395.920)
4 3 4 01	Dana Penyesuaian	151.949.159.920	72.021.764.000	(79.927.395.920)
4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	12.571.016.680	12.064.730.400	(506.286.280)
4 3 5 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	12.571.016.680	12.064.730.400	(506.286.280)
	Jumlah Pendapatan	921.134.600.410	1.169.745.017.101	248.610.416.691

Sumber : DPPKAD Kab. Soppeng Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas, penetapan target pendapatan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016. Asumsi pendapatan asli daerah juga ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan kondisi obyektif di lapangan serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh dinas penghasil. Penetapan penerimaan dari dana transfer dan dana perimbangan dilakukan dengan memperhatikan pada alokasi pada tahun anggaran sebelumnya.

4.1.3. Upaya-upaya Pemerintah dalam Mencapai Target

Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mencapai target pendapatan daerah



sebagaimana diproyeksikan diatas dengan melaksanakan beberapa langkah kebijakan yang bersifat terpadu dengan melibatkan seluruh komponen dalam pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah dengan tetap tidak memberatkan pada masyarakat dan dunia usaha guna menjaga tingkat konsumsi masyarakat dan pemerintah sehingga mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan laju inflasi daerah.

Adapun langkah-langkah yang direncanakan sebagaimana dimaksud diatas antara lain adalah :

1. Meningkatkan kualitas layanan dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen melalui teknologi informasi sebagai pendukung utama kelembagaan ;
2. Pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dalam pembayaran pajak, retribusi dan pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah ;
4. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi atas pendapatan dan penerimaan daerah ;
5. Melakukan audit atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, dan pelaksanaan program kegiatan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas.

4.2. Belanja Daerah

Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng untuk Tahun Anggaran 2016 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan



pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2016 yaitu sebagai berikut.

4.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Perencanaan kebijakan belanja pemerintah daerah Kabupaten Soppeng diantaranya:

1. Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)
2. Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)
3. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)
4. Belanja Daerah berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)
5. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



6. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
7. Belanja daerah disusun berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Orientasi dari anggaran berbasis kinerja adalah pencapaian hasil (output dan outcome) dari input yang dimanfaatkan guna pencapaian target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing sebagaimana tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

Belanja Tidak Langsung yang meliputi Belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan belanja tak terduga merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

1. Belanja Pegawai
 - a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan



rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.

- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2016.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2016 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan



pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

- f. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial



Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

3. Belanja Bagi Hasil Pajak

- a) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2016, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2015 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
- b) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada



pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.

- c) Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota untuk pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

4. Belanja Bantuan Keuangan

- a) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- b) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal



95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2016 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.



5. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dana pendamping DAK yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah.

a. Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016 tidak terlepas dari kinerja tahun sebelumnya. Prioritas pembangunan daerah pada tahun 2016 merupakan pengejawantahan dari RKPD Tahun 2016.

Berdasarkan analisis kondisi Kabupaten Soppeng pada tahun-tahun sebelumnya, serta tantangan yang dihadapi pada tahun 2015, maka tema pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2015 yang akan dituangkan dalam arah kebijakan pembangunan daerah adalah **“Peningkatan Daya Saing Kompetitif Daerah Melalui Peningkatan Aksesibilitas Layanan Dasar dan Penguatan Sendi Perekonomian Daerah Dengan Dukungan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien”**. Dengan empat kata kunci yaitu (1) *Peningkatan Daya Saing Kompetitif Daerah* , (2) *Peningkatan*



Aksesibilitas Layanan Dasar, (3) Penguatan Sendi Perekonomian Daerah, dan (4) Birokrasi Yang Efektif dan Efisien.

b. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2016 yang diklasifikasikan ke dalam 4 (Empat) prioritas sebagai berikut :

1. **Peningkatan Akses Pelayanan Dasar**, melalui Peningkatan akses terhadap kesehatan, Peningkatan akses terhadap pendidikan, Pembinaan kepemudaan dan olah raga, Pengembangan kepastakaan, Penguatan Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, Penguatan Pemberdayaan Perempuan, Optimalisasi penyuluhan Keluarga Berencana, Optimalisasi pelayanan pencatatan sipil, kependudukan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi, penanggulangan bencana dan Optimalisasi fungsi polisi pamong praja.
2. **Peningkatan Perekonomian Daerah**, melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi Tanaman Pangan, hortikultura, kehutanan dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, Penerapan teknologi pertanian, Penguatan kelembagaan petani dan penyuluhan serta Ketahanan pangan, Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Industri Kecil dan Menengah (IKM), dan Koperasi, Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan (pasar), dan Pengembangan Destinasi Pariwisata dan penguatan kebudayaan
3. **Peningkatan Infrastruktur dan Kualitas Lingkungan**, melalui Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, Optimalisasi dan penataan pertambangan rakyat, Pengelolaan dan Konservasi Sungai dan Danau, Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih, Penambahan dan Pemeliharaan Penerangan jalan, pemeliharaan taman, penataan kebersihan permukiman, Pengendalian perlindungan hutan & konservasi sumberdaya alam, Penataan kawasan sesuai dengan RTRW Nasional, Provinsi dan Kabupaten.



4. **Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**, melalui Peningkatan SDM dan profesionalisme aparatur, Penataan kelembagaan pemerintahan daerah, Penataan dan optimalisasi pengelolaan keuangan, Perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan responsif, Optimalisasi fungsi pengawasan, pelayanan sistem satu atap, penguatan unit layanan pengadaan dan pengadaan secara elektronik, penatapan perda tepat waktu, penguatan jejaring kemitraan antar pemangku kepentingan (good governance).

c. Permasalahan Pembangunan yang dihadapi

Kesenjangan yang terjadi antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat ini, adalah merupakan permasalahan pembangunan daerah yang senantiasa dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan analisis kondisi umum daerah dan capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Soppeng selama ini, telah diidentifikasi sejumlah permasalahan pembangunan daerah yang membutuhkan perhatian serius dari segenap *stakeholder* pembangunan daerah.

1. Melambatnya Penurunan Angka Kemiskinan

Penanganan kemiskinan selama ini belum berjalan optimal karena terkendala oleh beberapa faktor seperti belum tersedianya data-base kemiskinan, belum adanya pemetaan penduduk miskin, belum disusunnya road-map penanggulangan kemiskinan, belum dikonstruksinya penanganan kemiskinan yang bersifat komprehensif, belum terbangunnya komitmen diantara seluruh stakeholder mengenai pentingnya memerangi kemiskinan dan sebagainya. Namun upaya penanggulangan



kemiskinan di daerah ini menjadi sedikit lebih mudah karena masalah kemiskinan telah ditempatkan sebagai peluang dan prioritas nasional serta telah menjadi agenda utama pembangunan daerah Sulawesi Selatan.

2. Belum Optimalnya Kualitas Pendidikan

Pembangunan pendidikan selama ini masih diperhadapkan pada sejumlah permasalahan, seperti terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan khususnya pada wilayah-wilayah dengan jumlah peserta didik yang potensial, serta belum optimalnya proses belajar mengajar dan tata kelola pendidikan.

3. Belum Optimalnya Derajat Kesehatan

Pembangunan kesehatan masih menghadapi sejumlah masalah terutama terkait dengan kualitas pelayanan kesehatan seperti masih terbatasnya ketersediaan tenaga medis; ketersediaan obat, pengawasan obat dan makanan; dan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat. Selain itu, sarana prasarana kesehatan terutama pada rumah sakit masih sangat terbatas.

Berbagai permasalahan tersebut di atas menyebabkan berbagai indikator di sektor kesehatan sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan standar pelayanan minimal belum dapat dicapai secara optimal.

4. Belum Optimalnya Pelayanan Publik

Terkait dengan pelayanan publik, masih terdapat sejumlah permasalahan, diantaranya belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan



pelayanan dasar dari pemerintah daerah, belum efektifnya pengelolaan kependudukan dan catatan sipil, yang ditandai dengan belum akuratnya data-base kependudukan.

5. Ketersediaan Infrastruktur Dasar Yang Masih Terbatas

Secara umum, ketersediaan infrastruktur dasar di daerah ini masih jauh dari memadai. Terdapat indikasi yang menunjukkan masih adanya wilayah yang belum memiliki akses jalan dan jembatan yang memadai. Selain itu, persentase rumah tangga yang telah menikmati air bersih yang layak dan energi listrik, juga tampak relatif rendah. Sarana perkotaan, seperti drainase dan pembuangan sampah, menunjukkan kinerja yang belum sepenuhnya memuaskan. Sedangkan sarana perdesaan, seperti jaringan irigasi dan jalan desa, juga tampak memerlukan peningkatan, baik kuantitas maupun kualitas.

6. Belum Optimalnya Produksi, Produktivitas dan Kualitas Produk Pertanian

Permasalahan di sektor pertanian ditandai oleh masih rendahnya produksi, tingkat produktivitas, dan kualitas produk. Belum berkembangnya sistem pertanian yang berbasis agribisnis dan agroindustri, rendahnya peningkatan nilai tambah (added value) di sektor pertanian. Selain itu, masih terbatasnya penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi, masih lemahnya kelembagaan petani, masih terbatasnya akses petani terhadap sumber permodalan, belum optimalnya penanganan panen dan pasca panen, masih terbatasnya usaha dan produksi pertanian organik yang dikembangkan secara terintegrasi, serta sejumlah permasalahan lain yang dihadapi di sektor pertanian. Seluruh masalah tersebut perlu ditangani secara serius,



mengingat sektor pertanian merupakan penghasil terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Soppeng, sumber mata pencaharian utama masyarakat lokal, dan merupakan sektor dengan tingkat penyerapan tenaga kerja tertinggi.

7. Daya Tarik dan Daya Saing Wilayah Yang Belum Optimal

Salah satu indikasi penting dari rendahnya daya tarik dan daya saing wilayah adalah rendahnya nilai penanaman modal baik dalam negeri maupun asing serta terbatasnya jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Soppeng.

Kondisi ini dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya, belum terpromosikannya Kabupaten Soppeng sebagai daerah tujuan investasi, belum teridentifikasinya secara akurat potensi dan peluang investasi daerah, belum berkembangnya wilayah agropolitan, belum ditetapkannya kawasan strategis sesuai dengan potensi wilayah, masih minimnya kemitraan dengan lembaga keuangan, swasta, dan lembaga donor dalam pembiayaan pembangunan daerah, belum optimalnya pemanfaatan ruang berbasis RTRW, belum berkembangnya kerjasama antar daerah, dan sebagainya.

8. Kualitas Lingkungan Yang Terdegradasi

Menurunnya kualitas lingkungan sebagai akibat tidak seimbang rasio kerusakan lingkungan dengan upaya untuk mengatasinya seperti reboisasi dan rehabilitasi kawasan hutan dengan pembalakan liar (illegal logging) dan perambahan hutan. Disamping itu, eksploitasi tambang golongan C yang mengabaikan



aspek daya dukung lingkungan, juga telah memberi dampak buruk terhadap kualitas lingkungan.

Indikasi menurunnya kualitas lingkungan, juga dapat diamati dari tingginya potensi wilayah banjir yang ditandai dengan semakin meluasnya spot wilayah banjir, dan meningkatnya sedimentasi pada daerah aliran sungai.

9. Belum Optimalnya Kegiatan Kepariwisata

Meskipun sektor pariwisata telah ditempatkan sebagai sektor prioritas, namun kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Soppeng belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun di daerah ini terdapat berbagai objek wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya, namun keberadaan objek wisata tersebut belum memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian daerah dan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat serta belum dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

10. Tidak Optimalnya Aktualisasi Nilai-nilai Agama dan Budaya

Permasalahan utama yang terkait dengan nilai-nilai agama dan budaya adalah berkurangnya kualitas dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, yang ditandai dengan adanya penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, perilaku seks di luar nikah, pornografi di kalangan remaja, dan berbagai kriminalitas dan tindak pidana. Sedangkan berkurangnya aktualisasi nilai-nilai budaya, ditandai dengan bergesernya pola perilaku masyarakat yang cenderung mengabaikan nilai-nilai kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial, lunturnya budaya saling menghargai dan menghormati, dan renggangnya



hubungan kekerabatan, yang dalam falsafah bugis dikenal dengan istilah “sipakatau, sipakalebbi, siamasei”.

4.2.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah.

Kebijakan belanja daerah berdasarkan urusan pemerintah daerah terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan urusan pemerintah daerah terdiri dari:

1. Urusan Wajib

a. Pelayanan Dasar

- Pendidikan
- Kesehatan
- PU & PR
- Sosial
- Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

b. Non Pelayanan Dasar

- Tenaga kerja
- PP & PA
- Pangan
- Pertanahan
- Lingkungan hidup
- Adm. Kependudukan dan pencatatan sipil;
- PMD
- Pengendalian penduduk dan KB;
- Perhubungan
- Kominfo
- Koperasi dan UKM;
- Penanaman modal
- Kepemudaan dan olahraga
- Statistik



- Persandian
- Kebudayaan
- Perpustakaan dan
- Arsip

2. Urusan Pilihan

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Tansmigrasi.

Belanja daerah Tahun 2016 diproyeksikan akan mencapai Rp.1.164.874.885.691,- yaitu meningkat sebesar Rp.72.519.376.475,- atau sebesar 24,22% dibandingkan asumsi belanja daerah pada APBD Pokok tahun anggaran 2015 yaitu sebesar Rp.937.734.583.216,-.

4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan ke Kas Daerah dalam bentuk Giro, Deposito, Penyertaan Modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah.

APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2016 diasumsikan mengalami surplus sehingga kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan



pengeluaran pembiayaan secara optimal yaitu dalam bentuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai balancing pendapatan daerah dan belanja daerah adalah Penerimaan Piutang Daerah dan penerimaan kembali investasi dana bergulir.

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu sebagaimana tersebut diatas antara lain adalah untuk penyediaan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah. Sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dalam bentuk penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah merupakan penganggaran kekayaan daerah yang diinvestasikan pada Bank Sulsel.



BAB V

P E N U T U P

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016 telah disusun melalui proses teknokratik dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011. Sedangkan substansi KUA Tahun Anggaran 2016 disusun berdasar pada Peraturan Bupati Soppeng Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016. Serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga hasil reses anggota DPRD Kabupaten Soppeng.

Fungsi dari dokumen KUA Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai dasar dalam penyusunan Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016. Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian masyarakat Kabupaten Soppeng dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2016 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2016 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Watansoppeng, November 2016

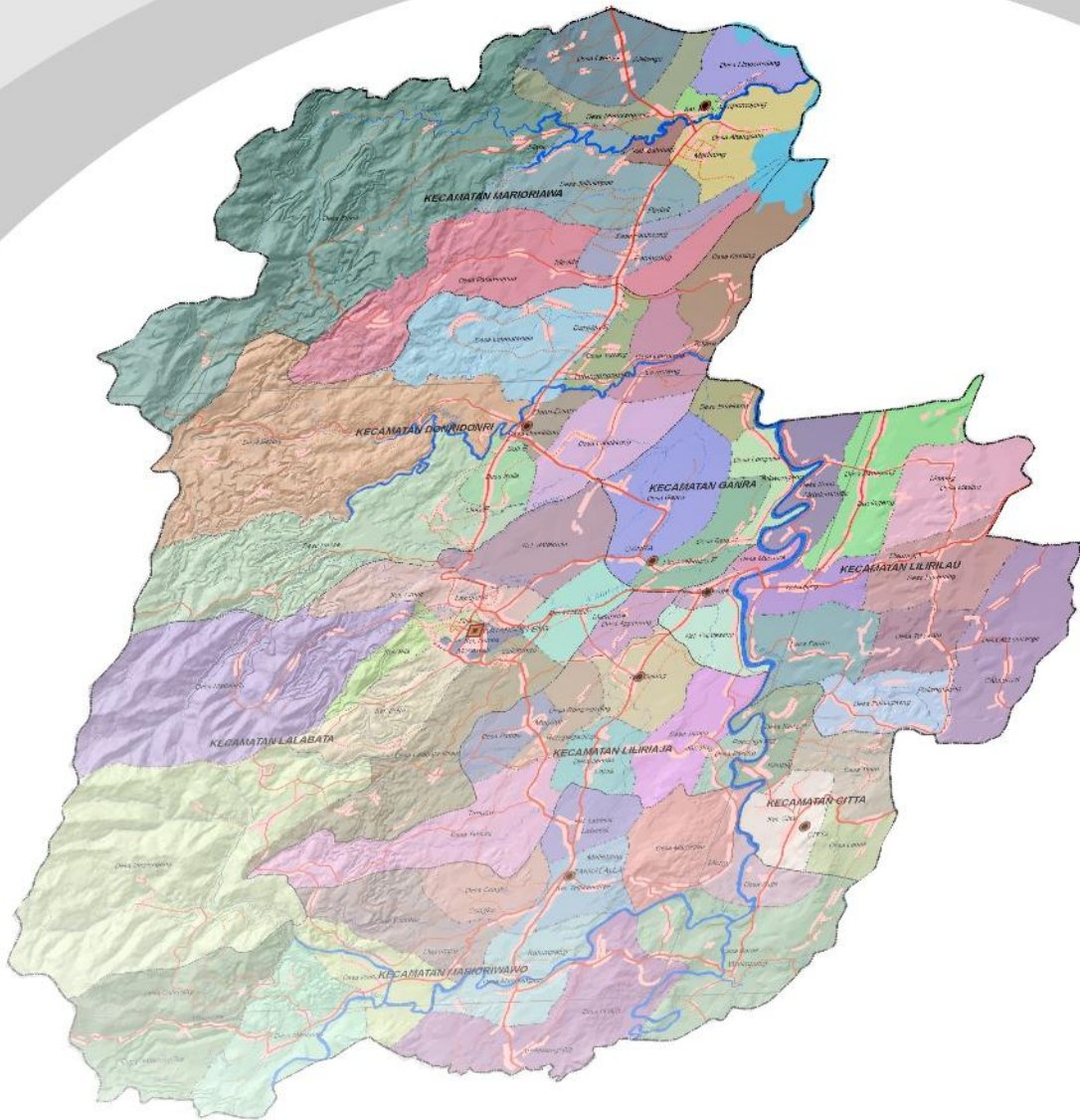
Pj. BUPATI SOPPENG

Drs. H. TAUTOTO T. RANGGINA S, M. Si.





RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) APBD TAHUN ANGGARAN 2016



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPING



DAFTAR ISI

	HALAMAN
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Dasar Penyusunan PPAS.....	4
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	9
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	10
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013	
4.1. Plafon Anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi	15
4.2. Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Program Kegiatan	19
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	177
BAB VI PENUTUP	178



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Permendagri 21 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimulai melalui proses perencanaan / penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dari sisi aspek keuangan daerah, APBD merupakan dokumen inti yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini didasarkan oleh pasal 309 Undang Undang nomor 23 tahun 2014 dinyatakan bahwa APBD merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka semua aktivitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib berpedoman kepada dokumen APBD yang telah disusun dan ditetapkan. Melihat proses penyusunan APBD yang begitu sentral dan penting maka pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam proses penyusunan hingga pengawasan APBD.

RAPBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah disusun oleh pemerintah daerah dan dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD. Selanjutnya dokumen ini disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang kemudian menjadi dokumen APBD.

Penyusunan dokumen APBD diawali oleh penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng tahun 2016. Hal tersebut sejalan dengan amanat pasal 265 ayat 3 Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS, Kepala Daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan fase/tahapan penting. Secara substansi dokumen PPAS tahun anggaran 2016 adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan dokumen PPAS dimaksudkan guna menjaga kesinambungan serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Prioritas belanja daerah Kabupaten Soppeng yang menjadi substansi PPAS disusun Peraturan Bupati Soppeng Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun serta dengan memperhatikan hasil reses DPRD Kabupaten Soppeng serta kebijakan pembangunan nasional.

Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program menjadi acuan dalam penyusunan RKA SKPD setelah disepakati dengan DPRD. Dengan demikian dokumen PPAS dan KUA terlebih dahulu disepakati bersama DPRD untuk kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan RKA SKPD dan selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD.

PPAS sebagai salah satu tahap proses penyusunan APBD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD. Selain itu fungsi penting dari PPAS adalah sebagai acuan dalam evaluasi dan pengujian kesesuaian rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. (Pasal 315 Undang Undang nomor 23 tahun 2014).

Setelah dokumen PPAS Tahun Anggaran 2016 tersusun, selanjutnya dokumen tersebut disampaikan kepada DPRD Kabupaten Soppeng untuk dibahas dan disepakati menjadi Nota Kesepakatan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2016.



Kemudian menurut Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, KUA dan PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, sesuai dengan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai pedoman bagi SKPD. dalam menyusun RKA-SKPD/UKPD. Dokumen RKA-SKPD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dokumen PPAS mempunyai peran dan fungsi yang sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan PPAS yang berkualitas dan akuntabel maka diharapkan dokumen APBD yang tersusun juga berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat Kabupaten Soppeng.

1.2 Tujuan

Memperhatikan kondisi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam KUA tahun 2016 maka PPAS Kabupaten Soppeng Tahun 2016 bertujuan:

1. Menyusun pedoman yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD tahun 2016;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2016 menurut urusan /bidang, urusan pemerintahan daerah, SKPD penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.
3. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.



I.3 Dasar Penyusunan PPAS

Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2016 adalah:

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5049);



8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568),
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Setda, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 91);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 92);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 93);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 94);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 98);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor Tahun 2010 111);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng 2011–2015, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 116 Tahun 2011);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 6);



32. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Soppeng;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
35. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;
36. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016.

**BAB II****RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli (PAD), Penerimaan Dana perimbangan dan lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah serta sumber pembiayaan berdasarkan Kebijakan Pendapatan Daerah dalam KUA sebagai berikut :

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016

No.	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran 2015	Dasar Hukum
1	2	3	4
1	Pendapatan Asli Daerah	59,817,709,386	
1.1	Pajak Daerah	10,196,100,000	Perda No. 3 Tahun 2012 tentang pajak daerah
1.2	Retribusi Daerah	6,443,109,000	- Perda No. 4 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, - Perda No. 5 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha - Perda No. 6 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8,452,817,334	
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34,725,683,052	
2	Dana Perimbangan	999,032,153,000	
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	26,118,645,000	- No. 77/PMK-07/2014 - No. 202/PMK.07/2013
2.2	Dana Alokasi Umum	635,976,768,000	
2.3	Dana Alokasi Khusus	336,936,740,000	
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	110,895,154,715	
3.1	Hibah	1,086,146,550	
3.2	Dana Darurat	-	
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	25,722,513,765	
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	72,021,764,000	
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	12,064,730,400	-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1,169,745,017,101	
4	Penerimaan Pembiayaan Daerah	129,868,590	
4.1	Penerimaan Piutang Daerah	94,379,808	
4.2	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	35,488,782	
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		129,868,590	
JUMLAH DANA TERSEDIA		1,169,874,885,691	



li Daerah
r-sumber

Ket.
5

BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas Penggunaan Pendapatan dan Sumber Pembiayaan Daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah

MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD Yang Melaksanakan	Nama Program
1	Peningkatan Akses Pelayanan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai yang dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan - Meningkatnya akses dan pemerataan pada jenjang pendidikan dasar yang berkualitas bagi semua anak usia 7-15 tahun yang ditandai dengan meningkatnya APK SD/MI/ sederajat dan APK SMP/MTs/ sederajat dari tahun sebelumnya - Meningkatnya akses terhadap pendidikan menengah yang ditandai dengan meningkatnya APK SMA/SMK/MA/ sederajat dari tahun sebelumnya - Meningkatnya akses terhadap pendidikan usia dini yang ditandai dengan meningkatnya APK PAUD dari tahun sebelumnya - Menurunnya angka putus sekolah dan angka mengulang kelas untuk semua jenjang pendidikan dan meningkatnya angka melanjutkan pendidikan - Membaiknya kemampuan keberaksaraan penduduk yang ditandai dengan meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15 tahun dan angka melek aksara penduduk usia 15-24 - Meningkatnya kualitas pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya proporsi pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik dan standar kompetensi yang disyaratkan, serta meningkatnya kesejahteraan pendidik - Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan pada semua jenjang - Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan - Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas - Tertanganinya penderita DBD, malaria, swan, kusta dan avian influenza serta Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) - Tersedianya obat generik esensial (buffer stock), obat flu burung maupun flu babi, obat bencana, obat haji, obat program, dan vaksin - Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga - Dinas Kesehatan & RSUD AJAPPANGE 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - Program Pendidikan Menengah - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - Program Pendidikan Menengah - Program Pendidikan Anak Usia Dini - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - Program Pendidikan Menengah - Program Pendidikan Non Formal - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan - Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan - Program Upaya Kesehatan - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - Program Obat dan Perbekalan Kesehatan - Program Perbaikan Gizi Masyarakat



No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD Yang Melaksanakan	Nama Program
		miskin		
2	Peningkatan Perekonomian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya cakupan ibu hamil yang mendapatkan zat besi (Fe tablet) - Meningkatnya anak balita 6-59 bulan yang mendapatkan kapsul Vitamin A - Meningkatnya cakupan keluarga yang mengkonsumsi garam beryodium yang cukup - Meningkatnya bayi usia 0-6 bulan yang mendapat ASI - Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana yang antara lain ditandai dengan terlayannya peserta KB secara baik dan meningkatnya peserta KB baru - Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh KB yang dapat mencapai cakupan wilayah Kabupaten Soppeng - Luasnya akses pelayanan dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) - Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat - Meningkatnya efektivitas pelaksanaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan - Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Untuk Meningkatkan Taraf Hidupnya - Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat - Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dan kelembagaan petani - Meningkatkan ketahanan pangan - Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian - Meningkatnya penerapan teknologi pertanian - Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi pertanian - Meningkatkan keberdayaan kelembagaan dan penyuluh pertanian - Meningkatnya potensi sumber daya hutan - Meningkatnya aktivitas rehabilitasi hutan dan lahan - Meningkatnya produksi dan Pemasaran hasil peternakan - Berkembangnya budidaya perikanan - Meningkatnya iklim usaha yang kondusif bagi UMKM - Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi - Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana - Dinas Sosial - BPM & PEMDES - Bag. Adm. Kesejahteraan Rakyat - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura - Dinas Kehutanan dan Perkebunan - BP3KP - Dinas Kehutanan dan Perkebunan - Dinas Peternakan dan Perikanan - Dinas Koperindag 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Program Perbaikan Gizi Masyarakat - - Program Keluarga Berencana - Program Pelayanan Kontrasepsi - Program Pembinaan peran serta Masyarakat dan Pelayanan KB/KR yang Mandiri - Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga - Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial - Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan - Program Pengembangan Lembaga - Program Fasilitasi & Koordinasi di bidang Pemerintahan dan - Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pangan Pertanian/Perkebunan - Program Peningkatan Ketahanan Pangan/Perkebunan - Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan - Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan - Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan - Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan - Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Program peningkatan produksi hasil peternakan - Program pemasaran produksi hasil peternakan - Program pengembangan budidaya perikanan - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi - Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan



No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD Yang Melaksanakan	Nama Program
		- Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri		- Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
3	Peningkatan Infrastruktur dan Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kapasitas pedagang kaki lima dan asongan - Meningkatnya kapasitas usaha skala mikro dan kecil melalui penguatan kelembagaan - Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi - Berkembangnya pengelolaan kekayaan budaya - Meningkatnya promosi dan pemasaran potensi pariwisata - Meningkatnya kualitas dan kuantitas tujuan pariwisata - Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan - meningkatnya Fasilitasi Manajemen Usaha bagi keluarga miskin - Meningkatnya penanganan Masalah - masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa - Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma - meningkatnya kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat - Tersedianya gambar perencanaan, data existing dan RAB, serta terciptanya pengawasan teknis pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan yang optimal - Meningkatnya Pembangunan Saluran Drainase/ gorong-gorong - Memperlancar dan mempercepat arus penumpang dan barang dari suatu daerah ke daerah lain - Terlaksananya Pekerjaan Kegiatan Lapangan Unit Kerja Secara Akurat dan Efisien - Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Pedesaan - Memperlancar Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi - Meningkatnya Pemanfaatan Ruang - Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Memperbanyak Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah. - Tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu berkelanjutan - Terkendalinya banjir - Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian Golongan "C" - Memperbanyak Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah. - Tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> - Bag. Adm Perekonomian Setda - Dinas Kebudayaan dan Kebudayaan - Dinas PSDA-PE - Dinas Sosial - Dinas Pekerjaan Umum - Dinas Kebersihan dan Pertamanan - PSDA - Kantor Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan - Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah - Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi - Program Pengelolaan Keragaman Budaya - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan - Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma - Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong - Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan - Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan - Program Pengaturan Jasa Konstruksi - Program Pemanfaatan Ruang - Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan - Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku - Program pengembangan dan pengelolaan jaringan, irigasi, rawa dan jaringan pengairan Lainnya - Program pengendalian banjir - Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan - Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam



No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD Yang Melaksanakan	Nama Program
		berkelanjutan		
4	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	<ul style="list-style-type: none"> - Terkendalinya banjir - Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian Golongan "C" - Terciptanya sistem pengawasan melekat baik dari lingkungan internal maupun eksternal - Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, transparan, profesional dan akuntabel - Terciptanya pengelolaan keuangan yang berdayaguna dan berhasil guna dengan mengacu pada prinsip efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel - Terciptanya kondisi yang baik bagi partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pembangunan - Berkembangnya mekanisme laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan keterangan pertanggung jawaban pemerintah daerah - Terciptanya perencanaan pembangunan yang responsive dan komprehensif di berbagai bidang - Meningkatnya kualitas SDM aparatur daerah dan kelembagaan pemerintahan yang dapat menjamin terlaksananya pelayanan publik yang responsif - Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional dan prajabatan - Terciptanya aparatur yang memiliki kompetensi dibidangnya melalui seleksi, penempatan dan pemberian penghargaan dan bantuan berupa beasiswa, tugas belajar maupun ikatan dinas - Ditegakkannya hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada kebenaran dan keadilan - Meningkatnya Upaya Penegakan, Pemenuhan dan Penghormatan terhadap Hak Asazi Manusia - Meninjau dan melahirkan peraturan daerah dan peraturan lainnya yang selaras dengan aturan di atasnya serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas - Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha - Terdorongnya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam 	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat Daerah - DPPKAD - Bappeda - Bagian Adm. Pemerintahan Umum - Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah - Bagian Hukum & Perundang-undangan - Kantor Pelayanan Terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - Program Peningkatan Pengendalian polusi - Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan - Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Perencanaan pembangunan Daerah - Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi - Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya - Program Penguatan Kelembagaan - Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur - Program pembinaan dan pengembangan aparatur - Program Penataan peraturan Perundang-Undangan - Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik



No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD Yang Melaksanakan	Nama Program
		setiap proses pemberian pelayanan publik		
		- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik Meningkatnya upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap pelayanan publik kepada masyarakat	- Semua SKPD	- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2016

4.1. Plafon Anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi sebagai berikut :

TABEL IV.1

No.	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket.
1	2	3	4
	Urusan Wajib	1,119,434,412,538.00	
	Pendidikan	<u>448,408,015,010.00</u>	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	448,408,015,010.00	
	- Belanja Tidak Langsung	393,780,315,133.00	
	- Belanja Langsung	54,627,699,877.00	
	Kesehatan	<u>106,071,035,580.00</u>	
2	Dinas Kesehatan	56,179,356,283.00	
	- Belanja Tidak Langsung	27,762,900,847.00	
	- Belanja Langsung	28,416,455,436.00	
3	RSUD AjapangE	49,891,679,297.00	
	- Belanja Tidak Langsung	14,258,827,297.00	
	- Belanja Langsung	35,632,852,000.00	
	Pekerjaan Umum	<u>222,712,485,721.00</u>	
4	Dinas Pekerjaan Umum	181,991,594,176.00	
	- Belanja Tidak Langsung	3,893,992,245.00	
	- Belanja Langsung	178,097,601,931.00	
5	Dinas PSDA, Pertambangan dan Energi	34,972,010,992.00	
	- Belanja Tidak Langsung	7,313,387,354.00	
	- Belanja Langsung	27,658,623,638.00	
6	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	5,748,880,553.00	
	- Belanja Tidak Langsung	2,496,509,353.00	
	- Belanja Langsung	3,252,371,200.00	
	Perencanaan Pembangunan	<u>6,509,637,788.00</u>	
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6,509,637,788.00	
	- Belanja Tidak Langsung	2,458,120,158.00	
	- Belanja Langsung	4,051,517,630.00	
	Perhubungan	<u>6,254,444,576.00</u>	
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika	6,254,444,576.00	
	- Belanja Tidak Langsung	4,052,326,486.00	
	- Belanja Langsung	2,202,118,090.00	
	Lingkungan Hidup	<u>2,900,916,720.00</u>	
9	Kantor Lingkungan Hidup	2,900,916,720.00	
	- Belanja Tidak Langsung	743,306,720.00	
	- Belanja Langsung	2,157,610,000.00	



No.	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket.
1	2	3	4
	Kependudukan dan Catatan Sipil	<u>5,536,580,706.00</u>	
10	Dinas Kependudukan, Capil, & Nakertrans	5,536,580,706.00	
	- Belanja Tidak Langsung	2,568,180,706.00	
	- Belanja Langsung	2,968,400,000.00	
	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	<u>6,118,309,358.00</u>	
11	Badan Pemberdayaan Perempuan & KB	6,118,309,358.00	
	- Belanja Tidak Langsung	4,151,739,358.00	
	- Belanja Langsung	1,966,570,000.00	
	Sosial	<u>9,313,940,439.00</u>	
12	Dinas Sosial	3,828,436,128.00	
	- Belanja Tidak Langsung	1,487,728,364.00	
	- Belanja Langsung	2,340,707,764.00	
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,485,504,311.00	
	- Belanja Tidak Langsung	1,785,224,311.00	
	- Belanja Langsung	3,700,280,000.00	
	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	<u>5,647,920,819.00</u>	
14	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan	5,647,920,819.00	
	- Belanja Tidak Langsung	2,465,710,819.00	
	- Belanja Langsung	3,182,210,000.00	
	Kebudayaan	<u>5,228,632,531.00</u>	
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5,228,632,531.00	
	- Belanja Tidak Langsung	2,531,332,531.00	
	- Belanja Langsung	2,697,300,000.00	
	Kesatuan Bangsa dan Politik Luar Negeri	<u>8,144,869,134.00</u>	
16	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	2,723,947,317.00	
	- Belanja Tidak Langsung	1,557,067,317.00	
	- Belanja Langsung	1,166,880,000.00	
17	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	5,420,921,817.00	
	- Belanja Tidak Langsung	2,917,084,937.00	
	- Belanja Langsung	2,503,836,880.00	
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian	<u>274,343,711,941.00</u>	
18	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4,660,572,546.00	
	- Belanja Tidak Langsung	4,660,572,546.00	
	- Belanja Langsung	0.00	
19	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	563,006,025.00	



No.	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket.
1	2	3	4
	- Belanja Tidak Langsung	563,006,025.00	
	- Belanja Langsung	0.00	
20	Sekretariat Daerah	28,598,444,025.00	
	- Belanja Tidak Langsung	8,530,598,063.00	
	- Belanja Langsung	20,067,845,962.00	
21	Sekretariat DPRD	19,893,747,216.00	
	- Belanja Tidak Langsung	2,735,351,216.00	
	- Belanja Langsung	17,158,396,000.00	
22	Inspektorat Daerah	6,450,289,054.00	
	- Belanja Tidak Langsung	2,484,289,054.00	
	- Belanja Langsung	3,966,000,000.00	
23	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	6,282,795,234.00	
	- Belanja Tidak Langsung	2,426,604,570.00	
	- Belanja Langsung	3,856,190,664.00	
24	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah	177,236,515,444.00	
	- Belanja Tidak Langsung	147,893,623,823.00	
	- Belanja Langsung	29,342,891,621.00	
25	Kantor Pelayanan Terpadu	1,569,745,953.00	
	- Belanja Tidak Langsung	723,545,953.00	
	- Belanja Langsung	846,200,000.00	
26	Kecamatan Lalabata	7,333,082,053.00	
	- Belanja Tidak Langsung	5,323,274,047.00	
	- Belanja Langsung	2,009,808,006.00	
27	Kecamatan Donri-Donri	1,829,005,865.00	
	- Belanja Tidak Langsung	1,435,950,048.00	
	- Belanja Langsung	393,055,817.00	
28	Kecamatan Liriaja	3,846,102,696.00	
	- Belanja Tidak Langsung	2,637,733,020.00	
	- Belanja Langsung	1,208,369,676.00	
29	Kecamatan Lirilau	4,559,486,343.00	
	- Belanja Tidak Langsung	3,245,738,470.00	
	- Belanja Langsung	1,313,747,873.00	
30	Kecamatan Marioriawa	5,006,140,058.00	
	- Belanja Tidak Langsung	3,082,360,021.00	
	- Belanja Langsung	1,923,780,037.00	



No.	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Ket.
1	2	3	4
31	Kecamatan Marioriwawo	3,520,372,484.00	
	- Belanja Tidak Langsung	2,665,880,152.00	
	- Belanja Langsung	854,492,332.00	
32	Kecamatan Ganra	1,583,638,650.00	
	- Belanja Tidak Langsung	1,214,984,238.00	
	- Belanja Langsung	368,654,412.00	
33	Kecamatan Citta	1,410,768,295.00	
	- Belanja Tidak Langsung	995,911,072.00	
	- Belanja Langsung	414,857,223.00	
	Ketahanan Pangan	<u>13,090,108,549.00</u>	
34	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan	13,090,108,549.00	
	- Belanja Tidak Langsung	10,020,598,549.00	
	- Belanja Langsung	3,069,510,000.00	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<u>2,987,803,222.00</u>	
35	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes	2,987,803,222.00	
	- Belanja Tidak Langsung	1,543,803,222.00	
	- Belanja Langsung	1,444,000,000.00	
	Perpustakaan	<u>1,813,921,263.00</u>	
36	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	1,813,921,263.00	
	- Belanja Tidak Langsung	963,121,263.00	
	- Belanja Langsung	850,800,000.00	
	Urusan Pilihan	<u>39,792,552,334.00</u>	
	Pertanian	<u>30,597,485,259.00</u>	
37	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura	21,456,317,814.00	
	- Belanja Tidak Langsung	3,068,510,419.00	
	- Belanja Langsung	18,387,807,395.00	
38	Dinas Peternakan & Perikanan	9,141,167,445.00	
	- Belanja Tidak Langsung	3,053,287,445.00	
	- Belanja Langsung	6,087,880,000.00	
	Kehutanan	<u>9,195,067,075.00</u>	
39	Dinas Kehutanan & Perkebunan	9,195,067,075.00	
	- Belanja Tidak Langsung	2,744,902,511.00	
	- Belanja Langsung	6,450,164,564.00	
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG		688,237,399,663.00	
JUMLAH BELANJA LANGSUNG		476,637,486,028.00	
JUMLAH TOTAL BELANJA		1,164,874,885,691.00	



TABEL IV.3

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2016

No.	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3
1	Belanja Pegawai	582,159,278,814.00
2	Belanja Bunga	-
3	Belanja Subsidi	-
4	Belanja Hibah	1,320,000,000.00
5	Belanja Bantuan Sosial	
6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1,603,220,900.00
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	99,671,620,172.00
8	Belanja Tidak Terduga	3,483,279,777.00
JUMLAH		688,237,399,663.00



BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah

:

Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran

No.	Uraian
1	2
	PEMBIAYAAN DAERAH
1	Penerimaan Pembiayaan
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
1.6	Penerimaan piutang daerah
1.7	Penerimaan kembali investasi dana bergulir
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan
2	Pengeluaran Pembiayaan
2.1	Pembentukan dana cadangan
2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah
2.3	Pembayaran pokok utang
2.4	Pemberian pinjaman daerah
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
	Pembiayaan Neto



rah sebagaimana tabel berikut

aran 2016

Plafon Anggaran Sementara (Rp)
3
-
94,379,808.00
35,488,782.00
129,868,590.00
-
5,000,000,000.00
-
-
5,000,000,000.00
(4,870,131,410.00)

RINGKASAN RAPBD TAHUN ANGGARAN 2015

Kode	Nama SKPD	PENDAPATAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG	TOTAL BELANJA	KETERANGAN
			GAJI & TUNJANGAN	NON GAJI			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		232,919,402,627	146,840,670,000	48,633,941,714	428,394,014,341	
1.02.01	Dinas Kesehatan	10,624,716,584	25,410,600,788		27,582,889,291	52,993,490,079	
1.02.02	RSUD AjjapangE	22,883,331,110	12,827,050,581		37,499,912,112	50,326,962,693	
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	300,000,000	3,698,878,931		47,265,893,000	50,964,771,931	
1.03.02	Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air, Pertambangan dan Energi		6,629,230,883		7,551,477,000	14,180,707,883	
1.03.03	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	88,000,000	2,262,949,984		3,150,280,000	5,413,229,984	
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		2,156,517,072		4,022,178,875	6,178,695,947	
1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	720,000,000	3,504,063,784		3,012,849,500	6,516,913,284	
1.08.01	Kantor Lingkungan Hidup		736,257,471		2,484,071,000	3,220,328,471	
1.10.01	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		2,291,670,082		1,980,000,000	4,271,670,082	
1.11.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB		3,820,782,378		2,397,030,000	6,217,812,378	
1.13.01	Dinas Sosial		1,086,301,133		1,870,000,000	2,956,301,133	
1.13.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		13,909,124,372		2,674,244,075	16,583,368,447	
1.15.01	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan		2,229,634,912		3,944,286,264	6,173,921,176	
1.17.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1,627,500,000	2,322,877,415		3,820,000,000	6,142,877,415	
1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		1,243,471,007		1,122,000,000	2,365,471,007	
1.19.02	Kantor Polisi Pamong Praja		2,683,001,794		2,529,092,000	5,212,093,794	
1.20.01	DPRD		3,138,162,379	1,512,000,000	0	4,650,162,379	
1.20.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		163,438,305	400,000,000	0	563,438,305	
1.20.03	Sekretariat Daerah		7,921,290,955		23,590,139,630	31,511,430,585	
1.20.04	Sekretariat DPRD		2,819,564,693		12,960,000,000	15,779,564,693	
1.20.05	Inspektorat Daerah		2,135,905,984		2,200,000,000	4,335,905,984	
1.20.06	Badan Kepegawaian dan Diklat		2,338,412,225		3,026,601,600	5,365,013,825	
1.20.07	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	877,876,031,664	21,312,095,338	66,301,837,539	17,822,561,225	105,436,494,102	
1.20.08	Kantor Pelayanan Terpadu	361,000,000	716,643,360		1,008,000,000	1,724,643,360	

Kode	Nama SKPD	PENDAPATAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG	TOTAL BELANJA	KETERANGAN
			GAJI & TUNJANGAN	NON GAJI			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.20.09	Kecamatan Lalabata		4,744,760,737		1,196,946,656	5,941,707,393	
1.20.10	Kecamatan Donri-Donri		1,335,941,515		377,938,286	1,713,879,801	
1.20.11	Kecamatan Liliriaja		2,501,471,935		724,821,056	3,226,292,991	
1.20.12	Kecamatan Lilirilau		2,960,211,553		738,338,286	3,698,549,839	
1.20.13	Kecamatan Marioriawa		2,958,951,108		767,938,286	3,726,889,394	
1.20.14	Kecamatan Maroriwawo		2,319,685,417		590,412,000	2,910,097,417	
1.20.15	Kecamatan Ganra		1,097,835,054		354,475,396	1,452,310,450	
1.20.16	Kecamatan Citta		835,138,672		373,901,176	1,209,039,848	
1.21.01	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan		9,471,632,909		3,614,387,000	13,086,019,909	3,248,290,250
1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		1,434,335,607		5,071,700,000	6,506,035,607	
1.26.01	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah		775,837,180		770,000,000	1,545,837,180	
2.01.01	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		2,641,502,381		7,132,862,000	9,774,364,381	8,231,152,250
2.01.02	Dinas Peternakan dan Perikanan	784,375,000	2,973,000,990		6,601,112,750	9,574,113,740	6,235,016,000
2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan		2,711,838,970		5,838,562,750	8,550,401,720	5,472,466,000
	JUMLAH	915,264,954,358	399,039,472,481	215,054,507,539	296,300,842,928	910,394,822,948	

Watansoppeng, 17 Oktober 2014

KABID ANGGARAN

A. PILHAM M.,SE.Ak.

**PEMERINTAH
RINGKAS
AN
APBD
MANTAN**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
1	2	3	4	5	
1	Urusan Wajib	1,168,959,642,101.00	679,370,699,288.00	445,711,634,069.00	
1.01	Pendidikan	0.00	394,743,436,396.00	55,478,499,877.00	
1.01.01	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		0.00	393,780,315,133.00	54,627,699,877.00
1.01.02	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah		0.00	963,121,263.00	850,800,000.00
1.02	Kesehatan	31,953,234,000.00	42,021,728,144.00	64,049,307,436.00	
1.02.01	Dinas Kesehatan	6,953,234,000.00		27,762,900,847.00	28,416,455,436.00
1.02.02	RSUD AjjapangE	25,000,000,000.00		14,258,827,297.00	35,632,852,000.00
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	515,000,000.00	13,703,888,952.00	209,008,596,769.00	
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	425,000,000.00		3,893,992,245.00	178,097,601,931.00
1.03.02	Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air, Pertambangan dan Energi		0.00	7,313,387,354.00	27,658,623,638.00
1.03.03	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	90,000,000.00		2,496,509,353.00	3,252,371,200.00
1.06	Perencanaan Pembangunan	0.00	2,458,120,158.00	4,051,517,630.00	
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.00	2,458,120,158.00	4,051,517,630.00
1.07	Perhubungan	565,000,000.00	4,052,326,486.00	2,202,118,090.00	
1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	565,000,000.00		4,052,326,486.00	2,202,118,090.00
1.08	Lingkungan Hidup	0.00	743,306,720.00	2,157,610,000.00	
1.08.01	Kantor Lingkungan Hidup		0.00	743,306,720.00	2,157,610,000.00
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	0.00	2,568,180,706.00	2,968,400,000.00	
1.10.01	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0.00	2,568,180,706.00	2,968,400,000.00
1.11	Pemberdayaan Perempuan	0.00	4,151,739,358.00	1,966,570,000.00	
1.11.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB		0.00	4,151,739,358.00	1,966,570,000.00
1.13	Sosial	0.00	3,272,952,675.00	6,040,987,764.00	
1.13.01	Dinas Sosial		0.00	1,487,728,364.00	2,340,707,764.00
1.13.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0.00	1,785,224,311.00	3,700,280,000.00
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	0.00	2,465,710,819.00	3,182,210,000.00	
1.15.01	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan		0.00	2,465,710,819.00	3,182,210,000.00
1.17	Kebudayaan	1,667,500,000.00	2,531,332,531.00	2,697,300,000.00	
1.17.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1,667,500,000.00		2,531,332,531.00	2,697,300,000.00
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	0.00	4,474,152,254.00	3,670,716,880.00	
1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		0.00	1,557,067,317.00	1,166,880,000.00
1.19.02	Kantor Polisi Pamong Praja		0.00	2,917,084,937.00	2,503,836,880.00
1.20	Pemerintahan Umum	1,134,258,908,101.00	190,619,422,318.00	83,724,289,623.00	
1.20.01	DPRD		0.00	4,660,572,546.00	0.00
1.20.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		0.00	563,006,025.00	0.00

1.20.03	Sekretariat Daerah	0.00	8,530,598,063.00	20,067,845,962.00
1.20.04	Sekretariat DPRD	0.00	2,735,351,216.00	17,158,396,000.00
1.20.05	Inspektorat Daerah	0.00	2,484,289,054.00	3,966,000,000.00
1.20.06	Badan Kepegawaian dan Diklat	0.00	2,426,604,570.00	3,856,190,664.00
1.20.07	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1,134,178,908,101.00	147,893,623,823.00	29,342,891,621.00

1.20.08	Kantor Pelayanan Terpadu	80,000,000.00	723,545,953.00	846,200,000.00
1.20.09	Kecamatan Lalabata	0.00	5,323,274,047.00	2,009,808,006.00
1.20.10	Kecamatan Donri-Donri	0.00	1,435,950,048.00	393,055,817.00
1.20.11	Kecamatan Liliraja	0.00	2,637,733,020.00	1,208,369,676.00
1.20.12	Kecamatan Lilirilau	0.00	3,245,738,470.00	1,313,747,873.00
1.20.13	Kecamatan Marioriwawa	0.00	3,082,360,021.00	1,923,780,037.00
1.20.14	Kecamatan Marioriwawo	0.00	2,665,880,152.00	854,492,332.00
1.20.15	Kecamatan Ganra	0.00	1,214,984,238.00	368,654,412.00
1.20.16	Kecamatan Citta	0.00	995,911,072.00	414,857,223.00
1.21	Kepegawaian	0.00	10,020,598,549.00	3,069,510,000.00
1.21.01	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan	0.00	10,020,598,549.00	3,069,510,000.00
1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0.00	1,543,803,222.00	1,444,000,000.00
1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0.00	1,543,803,222.00	1,444,000,000.00
2	Urusan Pilihan	785,375,000.00	8,866,700,375.00	30,925,851,959.00
2.01	Pertanian	785,375,000.00	6,121,797,864.00	24,475,687,395.00
2.01.01	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	0.00	3,068,510,419.00	18,387,807,395.00
2.01.02	Dinas Peternakan dan Perikanan	785,375,000.00	3,053,287,445.00	6,087,880,000.00
2.02	Kehutanan	0.00	2,744,902,511.00	6,450,164,564.00
2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	0.00	2,744,902,511.00	6,450,164,564.00
TOTAL		1,169,745,017,101.00	688,237,399,663.00	476,637,486,028.00
Surplus /		4,870,131,410.00		

Watansoppeng,

JUMLAH BELANJA

6=4+5

1,125,082,333,357.00

450,221,936,273.00

448,408,015,010.00

1,813,921,263.00

106,071,035,580.00

56,179,356,283.00

49,891,679,297.00

222,712,485,721.00

181,991,594,176.00

34,972,010,992.00

5,748,880,553.00

6,509,637,788.00

6,509,637,788.00

6,254,444,576.00

6,254,444,576.00

2,900,916,720.00

2,900,916,720.00

5,536,580,706.00

5,536,580,706.00

6,118,309,358.00

6,118,309,358.00

9,313,940,439.00

3,828,436,128.00

5,485,504,311.00

5,647,920,819.00

5,647,920,819.00

5,228,632,531.00

5,228,632,531.00

8,144,869,134.00

2,723,947,317.00

5,420,921,817.00

274,343,711,941.00

4,660,572,546.00

563,006,025.00

28,598,444,025.00
19,893,747,216.00
6,450,289,054.00
6,282,795,234.00
177,236,515,444.00

1,569,745,953.00
7,333,082,053.00
1,829,005,865.00
3,846,102,696.00
4,559,486,343.00
5,006,140,058.00
3,520,372,484.00
1,583,638,650.00
1,410,768,295.00

13,090,108,549.00

13,090,108,549.00

2,987,803,222.00

2,987,803,222.00

39,792,552,334.00

30,597,485,259.00

21,456,317,814.00

9,141,167,445.00

9,195,067,075.00

9,195,067,075.00

1,164,874,885,691.00

BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas Penggunaan Pendapatan dan Sumber Pembiayaan Daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah

MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD Yang Melaksanakan	Nama Program
1	<i>Peningkatan Akses Pelayanan Dasar</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai yang dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan - Meningkatnya akses dan pemerataan pada jenjang pendidikan dasar yang berkualitas bagi semua anak usia 7-15 tahun yang ditandai dengan meningkatnya APK SD/MI/ sederajat dan APK SMP/MTs/ sederajat dari tahun sebelumnya - Meningkatnya akses terhadap pendidikan menengah yang ditandai dengan meningkatnya APK SMA/SMK/MA/ sederajat dari tahun sebelumnya - Meningkatnya akses terhadap pendidikan usia dini yang ditandai dengan meningkatnya APK PAUD dari tahun sebelumnya - Menurunnya angka putus sekolah dan angka mengulang kelas untuk semua jenjang pendidikan dan meningkatnya angka melanjutkan pendidikan - Membaiknya kemampuan keberaksaraan penduduk yang ditandai dengan meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15 tahun dan angka melek aksara penduduk usia 15-24 - Meningkatnya kualitas pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya proporsi pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik dan standar kompetensi yang disyaratkan, serta meningkatnya kesejahteraan pendidik - Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan pada semua jenjang - Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan - Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga - Dinas Kesehatan & RSUD AJAPPANGE 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - Program Pendidikan Menengah - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - Program Pendidikan Menengah - Program Pendidikan Anak Usia Dini - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - Program Pendidikan Menengah - Program Pendidikan Non Formal - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan - Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan - Program Upaya Kesehatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Tertanganinya penderita DBD, malaria, swan, kusta dan avian influenza serta Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) - Tersedianya obat generik esensial (buffer stock), obat flu burung maupun flu babi, obat bencana, obat haji, obat program, dan vaksin - Meningkatnya cakupan pemberian 		<ul style="list-style-type: none"> - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - Program Obat dan Perbekalan Kesehatan - Program Perbaikan Gizi Masyarakat



No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD Yang Melaksanakan	Nama Program
2	Peningkatan Perekonomian Daerah	<p>makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya cakupan ibu hamil yang mendapatkan zat besi (Fe tablet) - Meningkatnya anak balita 6-59 bulan yang mendapatkan kapsul Vitamin A - Meningkatnya cakupan keluarga yang mengkonsumsi garam beryodium yang cukup - Meningkatnya bayi usia 0-6 bulan yang mendapat ASI - Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana yang antara lain ditandai dengan terlayannya peserta KB secara baik dan meningkatnya peserta KB baru - Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh KB yang dapat mencapai cakupan wilayah Kabupaten Soppeng - Luasnya akses pelayanan dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) - Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat - Meningkatnya efektivitas pelaksanaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan - Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Untuk Meningkatkan Taraf Hidupnya - Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat - Meningkatnya kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dan kelembagaan petani - Meningkatnya ketahanan pangan - Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian - Meningkatnya penerapan teknologi pertanian - Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi pertanian - Meningkatnya keberdayaan kelembagaan dan penyuluh pertanian - Meningkatnya potensi sumber daya hutan - Meningkatnya aktivitas rehabilitasi hutan dan lahan - Meningkatnya produksi dan Pemasaran hasil peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana - Dinas Sosial - BPM & PEMDES - Bag. Adm. Kesejahteraan Rakyat - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura - Dinas Kehutanan dan Perkebunan - BP3KP - Dinas Kehutanan dan Perkebunan - Dinas Peternakan dan Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Program Keluarga Berencana - Program Pelayanan Kontrasepsi - Program Pembinaan peran serta Masyarakat dan Pelayanan KB/KR yang Mandiri - Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga - Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial - Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan - Program Pengembangan Lembaga - Program Fasilitasi & Koordinasi di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pangan Pertanian/Perkebunan - Program Peningkatan Ketahanan Pangan/Perkebunan - Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan - Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan - Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan - Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan - Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Program peningkatan produksi hasil peternakan - Program pemasaran produksi hasil peternakan
		<ul style="list-style-type: none"> - Berkembangnya budidaya perikanan - Meningkatnya iklim usaha yang kondusif bagi UMKM - Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi - Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Koperindag 	<ul style="list-style-type: none"> - Program pengembangan budidaya perikanan - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi - Program perlindungan konsumen dan



No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD Yang Melaksanakan	Nama Program
3	Peningkatan Infrastruktur dan Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - tercapainya konsumen dan pengamanan perdagangan - Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri - Meningkatkan kapasitas pedagang kaki lima dan asongan - Meningkatkan kapasitas usaha skala mikro dan kecil melalui penguatan kelembagaan - Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi - Berkembangnya pengelolaan kekayaan budaya - Meningkatkan promosi dan pemasaran potensi pariwisata - Meningkatkan kualitas dan kuantitas tujuan pariwisata - Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan - meningkatnya Fasilitasi Manajemen Usaha bagi keluarga miskin - Meningkatkan penanganan Masalah - masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa - Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma - meningkatnya kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat - Tersedianya gambar perencanaan, data existing dan RAB, serta terciptanya pengawasan teknis pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan yang optimal - Meningkatkan Pembangunan Saluran Drainase/ gorong-gorong - Memperlancar dan mempercepat arus penumpang dan barang dari suatu daerah ke daerah lain - Terlaksananya Pekerjaan Kegiatan Lapangan Unit Kerja Secara Akurat dan Efisien - Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan - Memperlancar Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi - Meningkatkan Pemanfaatan Ruang - Meningkatkan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Memperbanyak Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bag. Adm Perekonomian Setda - Dinas Kebudayaan dan Kebudayaan - Dinas PSDA-PE - Dinas Sosial - Dinas Pekerjaan Umum - Dinas Kebersihan dan Pertamanan - PSDA - Kantor Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - pengamanan perdagangan - Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri - Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan - Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah - Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi - Program Pengelolaan Keragaman Budaya - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan - Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma - Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong - Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan - Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan - Program Pengaturan Jasa Konstruksi - Program Pemanfaatan Ruang - Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan - Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku - Program pengembangan dan pengelolaan jaringan, irigasi, rawa dan jaringan pengairan Lainnya - Program pengendalian banjir - Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan - Pengendalian Pencemaran dan
		<ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu berkelanjutan - Terkendalinya banjir - Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian Golongan "C" - Memperbanyak Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Program pengembangan dan pengelolaan jaringan, irigasi, rawa dan jaringan pengairan Lainnya - Program pengendalian banjir - Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan - Pengendalian Pencemaran dan



No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD Yang Melaksanakan	Nama Program
		<ul style="list-style-type: none"> - Sumur-sumur Air Tanah. - Tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu berkelanjutan - Terkendalinya banjir - Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian Golongan "C" 		<ul style="list-style-type: none"> - Perusakan Lingkungan Hidup - Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam - Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - Program Peningkatan Pengendalian polusi
4	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	<ul style="list-style-type: none"> - Terciptanya sistem pengawasan melekat baik dari lingkungan internal maupun eksternal - Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, transparan, profesional dan akuntabel - Terciptanya pengelolaan keuangan yang berdayaguna dan berhasil guna dengan mengacu pada prinsip efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel - Terciptanya kondisi yang baik bagi partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pembangunan - Berkembangnya mekanisme laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan keterangan pertanggung jawaban pemerintah daerah - Terciptanya perencanaan pembangunan yang responsive dan komprehensif di berbagai bidang - Meningkatnya kualitas SDM aparatur daerah dan kelembagaan pemerintahan yang dapat menjamin terlaksananya pelayanan publik yang responsif - Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional dan prajabatan - Terciptanya aparatur yang memiliki kompetensi dibidangnya melalui seleksi, penempatan dan pemberian penghargaan dan bantuan berupa beasiswa, tugas belajar maupun ikatan dinas - Ditegakkannya hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada kebenaran dan keadilan - Meningkatnya Upaya Penegakan, Pemenuhan dan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia - Meninjau dan melahirkan peraturan daerah dan peraturan lainnya yang selaras dengan aturan di atasnya serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas 	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat Daerah - DPPKAD - Bappeda - Bagian Adm. Pemerintahan Umum - Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah - Bagian Hukum & Perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan - Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Perencanaan pembangunan Daerah - Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi - Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya - Program Penguatan Kelembagaan - Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur - Program pembinaan dan pengembangan aparatur - Program Penataan peraturan Perundang-Undangan



No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD Yang Melaksanakan	Nama Program
		- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha	- Kantor Pelayanan Terpadu	- Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
		- Terdorongnya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam setiap proses pemberian pelayanan publik - Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik Meningkatnya upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap pelayanan publik kepada masyarakat -	- Semua SKPD	- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



4.2. Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Program Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Program Kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dalam bentuk tabulasi sebagai berikut :

TABEL IV.2

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Urusan : 1.01 Pendidikan

SKPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
Kantor Dinas Dikmudora				54,627,699,877.00
1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,817,509,875.00
1.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Dinas Dikmudora	100	219,575,500.00
1.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Kantor dan sekolah	100	23,200,000.00
1.01.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kantor Dinas Dikmudora	100	52,270,000.00
1.01.01.01.09	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Dinas Dikmudora	100	5,000,000.00
1.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Kantor Dinas Dikmudora	100	13,800,000.00
1.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Kantor Dinas Dikmudora	100	16,856,500.00
1.01.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kantor Dinas Dikmudora	100	13,538,000.00
1.01.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Aparatur Lingkup Dinas	100	668,502,375.00
1.01.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Dinas Dikmudora	100	721,767,500.00
1.01.01.01.25	Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan	Kantor Dinas Dikmudora	100	60,000,000.00
	Pengadaan Barang/Jasa			
1.01.01.01.27	Pengelolaan Web Site Dinas/Badan/Kantor	Kantor Dinas Dikmudora	100	23,000,000.00
1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			299,948,500.00
1.01.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Kantor Dinas Dikmudora	100	
1.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kantor Dinas Dikmudora	100	50,000,000.00
1.01.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor Dinas Dikmudora	100	50,700,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Kantor Dinas Dikmudora	100	36,200,000.00
1.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Dinas Dikmudora	100	13,800,000.00
1.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas	100	113,548,500.00
1.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kantor Dinas Dikmudora	100	35,700,000.00
1.01.01.02.30	Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman, Taman, Pagar, Tempat Parkir	Kantor Dinas Dikmudora	100	
1.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			35,000,000.00
1.01.01.03.06	Pembinaan Kepegawaian	Staf dinas dikmudora	100	35,000,000.00
1.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			90,000,000.00
1.01.01.05.03	Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Staf dinas dikmudora	100	90,000,000.00
1.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			95,000,000.00
1.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Laporan	100	70,000,000.00
1.01.01.06.04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Laporan/Dokumen	100	25,000,000.00
1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			917,027,507.00
1.01.01.15.01	Pembangunan Gedung Sekolah	Sarana dan Prasarana PAUD	100	302,027,507.00
1.01.01.15.51	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Sarana dan Prasarana PAUD	100	140,000,000.00
1.01.01.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Tutor kelompok bermain	100	475,000,000.00
1.01.01.16	Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun			34,018,216,895.00
1.01.01.16.62	Penambahan ruang kelas sekolah	Tenaga Pendidik tingkat DIKDAS	100	190,194,245.00
1.01.01.16.09	Penyelenggraan paket C setara SMU	Penyelenggara Pendidikan tingkat	100	100,000,000.00
1.01.01.16.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Siswa SD/MI dan SMP/MTs	100	100,000,000.00
1.01.01.16.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Siswa SD/MI dan SMP/MTs	100	210,000,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.01.01.16.56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	Siswa SD/MI dan SMP/MTs	100	65,040,125.00
1.01.01.16.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Siswa SD/MI dan SMP/MTs	100	149,975,000.00
1.01.01.16.63	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP	Siswa SD/MI dan SMP/MTs	100	21,850,000.00
1.01.01.16.68	Penyelenggraan paket B setara SMP	Siswa SD/MI dan SMP/MTs	100	65,350,000.00
1.01.01.16.70	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Siswa SD/MI dan SMP/MTs	100	163,407,400.00
1.01.01.16.89	Lomba Olimpiade Nasional Guru	Siswa SD/MI dan SMP/MTs	100	40,040,125.00
1.01.01.16.98	Pembangunan, Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana/Infrastruktur Pendidikan Daerah	Siswa SD/MI dan SMP/MTs	100	29,543,000,000.00
1.01.01.16.99	Pembangunan, Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana/Infrastruktur Pendidikan (DAK)	Siswa SD/MI dan SMP/MTs	100	3,369,360,000.00
1.01.01.17	Program Pendidikan Menengah			381,047,400.00
1.01.01.17.62	Bantuan Beasiswa	SISWA	100	120,000,000.00
1.01.01.17.63	Penyelenggaraan Paket C setara SMA	Sekolah SMA	100	63,945,000.00
1.01.01.17.70	Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa	siswa	100	133,125,000.00
1.01.01.17.73	Pembinaan Siswa OSN	Siswa	100	63,977,400.00
1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal			103,862,500.00
1.01.01.18.04	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Masyarakat buta aksara	100	103,862,500.00
1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			261,547,500.00
1.01.01.20.01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Tenaga Pendidik	100	43,325,000.00
1.01.01.20.02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga	Tenaga Pendidik	100	106,422,500.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.01.01.20.03	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar	Tenaga Pendidik	100	71,800,000.00
1.01.01.20.13	Pelaksanaan Uji kOmpetensi Bagi Calon Kepala Sekolah	Tenaga Pendidik	100	40,000,000.00
1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			701,762,700.00
1.01.01.22.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Penyelenggara Pendidikan	100	19,500,000.00
1.01.01.22.10	Penyusunan Profil Pendidikan	Penyelenggara Pendidikan	100	145,000,000.00
1.01.01.22.11	Penggandaan Naskah, Pendistribusian, Pencetakan LJK UNAS SLB, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan Pemantauan UAN/UN SLB, SMP/MTs, SMA/MA/SMK	Penyelenggara Ujian Akhir	100	537,262,700.00
1.01.01.23	Program Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar (DIKDAS)			9,198,968,000.00
1.01.01.23.06	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Gratis	Penyelenggara Pendidikan tingkat DIKDAS	100	35,000,000.00
1.01.01.23.07	Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar (APBD-Kabupaten)	Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat	100	5,498,380,800.00
1.01.01.23.08	Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar (APBD-Provinsi)	Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat	100	3,665,587,200.00
1.01.01.24	Program Pendidikan Gratis Pendidikan Menengah dan Kejuruan (DIKMENJUR)			5,329,790,000.00
1.01.01.24.06	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Gratis Dikmen (APBD Kab.)	Penyelenggara Pendidikan tingkat DIKMEN	100	35,000,000.00
1.01.01.24.07	Pendidikan Gratis Pendidikan Menengah dan Kejuruan (APBD-Kabupaten)	Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat	100	3,176,874,000.00
1.01.01.24.08	Pendidikan Gratis Pendidikan Menengah dan Kejuruan (APBD-Provinsi)	Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat	100	2,117,916,000.00
1.18.00.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			391,767,500.00
1.18.00.16.02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Pemuda/Siswa tingkat menengah	100	275,792,500.00
1.18.00.16.06	Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah diklangan pemuda	Pemuda/Siswa	100	20,900,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.18.00.16.10	Peningkatan mutu siswa dibidang seni budaya dan sastra	Pemuda/Siswa	100	95,075,000.00
1.18.00.17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan hidup			33,252,500.00
1.18.00.17.03	Pelatihan Usaha Kelompok Pemuda Kreatif	Pemuda/Siswa	100	33,252,500.00
1.18.00.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga			952,999,000.00
1.18.00.20.01	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam	Pelaku olahraga	100	152,459,000.00
1.18.00.20.04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Pelaku olahraga	100	101,250,000.00
1.18.00.20.06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Pelaku olahraga	100	139,975,000.00
1.18.00.20.13	Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga	Pelaku olahraga	100	59,315,000.00
1.18.00.20.19	Pembinaan Cabang-Cabang Olahraga	Pelaku olahraga	100	500,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung				54,627,699,877.00



Urusan : 1.02 Kesehatan

SKPD : DINAS KESEHATAN

No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
02.000 - Dinas Kesehatan				20,290,562,236.00
1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,199,119,000.00
1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Dinas Kesehatan	100	57,000,000.00
1.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kesehatan	100	9,200,000.00
1.02.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Dinas Kesehatan	100	8,000,000.00
1.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi	Dinas Kesehatan	100	6,885,000.00
1.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparatur Dinas Kesehatan	100	7,000,000.00
1.02.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Dinas Kesehatan	100	1,500,000.00
1.02.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Aparatur Dinas Kesehatan	100	758,228,200.00
1.02.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Kesehatan	100	298,505,800.00
1.02.01.01.25	Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa		100	52,800,000.00
1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			983,091,000.00
1.02.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Dinas Kesehatan	100	350,000,000.00
1.02.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Kesehatan	100	9,430,000.00
1.02.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100	49,861,000.00
1.02.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Dinas Kesehatan	100	48,800,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.02.01.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Dinas Kesehatan	100	5,000,000.00
1.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Kesehatan dan Lab PKA	100	10,000,000.00
1.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Kesehatan	100	80,000,000.00
1.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Kesehatan	100	30,000,000.00
1.02.01.02.47	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		100	400,000,000.00
1.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			69,985,000.00
1.02.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Kesehatan dan	100	28,000,000.00
1.02.01.03.06	Pembinaan Kepegawaian	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100	41,985,000.00
1.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			58,250,000.00
1.02.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100	50,000,000.00
1.02.01.05.07	Bimbingan Tekhnis Penyusunan Anggaran	Puskesmas	100	8,250,000.00
1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian			63,606,900.00
1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	100	53,606,900.00
1.02.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas Kesehatan	100	10,000,000.00
1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		100	4,183,420,000.00
1.02.01.15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Puskesmas	100	15,000,000.00
1.02.01.15.07	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK)		100	4,168,420,000.00
1.02.01.16	Progrom Upaya Kesehatan Masyarakat			12,233,644,336.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.02.01.16.03	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Puskesmas beserta Jaringannya	100	550,000,000.00
1.02.01.16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	Petugas Kesehatan dan Masyarakat	100	136,204,600.00
1.02.01.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Petugas Kesehatan dan Masyarakat	100	109,000,000.00
1.02.01.16.19	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (Pajak Rokok)	Petugas Kesehatan dan Masyarakat	100	2,068,991,500.00
1.02.01.16.20	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DBH-CT)	Petugas Kesehatan dan Masyarakat	100	810,888,236.00
1.02.01.16.21	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)	Petugas Kesehatan dan Masyarakat	100	8,006,560,000.00
1.02.01.16.23	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Lanjut Usia (Pajak Rokok)	Petugas Kesehatan dan Masyarakat	100	300,000,000.00
1.02.01.16.25	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (PIK)	Petugas Kesehatan dan Masyarakat	100	252,000,000.00
1.02.01.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan			18,000,000.00
1.02.01.17.02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Pasar, Apotik, Toko Obat dan Toko	100	18,000,000.00
1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			404,008,500.00
1.02.01.19.01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Masyarakat	100	8,000,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.02.01.19.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Petugas Kesehatan/Promkes dan Masyarakat	100	121,008,500.00
1.02.01.19.07	Kampanye Bahaya Merokok	Masyarakat	100	275,000,000.00
1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			195,787,500.00
1.02.01.20.03	Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Penderita Gizi Buruk/Gizi Kurang	100	170,000,000.00
1.02.01.20.04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Masyarakat	100	16,487,500.00
1.02.01.20.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Puskesmas, Sekolah dan Masyarakat	100	9,300,000.00
1.02.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		100	15,000,000.00
1.02.01.21.01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Sarana Air Bersih Masyarakat	100	5,000,000.00
1.02.01.21.02	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	DAMIU, Kantin Sekolah	100	5,000,000.00
1.02.01.21.03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	Forum Kecamatan dan Satgas Desa	100	5,000,000.00
1.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			809,000,000.00
1.02.01.22.01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Masyarakat di Sekitar Penderita DBD	100	18,200,000.00
1.02.01.22.02	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Masyarakat Sekitar Penderita DBD	100	10,000,000.00
1.02.01.22.04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Balita dan Anak Sekolah	100	5,500,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.02.01.22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Masyarakat	100	20,000,000.00
1.02.01.22.08	Peningkatan Imunisasi	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan	100	5,000,000.00
1.02.01.22.09	Peningkatan surveillence epidemiologi dan penanggulangan wabah	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	100	15,300,000.00
1.02.01.22.10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan		100	350,000,000.00
1.02.01.22.12	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging (Pajak Rokok)		100	35,000,000.00
1.02.01.22.13	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Pajak Rokok)		100	350,000,000.00
1.02.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			57,650,000.00
1.02.01.23.01	Penyusunan standar kesehatan	Dinas Kesehatan	100	57,650,000.00
Jumlah Belanja Langsung				20,290,562,236.00
02.001 - Puskesmas Salotungo				716,338,823.00
1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			29,826,000.00
1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Puskesmas Salotungo	100	4,000,000.00
1.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Puskesmas Salotungo	100	1,900,000.00
1.02.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Puskesmas Salotungo	100	6,000,000.00
1.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Puskesmas Salotungo	100	826,000.00
1.02.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi	Puskesmas Salotungo	100	17,100,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			82,650,500.00
1.02.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Puskesmas Salotungo	100	32,834,900.00
1.02.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Puskesmas Salotungo	100	2,463,500.00
1.02.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Puskesmas Salotungo	100	38,107,900.00
1.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Puskesmas Salotungo	100	7,244,200.00
1.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Puskesmas Salotungo	100	2,000,000.00
1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian			2,051,500.00
1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Puskesmas Salotungo	100	2,051,500.00
1.02.01.16	Progrom Upaya Kesehatan Masyarakat			601,810,823.00
1.02.01.16.17	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kapitasi		100	531,892,712.00
1.02.01.16.18	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Non Kapitasi		100	69,918,111.00
02.002 - Puskesmas Sewo				441,345,861.00
1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			25,479,000.00
1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Puskesmas Sewo	100	3,000,000.00
1.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Puskesmas Sewo	100	2,200,000.00
1.02.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Puskesmas Sewo	100	6,000,000.00
1.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi	Puskesmas Sewo	100	779,000.00
1.02.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi	Puskesmas Sewo	100	13,500,000.00
1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			23,961,500.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.02.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Puskesmas Sewo	100	4,311,400.00
1.02.01.02.10	Pengadaan mebeleur		100	4,815,800.00
1.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Puskesmas Sewo	100	11,954,300.00
1.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Puskesmas Sewo	100	2,880,000.00
1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian			2,687,500.00
1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Puskesmas Sewo	100	2,687,500.00
1.02.01.16	Progam Upaya Kesehatan Masyarakat			389,217,861.00
1.02.01.16.17	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kapitasi		100	309,034,849.00
1.02.01.16.18	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Non Kapitasi		100	80,183,012.00
02.003 - Puskesmas Malaka				362,931,874.00
1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			24,992,500.00
1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Puskesmas Malaka	100	3,120,000.00
1.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Puskesmas Malaka	100	1,920,000.00
1.02.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Puskesmas Malaka	100	6,000,000.00
1.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi	Puskesmas Malaka	100	452,500.00
1.02.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi	Puskesmas Malaka	100	13,500,000.00
1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			26,448,000.00
1.02.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Puskesmas Malaka	100	1,234,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.02.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Puskesmas Malaka	100	18,060,000.00
1.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Puskesmas Malaka	100	7,154,000.00
1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian			1,687,500.00
1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan	Puskesmas Malaka	100	1,687,500.00
1.02.01.16	Progam Upaya Kesehatan Masyarakat			309,803,874.00
1.02.01.16.17	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kapitasi	Puskesmas Malaka	100	303,422,075.00
1.02.01.16.18	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi	Puskesmas Malaka	100	6,381,799.00
02.004 - Puskesmas Cabenge				441,071,708.00
1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			97,536,600.00
1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Puskesmas Cabenge	100	19,200,000.00
1.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Puskesmas Cabenge	100	3,626,000.00
1.02.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Puskesmas Cabenge	100	12,000,000.00
1.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Puskesmas Cabenge	100	1,652,500.00
1.02.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Puskesmas Cabenge	100	1,398,100.00
1.02.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi	Puskesmas Cabenge	100	59,660,000.00
1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			27,354,500.00
1.02.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		100	1,116,000.00
1.02.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Puskesmas Cabenge	100	10,718,500.00
1.02.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Puskesmas Cabenge	100	4,500,000.00
1.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Puskesmas Cabenge	100	10,000,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Puskesmas Cabenge	100	1,020,000.00
1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian			2,536,900.00
1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Puskesmas Cabenge	100	2,536,900.00
1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			313,643,708.00
1.02.01.16.17	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		100	265,780,216.00
1.02.01.16.18	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi		100	47,863,492.00
02.005 - Puskesmas Baringeng				282,342,799.00
1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			24,617,500.00
1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Puskesmas Baringeng	100	1,800,000.00
1.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Puskesmas Baringeng	100	2,570,000.00
1.02.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Puskesmas Baringeng	100	6,000,000.00
1.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Puskesmas Baringeng	100	747,500.00
1.02.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi	Puskesmas Baringeng	100	13,500,000.00
1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			24,818,000.00
1.02.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Puskesmas Baringeng	100	4,651,500.00
1.02.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Puskesmas Baringeng	100	12,039,000.00
1.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Puskesmas Baringeng	100	3,407,500.00
1.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Puskesmas Baringeng	100	4,720,000.00
1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian			2,192,500.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Puskesmas Baringeng	100	2,192,500.00
1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			230,714,799.00
1.02.01.16.17	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kapitasi		100	206,335,207.00
1.02.01.16.18	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Non Kapitasi		100	24,379,592.00
02.006 - Puskesmas Cakkuridi				152,318,182.00
1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			25,718,900.00
1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Puskesmas Cakkuridi	100	2,220,000.00
1.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Puskesmas Cakkuridi	100	3,000,000.00
1.02.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Puskesmas Cakkuridi	100	6,000,000.00
1.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi	Puskesmas Cakkuridi	100	998,900.00
1.02.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi	Puskesmas Cakkuridi	100	13,500,000.00
1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			22,221,600.00
1.02.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Puskesmas Cakkuridi	100	11,747,500.00
1.02.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Puskesmas Cakkuridi	100	5,034,100.00
1.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Puskesmas Cakkuridi	100	4,000,000.00
1.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Puskesmas Cakkuridi	100	1,440,000.00
1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian			2,187,500.00
1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Puskesmas Cakkuridi	100	2,187,500.00
1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			102,190,182.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.02.01.16.17	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kapitasi		100	91,432,559.00
1.02.01.16.18	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Non Kapitasi		100	10,757,623.00
02.007 - Puskesmas Cangadi				522,856,346.00
1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			98,087,500.00
1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Puskesmas Cangadi	100	15,000,000.00
1.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Puskesmas Cangadi	100	4,000,000.00
1.02.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Puskesmas Cangadi	100	12,000,000.00
1.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Puskesmas cangadi	100	3,737,500.00
1.02.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi	Puskesmas Cangadi	100	63,350,000.00
1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			26,103,000.00
1.02.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Puskesmas Cangadi	100	1,950,000.00
1.02.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Puskesmas cangadi	100	9,050,000.00
1.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Puskesmas Cangadi	100	11,003,000.00
			100	
1.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Puskesmas Cangadi	100	2,600,000.00
1.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Puskesmas Cangadi	100	1,500,000.00
1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian			2,637,500.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Puskesmas Cangadi	100	2,637,500.00
1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			396,028,346.00
1.02.01.16.17	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kapitasi		100	357,345,687.00
1.02.01.16.18	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Non Kapitasi		100	38,682,659.00
02.008 - Puskesmas Pacongkang				375,439,978.00
1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			82,140,500.00
1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Puskesmas Pacongkang	100	12,000,000.00
1.02.01.01.06	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan Dinas/Operasional	Puskesmas Pacongkang	100	1,710,000.00
1.02.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Puskesmas Pacongkang	100	12,000,000.00
1.02.01.01.12	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Puskesmas Pacongkang	100	1,695,500.00
1.02.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi	Puskesmas Pacongkang	100	54,735,000.00
1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			18,250,000.00
1.02.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	puskesmas pacongkang	100	5,000,000.00
1.02.01.02.10	Pengadaan mebeleur		100	3,250,000.00
1.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Puskesmas Pacongkang	100	5,000,000.00
1.02.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Puskesmas Pacongkang	100	5,000,000.00
1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian			2,437,500.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Puskesmas Pacongkang	100	2,437,500.00
1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			272,611,978.00
1.02.01.16.17	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kapitasi	Puskesmas Pacongkang	100	256,875,094.00
1.02.01.16.18	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Non Kapitasi		100	15,736,884.00
02.009 - Puskesmas Citta				300,118,304.00
1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			23,990,500.00
1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Puskesmas Citta	100	1,800,000.00
1.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Puskesmas Citta	100	1,880,000.00
1.02.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Puskesmas Citta	100	6,000,000.00
1.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Puskesmas Citta	100	810,500.00
1.02.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi	Puskesmas Citta	100	13,500,000.00
1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			23,875,000.00
1.02.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		100	887,500.00
1.02.01.02.10	Pengadaan mebeleur		100	13,267,500.00
1.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Puskesmas Citta	100	2,000,000.00
1.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Puskesmas Citta	100	3,000,000.00
1.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Puskesmas Citta	100	4,720,000.00
1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			1,762,500.00
1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan	Puskesmas Citta	100	1,762,500.00
1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			250,490,304.00



Pemerintah Kabupaten Soppeng

No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.02.01.16.17	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		100	238,192,615.00
1.02.01.16.18	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		100	12,297,689.00
02.010 - Puskesmas Takalala				710,649,454.00
1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			118,491,400.00
1.02.01.01.02	penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Puskesmas Takalala	100	20,000,000.00
1.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Puskesmas Takalala	100	2,799,400.00
1.02.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Puskesmas Takalala	100	12,000,000.00
1.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Puskesmas Takalala	100	1,967,000.00
1.02.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi	Puskesmas Takalala	100	81,725,000.00
1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			12,799,100.00
1.02.01.02.10	Pengadaan mebeliur	Puskesmas Takalala	100	4,550,000.00
1.02.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Puskesmas Takalala	100	6,248,100.00
1.02.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Puskesmas Takalala	100	2,001,000.00
1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian			1,537,500.00
1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Puskesmas Takalala	100	1,537,500.00
1.02.01.16	Progam Upaya Kesehatan Masyarakat			577,821,454.00
1.02.01.16.17	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kemitasi		100	526,598,374.00
1.02.01.16.18	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		100	51,223,080.00
02.011 - Puskesmas Tanjonge				951,789,353.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			77,890,000.00
1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Puskesmas Tanjonge	100	7,200,000.00
1.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Puskesmas Tanjonge	100	3,300,000.00
1.02.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Puskesmas Tanjonge	100	12,000,000.00
1.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Puskesmas Tanjonge	100	1,790,000.00
1.02.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi	Puskesmas Tanjonge	100	53,600,000.00
1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			22,940,000.00
1.02.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Puskesmas Tanjonge	100	6,940,000.00
1.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Puskesmas Tanjonge	100	6,000,000.00
1.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Puskemas Tanjonge	100	10,000,000.00
1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian			3,498,000.00
1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Puskesmas Tanjonge	100	3,498,000.00
1.02.01.16	Progam Upaya Kesehatan Masyarakat			847,461,353.00
1.02.01.16.17	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kapitasi		100	725,429,577.00
1.02.01.16.18	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Non Kapitasi		100	122,031,776.00
02.012 - Puskesmas GoariE				609,991,909.00
1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			28,118,000.00
1.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Puskesmas Goarie	100	4,423,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Puskesmas Goarie	100	3,125,000.00
1.02.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Puskesmas Goarie	100	6,000,000.00
1.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Puskesmas Goarie	100	1,070,000.00
1.02.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi	Puskesmas Goarie	100	13,500,000.00
1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			21,800,000.00
1.02.01.02.10	Pengadaan mebeleur			13,000,000.00
1.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			8,800,000.00
1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian			1,710,000.00
1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Puskesmas Goarie	100	1,710,000.00
1.02.01.16	Progam Upaya Kesehatan Masyarakat			558,363,909.00
1.02.01.16.17	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kapitasi		100	538,192,199.00
1.02.01.16.18	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Non Kapitasi		100	20,171,710.00
02.013 - Puskesmas Tajuncu				525,491,048.00
1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			25,411,500.00
1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Puskesmas Tajuncu	100	3,000,000.00
1.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Puskesmas Tajuncu	100	2,459,000.00
1.02.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Puskesmas Tajuncu	100	6,000,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Puskesmas Tajuncu	100	452,500.00
1.02.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi	Puskesmas Tajuncu	100	13,500,000.00
1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			23,779,000.00
1.02.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		100	1,024,000.00
1.02.01.02.10	Pengadaan mebeleur		100	13,055,000.00
1.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Puskesmas Tajuncu	100	9,700,000.00
1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian			1,637,500.00
1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Puskesmas Tajuncu	100	1,637,500.00
1.02.01.16	Progam Upaya Kesehatan Masyarakat			474,663,048.00
1.02.01.16.17	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-		100	443,591,898.00
1.02.01.16.18	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)- Non Kapitasi		100	31,071,150.00
02.014 - Puskesmas Leworeng				323,224,644.00
1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			24,180,500.00
1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Puskesmas Leworeng	100	1,560,000.00
1.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Puskesmas Leworeng	100	2,373,000.00
1.02.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Puskesmas Leworeng	100	6,000,000.00
1.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Puskesmas Leworeng	100	747,500.00
1.02.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi	Puskesmas Leworeng	100	13,500,000.00
1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			23,694,500.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.02.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		100	4,651,500.00
1.02.01.02.10	Pengadaan mebeleur		100	16,043,000.00
1.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Puskesmas Leworeng	100	3,000,000.00
1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian			1,753,000.00
1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Puskesmas leworeng	100	1,753,000.00
1.02.01.16	Progam Upaya Kesehatan Masyarakat			273,596,644.00
1.02.01.16.17	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kapitasi		100	254,283,305.00
1.02.01.16.18	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-		100	19,313,339.00
02.015 - Puskesmas Panincong				432,694,286.00
1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			24,520,500.00
1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Puskesmas Panincong	100	3,000,000.00
1.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas/ Operasional Puskesmas Panincong	100	2,250,000.00
1.02.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Puskesmas Panincong	100	6,000,000.00
1.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi	Puskesmas Panincong	100	358,000.00
1.02.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi	Puskesmas Panincong	100	12,912,500.00
1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			24,995,000.00
1.02.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Puskesmas Panincong	100	560,000.00
1.02.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Puskesmas Panincong	100	17,935,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Puskesmas Panincong	100	5,000,000.00
1.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Puskesmas Panincong	100	1,500,000.00
1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian			2,112,500.00
1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Puskesmas Panincong	100	2,112,500.00
1.02.01.16	Progam Upaya Kesehatan Masyarakat			100
1.02.01.16.17	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kapitasi		100	367,782,068.00
1.02.01.16.18	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Non Kapitasi		100	13,284,218.00
02.016 - Puskesmas Batu-Batu				620,526,461.00
1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			105,424,500.00
1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Puskesmas Batu Batu	100	24,000,000.00
1.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Puskesmas Batu Batu	100	2,950,000.00
1.02.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Puskesmas Batu Batu	100	12,000,000.00
1.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Puskesmas Batu Batu	100	2,124,500.00
1.02.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi	Puskesmas Batu Batu	100	64,350,000.00
1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			19,996,000.00
1.02.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Puskesmas Batu Batu	100	11,500,000.00
1.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Puskesmas Batu-Batu	100	5,000,000.00
1.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Puskesmas Batu Batu	100	2,496,000.00
1.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Puskesmas Batu Batu	100	1,000,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian			2,437,500.00
1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Puskesmas Batu Batu	100	2,437,500.00
1.02.01.16	Progam Upaya Kesehatan Masyarakat			492,668,461.00
1.02.01.16.17	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kapitasi		100	410,881,637.00
1.02.01.16.18	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Non Kapitasi		100	81,786,824.00
02.017 - Puskesmas Ganra				231,562,170.00
1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			26,218,500.00
1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Puskesmas Ganra	100	3,000,000.00
1.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Puskesmas Ganra	100	2,473,000.00
1.02.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Puskesmas Ganra	100	6,000,000.00
1.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Puskesmas Ganra	100	1,243,000.00
1.02.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi	Puskesmas Ganra	100	13,502,500.00
1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			21,717,000.00
1.02.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Puskesmas Ganra	100	5,399,000.00
1.02.01.02.10	Pengadaan mebeleur		100	11,878,000.00
1.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Puskesmas Ganra	100	3,000,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Puskesmas Ganra	100	1,440,000.00
1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian			2,192,500.00
1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Puskesmas Ganra	100	2,192,500.00
1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			181,434,170.00
1.02.01.16.17	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kapitasi		100	172,929,926.00
1.02.01.16.18	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Non Kapitasi		100	8,504,244.00
02.018 - Laboratorium Kesehatan Daerah				47,500,000.00
1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			14,420,000.00
1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		100	6,420,000.00
1.02.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor		100	1,000,000.00
1.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		100	1,000,000.00
1.02.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi		100	6,000,000.00
1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			31,729,100.00
1.02.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		100	4,500,000.00
1.02.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor		100	13,000,000.00
1.02.01.02.10	Pengadaan mebeleur		100	4,000,000.00
1.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		100	8,229,100.00
1.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		100	2,000,000.00
1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian			1,350,900.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		100	1,350,900.00
02.019 - Instalasi Farmasi				77,700,000.00
1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			45,200,000.00
1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		100	36,000,000.00
1.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		100	3,000,000.00
1.02.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor		100	500,000.00
1.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		100	500,000.00
1.02.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor		100	200,000.00
1.02.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi		100	5,000,000.00
1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			30,500,000.00
1.02.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor		100	15,000,000.00
1.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		100	1,500,000.00
1.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan		100	4,000,000.00
1.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		100	10,000,000.00
1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian			2,000,000.00
1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		100	2,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung				28,416,455,436.00



Urusan : 1.02 Kesehatan

SKPD : KANTOR RSUD LATEMMAMALA

No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,056,419,950.00
1.02.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	RSUD Latemmamala Soppeng	100	400,000,000.00
1.02.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas RSUD Latemmamala	100	10,585,000.00
1.02.02.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	RSUD Latemmamala	100	128,800,000.00
1.02.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	RSUD Latemmamala Soppeng	100	60,000,000.00
1.02.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pegawai RSUD Latemmamala	100	7,000,000.00
1.02.02.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	RSUD Latemmamala	100	20,000,000.00
1.02.02.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Aparati RSUD Latemmamala	100	154,034,950.00
1.02.02.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Pegawai RSUD Latemmamala	100	220,000,000.00
1.02.02.01.25	Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	RSUD Latemmamala	100	56,000,000.00
1.02.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			280,867,600.00
1.02.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan RSUD Latemmamala	100	45,000,000.00
1.02.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan RSUD Latemmamala	100	50,000,000.00
1.02.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Mebeleur RSUD Latemmamala	100	59,000,000.00
1.02.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas RSUD Latemmamala	100	50,500,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.02.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	RSUD Latemmamala	100	31,325,000.00
1.02.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Peralatan Kantor RSUD	100	40,000,000.00
1.02.02.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Mebeleur RSUD Latemmamala	100	5,042,600.00
1.02.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			20,000,000.00
1.02.02.03.06	Pembinaan Kepegawaian	Pegawai RSUD Latemmamala	100	20,000,000.00
1.02.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			401,200,000.00
1.02.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan	Pegawai RSUD Latemmamala	100	250,000,000.00
1.02.02.05.06	Peningkatan Kapasitas Satuan Pengamanan (Satpam)	SATPAM RSUD Latemmamala	100	151,200,000.00
1.02.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan			53,500,000.00
1.02.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan RSUD Latemmamala	100	20,000,000.00
1.02.02.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan Keuangan RSUD Latemmamala	100	18,000,000.00
1.02.02.06.05	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	SOP RSUD Latemmamala	100	15,500,000.00
1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			87,000,000.00
1.02.02.23.01	Penyusunan standar kesehatan	Dokumen Akreditasi RS	100	87,000,000.00
1.02.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			8,551,864,450.00
1.02.02.26.01	Pembangunan rumah sakit	Gedung RSUD Latemmamala	100	200,000,000.00
1.02.02.26.05	Pengembangan ruang gawat darurat	Alkes RSUD Latemmamala	100	5,506,704,450.00
1.02.02.26.06	Pengembangan ruang ICU, ICCU, NICU	Alkes RSUD Latemmamala	100	200,000,000.00
1.02.02.26.09	Pengembangan ruang isolasi	Alkes RSUD Latemmamala	100	2,610,160,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.02.02.26.22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	RSUD Latemmamala	100	35,000,000.00
1.02.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			182,000,000.00
1.02.02.27.01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Gedung RSUD Latemmamala	100	45,000,000.00
1.02.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Alkes/Kedokteran RSUD Latemmamala	100	42,000,000.00
1.02.02.27.18	Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah	Ambulance RSUD Latemmamala	100	95,000,000.00
1.02.02.35	Program Peningkatan Pelayanan BLUD-RSUD			25,000,000,000.00
1.02.02.35.01	Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan BLUD-RSUD	BLUD RSUD Latemmamala	100	25,000,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung				35,632,852,000.00



Urusan : 1.03 Pekerjaan Umum

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM

No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
NON URUSAN				14,092,077,739.00
1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,006,413,150.00
1.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Dinas PU	100	30,000,000.00
1.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Kendaraan dinas/operasional	100	25,643,000.00
1.03.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kantor Dinas PU	100	18,062,000.00
1.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Kantor Dinas PU	100	1,937,000.00
1.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Pegawai Dinas PU	100	15,000,000.00
1.03.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Dapur kantor	100	1,200,000.00
1.03.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Pegawai Dinas PU	100	93,000,000.00
1.03.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Dinas PU	100	377,681,150.00
1.03.01.01.25	Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan Belanja Modal	100	443,890,000.00
1.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			12,988,753,589.00
1.03.01.02.02	Pembangunan rumah dinas	Rumah Dinas Kantor Kecamatan	100	600,000,000.00
1.03.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Gedung Kantor SKPD, Kecamatan, Desa dan Kelurahan	100	10,705,242,892.00
1.03.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor Dinas PU	100	64,230,000.00
1.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/opersional	100	228,240,000.00
1.03.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	100	21,270,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.03.01.02.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	100	48,340,232.00
1.03.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.	100	700,000,000.00
1.03.01.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman, Taman, Pagar, Tempat Parkir	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas Camat Lalabata	100	621,430,465.00
1.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			50,000,000.00
1.03.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-	Pegawai Dinas PU	100	50,000,000.00
1.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan			46,911,000.00
1.03.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Renstra, Renja, RKA, DPA, Laporan Triwulan, LPPD, LKPI, dan LAKIP	100	35,480,000.00
1.03.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan	100	4,500,000.00
1.03.01.06.05	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Standar Operasional dan	100	6,931,000.00
1.03.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			7,597,639,038.00
1.03.01.15.03	Pembangunan Jalan	Jalan kabupaten	100	937,484,765.00
1.03.01.15.05	Pembangunan Jembatan	Jembatan Kabupaten	100	787,874,546.00
1.03.01.15.07	Pembangunan Jalan (PENINGKATAN JALAN)	Jalan kabupaten	100	5,872,279,727.00
1.03.01.16	Program Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong			1,586,159,404.00
1.03.01.16.03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Drainase kabupaten	100	1,586,159,404.00
1.03.01.18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			135,051,990,000.00
1.03.01.18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (PEMELIHARAAN	Jalan kabupaten	100	250,000,000.00
1.03.01.18.04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jembatan kabupaten	100	75,000,000.00
1.03.01.18.06	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Kegiatan DAK dan DAU-Pendamping Sub Bidang Infrastruktur Jalan)	Jalan kabupaten	100	134,726,990,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.03.01.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan			111,760,000.00
1.03.01.23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Alat-alat berat	100	111,760,000.00
1.03.01.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			663,260,000.00
1.03.01.27.02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Berkembangnya kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	100	663,260,000.00
1.03.01.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			11,155,850.00
1.03.01.29.05	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Investasi Jangka Menengah (RPJM) Bidang Ke Ciptakarya	Satuan Tugas RPIJM Dinas PU	100	11,155,850.00
1.03.01.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan			17,001,590,000.00
1.03.01.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Jalan lingkungan	100	15,311,500,000.00
1.03.01.30.03	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan		100	1,690,090,000.00
1.03.01.31	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan			52,020,000.00
1.03.01.31.02	Pembinaan Jasa Konstruksi		100	52,020,000.00
1.05.00.15	Program Perencanaan Tata Ruang			1,823,949,900.00
1.05.00.15.05	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan		100	1,030,450,000.00
1.05.00.15.07	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan		100	184,720,000.00
1.05.00.15.13	Survey dan pemetaan	Terlaksananya Survey dan pemetaan	100	130,559,900.00
1.05.00.15.18	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Dokumen RDTR	100	75,460,000.00
1.05.00.15.19	Koreksi Geometris dan Orthoreksi Peta RDTR	Dokumen RDTR	100	402,760,000.00
1.05.00.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			106,000,000.00
1.05.00.17.05	Pengawasan pemanfaatan ruang	Penataan bangunan	100	36,000,000.00
1.05.00.17.09	Penyusunan Peraturan Bupati Terkait Reklame	Penataan bangunan	100	35,000,000.00
1.05.00.17.10	Penyusunan Peraturan Bupati Terkait IMB dan SLF	Penataan bangunan	100	35,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung				178,097,601,931.00



Urusan : 1.03 Pekerjaan Umum

SKPD : DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
DINAS PSDA				27,625,263,638.00
1.03.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			709,309,582.00
1.03.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan & Energi	100	54,300,000.00
1.03.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan & Energi	100	4,150,000.00
1.03.02.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi	100	2,200,000.00
1.03.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan & Energi	100	2,500,000.00
1.03.02.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan & Energi	100	1,850,000.00
1.03.02.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Aparat Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan & Energi	100	15,000,000.00
1.03.02.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan & Energi	100	3,700,000.00
1.03.02.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Staf Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan & Energi	100	250,000,000.00
1.03.02.01.20	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan & Energi	100	335,904,106.00
1.03.02.01.25	Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi	Dinas Pengelolaan Sumber Daya	100	39,705,476.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.03.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			738,530,000.00
1.03.02.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Dinas PSDA, Pertambangan dan Energi Kab. Soppeng	100	211,000,000.00
1.03.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas PSDA, Pertambangan dan Energi Kab. Soppeng	100	98,000,000.00
1.03.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas PSDA, Pertambangan dan Energi	100	75,000,000.00
1.03.02.02.10	Pengadaan Mebeleur	Dinas PSDA, Pertambangan dan Energi Kab. Soppeng	100	61,500,000.00
1.03.02.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan & Energi	100	19,000,000.00
1.03.02.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional Dinas PSDA, Pertambangan dan Energi	100	243,400,000.00
1.03.02.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan & Energi	100	30,630,000.00
1.03.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			91,800,000.00
1.03.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Staf Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan & Energi	100	91,800,000.00
1.03.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			50,000,000.00
1.03.02.05.03	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	Staf Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan & Energi	100	50,000,000.00
1.03.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			16,000,000.00
1.03.02.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan & Energi	100	10,000,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.03.02.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan & Energi	100	6,000,000.00
1.03.02.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			20,902,749,510.00
1.03.02.24.10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi yang rusak	100	3,759,000,000.00
1.03.02.24.15	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun	Masyarakat Petani Pemakai Air	100	15,000,000,000.00
1.03.02.24.16	Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air	Kelompok P3A	100	260,000,000.00
1.03.02.24.19	Pembangunan Jaringan Irigasi	Petani Pemakai Air	100	858,749,510.00
1.03.02.24.22	Pengelolaan Irigasi Secara Partisipatif	Kelompok P3A/GP3A	100	875,000,000.00
1.03.02.24.23	Pengadaan Peralatan Penunjang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Masyarakat Petani Pemakai Air	100	150,000,000.00
1.03.02.28	Program Pengendalian Banjir			5,102,874,546.00
1.03.02.28.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Bantaran Sungai dan Saluran		5,102,874,546.00
2.03.00.15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan			14,000,000.00
2.03.00.15.07	Pengawasan dan Pengendalian terhadap	Pengusaha Penyalur LPG	100	7,000,000.00
2.03.00.15.09	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Bahan Galian Batuan	Pengusaha Tambang	100	7,000,000.00
05.001 - UPT Dinas PSDAPE Soppeng Utara				10,220,000.00
1.03.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3,300,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.03.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	UPTD Dinas PSDA-PE Soppeng	100	1,200,000.00
1.03.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas PSDA, Pertambangan dan Energi	100	250,000.00
1.03.02.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	UPTD PSDA-PE Soppeng Utara	100	500,000.00
1.03.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD PSDA-PE Soppeng Utara	100	500,000.00
1.03.02.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	UPTD PSDA-PE Soppeng Utara	100	450,000.00
1.03.02.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	UPTD PSDA-PE Soppeng Utara	100	400,000.00
1.03.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			6,920,000.00
1.03.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas UPTD PSDA-PE Soppeng Utara	100	6,200,000.00
1.03.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	UPTD PSDA-PE Soppeng Utara	100	720,000.00
05.002 - UPT Dinas PSDAPE Soppeng Tengah				12,920,000.00
1.03.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			6,000,000.00
1.03.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	UPTD PSDA-PE Soppeng Tengah	100	3,900,000.00
1.03.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	UPTD PSDA-PE Soppeng Tengah	100	250,000.00
1.03.02.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	UPTD PSDA-PE Soppeng Tengah	100	500,000.00
1.03.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD PSDA-PE Soppeng Tengah	100	500,000.00
1.03.02.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	UPTD PSDA-PE Soppeng Tengah	100	450,000.00
1.03.02.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	UPTD PSDA-PE Soppeng Utara	100	400,000.00
1.03.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			6,920,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.03.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas UPTD PSDA-PE Soppeng Tengah	100	6,200,000.00
1.03.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	UPTD PSDA-PE Soppeng Tengah	100	720,000.00
05.003 - UPT Dinas PSDAPE Soppeng Selatan				10,220,000.00
1.03.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3,300,000.00
1.03.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	UPTD PSDA-PE Soppeng Selatan	100	1,200,000.00
1.03.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	UPTD PSDA-PE Soppeng Selatan	100	250,000.00
1.03.02.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	UPTD PSDA-PE Soppeng Selatan	100	500,000.00
1.03.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	UPTD PSDA-PE Soppeng Selatan	100	500,000.00
1.03.02.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	UPTD PSDA-PE Soppeng Selatan	100	450,000.00
1.03.02.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	UPTD PSDA-PE Soppeng Utara	100	400,000.00
1.03.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			6,920,000.00
1.03.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas UPTD PSDA-PE Soppeng Selatan	100	6,200,000.00
1.03.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	UPTD PSDA-PE Soppeng Selatan	100	720,000.00
Jumlah Belanja Langsung				27,658,623,638.00



Urusan : 1.03 Pekerjaan Umum

SKPD : DINAS KEBERSIHAN & PERTAMANAN

No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.03.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			323,082,530.00
1.03.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor DKP Kab. Soppeng	100	20,640,000.00
1.03.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Kantor DKP Kab.Soppeng	100	35,311,130.00
1.03.03.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kantor DKP Kab.Soppeng	100	7,200,000.00
1.03.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparat Dinas Kebersihan dan Pertamanan	100	5,000,000.00
1.03.03.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kantor DKP Kab.Soppeng	100	1,600,000.00
1.03.03.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Aparatur DKP Soppeng	100	103,050,000.00
1.03.03.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kantor DKP Kab.Soppeng	100	150,281,400.00
1.03.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			889,519,900.00
1.03.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kantor DKP Kab. Soppeng	100	35,075,000.00
1.03.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Kantor DKP Kab.Soppeng	100	845,244,900.00
1.03.03.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kantor DKP Soppeng	100	9,200,000.00
1.03.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			82,770,000.00
1.03.03.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Prasarana Aparatur	100	82,770,000.00
1.03.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			35,102,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.03.03.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Aparatur DKP Soppeng	100	35,102,000.00
1.08.00.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			1,396,396,770.00
1.08.00.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Aparatur dan Masyarakat	100	276,312,770.00
1.08.00.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Pengelola persampahan	100	1,120,084,000.00
1.08.00.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			525,500,000.00
1.08.00.24.06	Pemeliharaan RTH	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dalam dan Luar Kota Watansoppeng	100	25,500,000.00
1.08.00.24.11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Lampu Jalan	Lampu Jalan Kabupaten Soppeng	100	500,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung				3,252,371,200.00



Urusan : 1.06 Perencanaan Pembangunan

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,328,300,630.00
1.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Gabungan SKPD	100	105,000,000.00
1.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kab. Soppeng	100	4,050,000.00
1.06.01.01.08	Penyediaan layanan kebersihan kantor	Kantor Gabungan SKPD	100	99,229,300.00
1.06.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Bappeda dan Kantor Gabungan SKPD	100	4,103,200.00
1.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bappeda Kab. Soppeng	100	10,500,000.00
1.06.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Bappeda Kab. Soppeng	100	1,400,000.00
1.06.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Pegawai Bappeda Kab. Soppeng	100	758,486,805.00
1.06.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Bappeda Kab. Soppeng	100	308,731,325.00
1.06.01.01.27	Pengelolaan Halaman Website	Bappeda Kab. Soppeng	100	36,800,000.00
1.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			315,890,000.00
1.06.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Diadakan	100	18,000,000.00
1.06.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengguna Ruang Pertemuan Gedung Gabungan SKPD	100	72,350,000.00
1.06.01.02.10	Pengadaan Meubeler	Jumlah Meubeler yang diadakan	100	19,250,000.00
1.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pegawai Bappeda	100	60,000,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pegawai Bappeda	100	110,000,000.00
1.06.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kantor Bappeda	100	20,000,000.00
1.06.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Bappeda	100	16,290,000.00
1.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000.00
1.06.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan	Pegawai Bappeda	100	45,000,000.00
1.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan			63,137,000.00
1.06.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	Bappeda dan stakeholders	100	31,692,000
1.06.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Bappeda, DPPKAD, dan Auditor	100	18,720,000
1.06.01.06.05	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Bappeda	100	12,725,000
1.06.01.15	Program Pengembangan Data dan Informasi			370,773,300.00
1.06.01.15.01	Pengumpulan, updating dan analisis data	Penyelenggara Pemerintah	100	33,980,000.00
1.06.01.15.02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Data Dasar Statistik	100	195,593,300.00
1.06.01.15.06	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan	Tersusunnya dokumen informasi	100	41,400,000.00
1.06.01.15.07	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri	Tersusunnya dokumen Repida	100	99,800,000.00
1.06.01.19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar			35,300,000.00
1.06.01.19.12	Koordinasi Perencanaan PN-PPSP	Tersusunnya dokumen pemutakhiran strategi sanitasi kabupaten (SSK)	100	35,300,000.00
1.06.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah			355,473,300.00
1.06.01.20.01	peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Pegawai Bappeda	100	63,000,000.00
1.06.01.20.02	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Pemangku Kepentingan Irigasi	100	42,873,300.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.06.01.20.03	Workshop Penyusunan RPJMDes	Jumlah Orang yang mengikuti workshop	100	119,600,000.00
1.06.01.20.05	Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Terselenggaranya koordinasi WISMP	100	130,000,000.00
1.06.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			1,257,608,400.00
1.06.01.21.05	Penyusunan rancangan RPJMD	Tersusunnya Dokumen RPJMD	100	361,300,000.00
1.06.01.21.08	Penyusunan rancangan RKPD	SKPD & Stakeholders Pembangunan	100	29,755,000.00
1.06.01.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Stakeholders Pembangunan	100	244,050,000.00
1.06.01.21.11	Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Stakeholders Pembangunan	100	50,895,000.00
1.06.01.21.12	Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Stakeholedrs Pembangunan	100	77,355,000.00
1.06.01.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Stakeholders Pembangunan	100	37,515,000.00
1.06.01.21.14	Penyusunan KUA dan PPAS	SKPD	100	41,838,400.00
1.06.01.21.18	Penyusunan Naskah Akademik Rancangan RPJMD	Tersusunnya Naskah Akademik RPJMD		92,200,000.00
1.06.01.21.19	Sosialisasi Regulasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Peserta sosialisasi		121,100,000.00
1.06.01.21.21	Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya Renstra SKPD sesuai dengan Target RPJMD Kab. Soppeng		87,725,000.00
1.06.01.21.22	Penyusunan Indikator Kinerja Utama	Tersusunnya IKU	100	113,875,000.00
1.06.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			109,725,000.00
1.06.01.22.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Stakeholders Pembangunan Bidang Ekonomi	100	24,550,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.06.01.22.12	Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	Terselenggaranya penanggulangan kemiskinan	100	85,175,000.00
1.06.01.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya			145,760,000.00
1.06.01.23.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Terselenggaranya koordinasi di bidang sosial budaya	100	24,550,000.00
1.06.01.23.05	Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Rensposif Gender dan Pro Anak	Terselenggaranya Fasilitasi PPRG	100	61,040,000.00
1.06.01.23.06	Koordinasi Pembinaan Kabupaten Sehat	Terkoordinasi Program Kabupaten Sehat	100	60,170,000.00
1.06.01.24				24,550,000.00
1.06.01.24.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Tersusunnya Database bidang fisik dan prasarana	100	24,550,000.00
Jumlah Belanja Langsung				4,051,517,630.00



Urusan : 1.07 Perhubungan

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
	URUSAN WAJIB			1,541,424,690.00
1.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			773,581,490.00
1.07.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Dinas Perhubungan Kominfo	100	78,000,000.00
1.07.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan dan Kominfo	100	5,000,000.00
1.07.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Dinas Perhubungan dan Kominfo	100	17,000,000.00
1.07.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perhubungan Kominfo	100	2,500,000.00
1.07.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perhubungan Kominfo	100	15,000,000.00
1.07.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Dinas Perhubungan	100	3,000,000.00
1.07.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Aparat Dinas Perhubungan dan Kominfo	100	253,881,490.00
1.07.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Perhubungan dan Kominfo	100	390,400,000.00
1.07.01.01.25	Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Dinas Perhubungan dan Kominfo	100	8,800,000.00
1.07.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			657,843,200.00
1.07.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Dishub Kominfo	100	298,000,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.07.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Perhubungan Kominfo	100	32,500,000.00
1.07.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dishubkominfo	100	54,943,200.00
1.07.01.02.10	Pengadaan mebeleur	dishubkominfo	100	26,000,000.00
1.07.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Perhubungan dan Kominfo	100	15,000,000.00
1.07.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan dan Kominfo	100	203,000,000.00
1.07.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Perhubungan dan Kominfo	100	18,400,000.00
1.07.01.02.46	Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi	Dinas Perhubungan dan Kominfo	100	10,000,000.00
1.07.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			50,000,000.00
1.07.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Aparatur dishubkominfo	100	50,000,000.00
1.07.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			60,000,000.00
1.07.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Perhubungan dan Kominfo	100	35,000,000.00
1.07.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		100	25,000,000.00
	PERHUBUNGAN			429,130,000.00
1.07.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			125,000,000.00
1.07.01.16.02	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Kantor UPTD PKB	100	10,000,000.00
1.07.01.16.04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal	Pengguna jalan	100	30,000,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.07.01.16.05	Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu	Pengguna jalan	100	85,000,000.00
1.07.01.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			109,850,000.00
1.07.01.17.01	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi	Pengendara mobil	100	10,850,000.00
1.07.01.17.02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Pengendara mobil penumpang/barang	100	60,000,000.00
1.07.01.17.04	Uji Kelayakan Sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Mobil angkutan wajib uji/keur	100	36,000,000.00
1.07.01.17.15	Pemilihan dan Pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Sopir Angkutan Umum	100	3,000,000.00
1.07.01.19	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas			188,280,000.00
1.07.01.19.05	Pengadaan fasilitas keselamatan	pemakai jalan	100	188,280,000.00
1.07.01.20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor			6,000,000.00
1.07.01.20.04	Monitoring dan Pengawasan Bengkel Kendaraan Bermotor	terwujudnya bengkel kendaraan bermotor	100	6,000,000.00
KOMUNIKASI DAN INFORMATIUKA				231,563,400.00
1.25.00.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			177,063,400.00
1.25.00.15.02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	infromasi pembangunan	100	18,000,000.00
1.25.00.15.03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	bakohumasan dan pers	100	8,000,000.00
1.25.00.15.06	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	pengusaha TV kabel dan	100	7,000,000.00
1.25.00.15.08	Pembinaan dan pengembangan kelompok informasi masyarakat	Masyarakat	100	14,000,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.25.00.15.09	Kerjasama pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	murid, siswa, dan masyarakat umum	100	31,000,000.00
1.25.00.15.11	Penyediaan Layanan Media Centre	Dishubkominfo	100	99,063,400.00
1.25.00.17	Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi			11,000,000.00
1.25.00.17.01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Tenaga kehumasan	100	11,000,000.00
1.25.00.18	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media			43,500,000.00
1.25.00.18.01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	masyarakat Umum	100	18,000,000.00
1.25.00.18.02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	dokumentasi kegiatan pemerintah	100	20,000,000.00
1.25.00.18.03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	masyarakat se-Kabupaten Soppeng	100	5,500,000.00
Jumlah Belanja Langsung				2,202,118,090.00



Urusan : 1.08 Lingkungan Hidup

SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.08.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			468,694,950.00
1.08.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor LH dan TPST Pasar Sentral	100	75,000,000.00
1.08.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas/Operasioal Kantor Lingkungan Hidup	100	3,000,000.00
1.08.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor		100	7,500,000.00
1.08.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Gedung Laboratorium dan Ktr LH	100	1,500,000.00
1.08.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparatur Kantor Lingkungan Hidup	100	10,000,000.00
1.08.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kantor Lingkungan Hidup	100	2,500,000.00
1.08.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Aparatur Kantor Lingkungan Hidup	100	200,000,000.00
1.08.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Aparat Kantor Lingkungan Hidup	100	169,194,950.00
1.08.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			222,586,450.00
1.08.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kantor Lingkungan Hidup	100	60,000,000.00
1.08.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kantor Lingkungan Hidup	100	9,800,000.00
1.08.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor Lingkungan Hidup	100	52,241,450.00
1.08.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Kantor Lingkungan Hidup	100	41,375,000.00
1.08.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Laboratorium Lingkungan Hidup	100	6,700,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.08.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Ligmungan Hidup	100	42,000,000.00
1.08.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	100	10,470,000.00
1.08.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			20,893,600.00
1.08.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Aparatur Kantor Lingkungan Hidup	100	20,893,600.00
1.08.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			47,000,000.00
1.08.01.05.03	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur Kantor Lingkungan Hidup	100	47,000,000.00
1.08.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja			43,000,000.00
1.08.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Aparatur Kantor Lingkungan Hidup	100	20,000,000.00
1.08.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Aparatur Kantor Lingkungan Hidup	100	23,000,000.00
1.08.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			331,545,000.00
1.08.01.16.01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Masyarakat Kecamatan Lalabata	100	112,625,000.00
1.08.01.16.07	Pengkajian dampak lingkungan	Masyarakat Kecamatan Lalabata	100	75,000,000.00
1.08.01.16.08	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat di sekitar lokasi pertambangan, Industri Kecil,	100	16,900,000.00
1.08.01.16.11	Pengembangan produksi ramah lingkungan	Masyarakat Kecamatan Lalabata	100	52,020,000.00
1.08.01.16.12	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Aparat Kantor Lingkungan Hidup dan Masyarakat	100	75,000,000.00
1.08.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			1,023,890,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.08.01.17.01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber	Masyarakat sekitar sungai Marioriwawo, sungai Batu-Batu,	100	58,235,000.00
1.08.01.17.05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Masyarakat Desa Gattareng	100	25,000,000.00
1.08.01.17.07	Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber Air (DAK dan Pend. DAK)	Terlaksananya Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	100	940,655,000.00
Jumlah Belanja Langsung				2,157,610,000.00



Urusan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN, CAPIL DAN NAKERTRANS

No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			449,446,000.00
1.10.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Dinas Kependudukan, Capil,	100	72,126,000.00
1.10.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Kependudukan, Capil, Nakertrans	100	2,650,000.00
1.10.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Dinas Kependudukan, Capil,	100	4,830,000.00
1.10.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Kependudukan, Capil, Nakertrans	100	2,000,000.00
1.10.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dinas Kependudukan, Capil,	100	5,308,000.00
1.10.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Kependudukan, Capil, Nakertrans	100	7,200,000.00
1.10.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dinas Kependuduk, Capil, Nakertrans	100	191,000,000.00
1.10.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Kependudukan, Capil,	100	164,332,000.00
1.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			483,037,000.00
1.10.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Dinas Kependudukan, Capil,	100	112,367,000.00
1.10.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Kependudukan, Capil,	100	43,550,000.00
1.10.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Dinas Kependudukan, Capil,	100	74,220,000.00
1.10.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Kependudukan, Capil,	100	8,000,000.00
1.10.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Dinas Kependudukan, Capil,	100	25,000,000.00
1.10.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Kependudukan, Capil, Nakertrans	100	7,900,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.10.01.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman, Taman, Pagar, Tempat Parkir	Dinas Kependudukan, Capil, Nakertrans	100	212,000,000.00
1.10.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			10,250,000.00
1.10.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Kependudukan, Capil, Nakertrans	100	10,250,000.00
1.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			18,000,000.00
1.10.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas Kependudukan, Capil, Nakertrans	100	18,000,000.00
1.10.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan			26,730,500.00
1.10.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Kependudukan, Capil, Nakertrans	100	18,730,500.00
1.10.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas Kependuduka, Capil,	100	8,000,000.00
1.10.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			503,311,026.00
1.10.01.15.06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Dinas Kependudukan, Capil, Nakertrans	100	55,113,400.00
1.10.01.15.08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran	100	70,040,600.00
1.10.01.15.09	Pengembangan data base kependudukan	Masyarakat yang belum memiliki KK	100	176,868,900.00
1.10.01.15.14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Penduduk Kabupaten Soppeng Yang Wajib KTP	100	49,414,626.00
1.10.01.15.16	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan pada Pelayanan E-KTP	Penduduk Kabupaten Soppeng Yang Wajib KTP	100	130,000,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.10.01.15.17	Sosialisasi Berbagai Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kependudukan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaporan kependudukan	100	21,873,500.00
1.14.00.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		100	315,000,000.00
1.14.00.15.01	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Pencari Kerja	100	50,000,000.00
1.14.00.15.06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Pencari Kerja	100	265,000,000.00
1.14.00.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			870,000,000.00
1.14.00.16.01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja		100	40,214,500.00
1.14.00.16.08	Penyelenggaraan Padat Karya Infrastruktur	Penganggur dan setengah menganggur	100	120,000,000.00
1.14.00.16.09	Penyelenggaraan Padat Karya Produktif	Penganggur dan setengah menganggur	100	709,785,500.00
1.14.00.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			142,625,474.00
1.14.00.17.02	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian	Terlaksananya Sosialisasi berbagai	100	47,509,700.00
1.14.00.17.03	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan iaminan sosial	Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (Tenaga Keria Sektor Informal)	100	22,267,074.00
1.14.00.17.04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Terlaksananya Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	100	19,848,700.00
1.14.00.17.08	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Terwujudnya monitoring evaluasi dan pelaporan	100	53,000,000.00
2.08.00.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi			150,000,000.00
2.08.00.15.03	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	Terlaksananya perencanaan dan pembinaan pengembangan kelembagaan transmigrasi	100	150,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung				2,968,400,000.00



Urusan : 1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			566,856,890.00
1.11.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	100	15,600,000.00
1.11.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional BPPKB	100	10,100,000.00
1.11.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	100	9,000,000.00
1.11.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Administrasi kebutuhan penerangan kantor	100	1,532,500.00
1.11.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	100	7,000,000.00
1.11.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Staf Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	100	8,000,000.00
1.11.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Staf Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	100	1,800,000.00
1.11.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Aparat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	100	281,089,640.00
1.11.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Aparat Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	100	207,734,750.00
1.11.01.01.25	Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan Pengadaan barang dan jasa	100	25,000,000.00
1.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			129,500,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.11.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	100	9,000,000.00
1.11.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	100	5,500,000.00
1.11.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas/Operasional Badan Pemberdayaan Perempuan	100	110,000,000.00
1.11.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kantor dan rumah tangga	100	5,000,000.00
1.11.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			9,500,000.00
1.11.01.03.06	Pembinaan Kepegawaian	Pejabat Fungsional PKB	100	9,500,000.00
1.11.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			20,000,000.00
1.11.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Staf Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	100	20,000,000.00
1.11.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja			28,700,000.00
1.11.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja	100	20,700,000.00
1.11.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir	Laporan Keuangan Akhir Tahun	100	8,000,000.00
1.11.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			50,000,000.00
1.11.01.16.02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Tokoh-Tokoh Masyarakat	100	25,000,000.00
1.11.01.16.06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Siswa-siswi SMA/MA/SMK dan SMP	100	25,000,000.00
1.11.01.17	Peningkatan Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan			30,000,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.11.01.17.08	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Penanganan Kasus KDRT	100	30,000,000.00
1.11.01.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan			40,000,000.00
1.11.01.18.02	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan		100	40,000,000.00
1.12.00.15	Program Keluarga Berencana			796,098,250.00
1.12.00.15.01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Keluarga Pra Sejahtera dan KS I	100	65,928,250.00
1.12.00.15.02	Pelayanan KIE	Pokja PWI	100	22,000,000.00
1.12.00.15.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana KB (DAK)	Pengolahan Data dan Informasi serta Akseptor KB	100	708,170,000.00
1.12.00.17	Program Pelayanan Kontrasepsi			57,000,000.00
1.12.00.17.01	Pelayanan konseling KB	PUS Tidak Ingin Anak Lagi dan Ingin Anak Tunda	100	30,000,000.00
1.12.00.17.02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Seluruh Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin menggunakan alat	100	27,000,000.00
1.12.00.18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri			163,914,860.00
1.12.00.18.01	Fasilitasi Pembentukan kelompok masyarakat Peduli KB	Pos Pembantu KB Desa (PPKBD)	100	53,000,000.00
1.12.00.18.02	Pengolahan Data dan Informasi Program KB	Pengolahan Data Pengendalian Lapangan dan dan klinik	100	50,914,860.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.12.00.18.03	Koordinasi Pengelolaan Program	Terlaksananya Rapat Kerja Daerah Program KB	100	25,000,000.00
1.12.00.18.04	Penyusunan Profil Pendataan Keluarga	Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	100	35,000,000.00
1.12.00.19	Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat			25,000,000.00
1.12.00.19.01	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Petugas KB dan Tokoh-Tokoh Masyarakat	100	25,000,000.00
1.12.00.20	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR			25,000,000.00
1.12.00.20.02	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Kelompok PIK Remaja	100	25,000,000.00
1.12.00.24	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD			25,000,000.00
1.12.00.24.01	Sosialisasi pengembangan model operasional BKB, Posyandu-PAUD	Kelompok BKB yang Terintegrasi	100	25,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung				1,966,570,000.00



Urusan : 1.13 Sosial

SKPD : DINAS SOSIAL

No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.13.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			727,872,040.00
1.13.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Dinas Sosial	100	36,000,000.00
1.13.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	kendaraan Dinas Sosial	100	13,250,000.00
1.13.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kantor Dinas Sosial dan TMP	100	16,474,000.00
1.13.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Dinas Sosial	100	1,140,000.00
1.13.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dinas Sosial	100	4,263,000.00
1.13.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparat Dinas Sosial	100	7,000,000.00
1.13.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Pengisian logistik kantor	100	2,400,000.00
1.13.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Pejabat Esalon II, III dan IV/ Staf	100	343,775,040.00
1.13.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi kantor	100	303,570,000.00
1.13.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			543,789,000.00
1.13.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Dinas Sosial	100	100,000,000.00
1.13.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Sosial	100	43,885,000.00
1.13.01.02.10	Pengadaan Mebeuler		100	35,000,000.00
1.13.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung dinas sosial	100	150,000,000.00
1.13.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan roda empat dan dua	100	209,904,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.13.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung dinas sosial	100	5,000,000.00
1.13.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			11,250,000.00
1.13.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		100	11,232,000.00
1.13.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			20,000,000.00
1.13.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-	Aparat Dinas Sosial	100	20,000,000.00
1.13.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			13,300,000.00
1.13.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	Dinas Sosial	100	13,300,000.00
1.13.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			199,896,000.00
1.13.01.15.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Bagi Fakir Miskin	Rumah Tidak layak huni	100	199,896,000.00
1.13.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			483,346,884.00
1.13.01.16.01	Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	Lansia	100	42,509,120.00
1.13.01.16.02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Lansia	100	150,000,000.00
1.13.01.16.07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	PMKS	100	245,907,764.00
1.13.01.16.10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan menjadi luar biasa	Tertanganinya masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan menjadi luar biasa	100	44,930,000.00
1.13.01.18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma			90,720,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.13.01.18.04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Eks kusta / Penyandang cacat	100	90,720,000.00
1.13.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial			250,815,840.00
1.13.01.21.01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Murid Panti Asuhan dan Panti cacat	100	16,616,400.00
1.13.01.21.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Murid Panti Asuhan dan Panti cacat	100	199,896,000.00
1.13.01.21.04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	TMP, Tamam Bahagia, Jera CadiiE dan keluarga Vetran	100	34,303,440.00
Jumlah Belanja Langsung				2,340,989,764.00



Urusan : 1.14 Sosial dan Perumahan

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. SOPPENG

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.13.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			631,120,000.00
1.13.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya kinerja aparatur lingkup BPBD	100	35,000,000.00
1.13.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya pelayanan armada pemadaman kebakaran	100	25,000,000.00
1.13.02.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Terjaganya kebersihan kantor	100	15,000,000.00
1.13.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan dan jaringan listrik kantor	100	7,040,000.00
1.13.02.01.14	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	100	20,000,000.00
1.13.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya informasi dan pengetahuan aparat	100	10,000,000.00
1.13.02.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Pengisian Ulang Tabung Gas	100	4,080,000.00
1.13.02.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Terwujudnya sinergitas BPBD Kab. Soppeng dengan stakeholders penanggulangan bencana lainnya	100	240,000,000.00
1.13.02.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya kelancaran tugas perkantoran	100	275,000,000.00
1.13.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			544,600,000.00
1.13.02.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	100	100,000,000.00
1.13.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	100	26,600,000.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.13.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	100	100,000,000.00
1.13.02.02.10	Pengadaan Mobiler	Tersedianya mobiler gedung kantor	100	50,000,000.00
1.13.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100	10,000,000.00
1.13.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	100	250,000,000.00
1.13.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan	Terpeliharanya peralatan gedung	100	8,000,000.00
1.13.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			50,000,000.00
1.13.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan	Pegawai BPBD Kab. Soppeng	100	50,000,000.00
1.13.02.05.04	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Pegawai BPBD Kab. Soppeng	100	
1.13.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			40,000,000.00
1.13.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya bahan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	100	20,000,000.00
1.13.02.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir	Tersedianya laporan keuangan yang	100	20,000,000.00
1.04.00.19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran			1,704,560,000.00
1.04.00.19.07	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Tersosialisasinya cara mencegah kebakaran di masyarakat	100	20,000,000.00
1.04.00.19.08	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Tersedianya alat penanggulangan bencana kebakaran	100	50,000,000.00
1.04.00.19.11	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Tersedianya staf yang tanggap/terkendali terhadap penanganan bahaya kebakaran	100	850,000,000.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.04.00.19.16	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran (DAK)	Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran (DAK)	100	784,560,000.00
1.13.02.22	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan			320,000,000.00
1.13.02.22.02	Penyiapan Peta Rawan Bencana	Tersedianya peta Wilayah rawan bencana	100	200,000,000.00
1.13.02.22.04	Penyusunan Rencana Penanggulangan bencana dan rencana Kontijensi	Tersedianya data rencana penanggulangan bencana dan	100	100,000,000.00
1.13.02.22.06	Kegiatan pemantauan dan penyebarluasan	Meningkatnya pengetahuan	100	20,000,000.00
1.13.02.23	Program Tanggap Darurat dan Logistik			265,000,000.00
1.13.02.23.01	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	Terpenuhinya kebutuhan korban bencana	100	15,000,000.00
1.13.02.23.02	Penyediaan Peralatan dan Logistik Bencana	Tersedianya alat dan logistik korban bencana	100	100,000,000.00
1.13.02.23.04	Penanganan Korban Bencana	Tertanganinya korban dengan cepat	100	100,000,000.00
1.13.02.23.06	Kegiatan Penanganan Darurat Bencana	Tersosialisasinya cara penanganan	100	50,000,000.00
1.13.02.24	Program Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca Bencana			145,000,000.00
1.13.02.24.01	Pendataan dan Pelaporan Kerusakan Akibat Bencana	Tersedianya laporan kerusakan bencana	100	20,000,000.00
1.13.02.24.04	Bintek kajian kebutuhan pasca bencana	Tersedianya data kebutuhan pasca bencana	100	75,000,000.00
1.13.02.24.05	Penyusunan Dokumen kajian pasca bencana	Tersedianya dokumen kajian pasca bencana	100	50,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung				3,700,280,000.00



Urusan : 1.15 Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
SKPD : DINAS KOPERINDAG

No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.15.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			867,881,000.00
1.15.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Aparatur Dinas Koperindag Kabupaten Soppeng	100	38,411,000.00
1.15.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Aparatur Dinas Koperindag Kabupaten Soppeng	100	10,600,000.00
1.15.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Aparatur Dinas Koperindag Kabupaten Soppeng	100	9,600,000.00
1.15.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Aparatur Dinas Koperindag	100	1,000,000.00
1.15.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparatur Dinas Koperindag Kabupaten Soppeng	100	7,000,000.00
1.15.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Aparatur Dinas Koperindag Kabupaten Soppeng	100	2,040,000.00
1.15.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Aparatur Dinas Koperindag Kabupaten Soppeng	100	581,480,000.00
1.15.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Aparatur Dinas Koperindag Kabupaten Soppeng	100	217,750,000.00
1.15.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			297,143,000.00
1.15.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Aparatur Dinas Koperindag	100	64,000,000.00
1.15.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Aparatur Dinas KOperindag	100	15,000,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.15.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Aparatur Dinas Koperindag	100	39,000,000.00
1.15.01.02.10	Pengadaan Meubeleur	Aparatur Dinas Koperindag Kabupaten	100	48,650,000.00
1.15.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Aparatur Dinas Koperindag Kabupaten Soppeng	100	7,235,000.00
1.15.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Kendaraan Dinas Aparatur Dinas	100	117,258,000.00
1.15.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor Aparatur Dinas Koperindag	100	6,000,000.00
1.15.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			62,850,000.00
1.15.01.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta	Aparatur Dinas Koperindag	100	62,850,000.00
1.15.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			41,000,000.00
1.15.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan	Aparatur Dinas Koperindag	100	41,000,000.00
1.15.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			23,000,000.00
1.15.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan	Aparatur Dinas Koperindag	100	16,000,000.00
1.15.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Aparatur Dinas Koperindag Kab. Soppeng	100	7,000,000.00
1.15.01.15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif			50,000,000.00
1.15.01.15.12	Pelatihan Teknologi Pengemasan Bagi Pelaku UMKM	Para Pelaku UMKM/Wirausaha	100	25,000,000.00
1.15.01.15.13	Pelatihan Teknologi Peningkatan Mutu Produk UMKM	Para Pelaku UMKM/Wirausaha	100	25,000,000.00
1.15.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil			74,406,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.15.01.16.03	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha	Para Pelaku UMKM/Wirausaha	100	9,629,000.00
1.15.01.16.05	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Para pelaku UKM/Pengusaha khusus usaha kerajinan daerah	100	4,130,000.00
1.15.01.16.06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Para pelaku UMKM dan pengusaha	100	24,300,000.00
7 1.15.01.16.06	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	Para pelaku UMKM dan pengusaha	100	36,347,000.00
1.15.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			71,886,000.00
1.15.01.17.08	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri menengah	Para pelaku Usaha Dodol Pangi	100	37,563,000.00
1.15.01.17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Para pelaku UMKM dan Pengusaha	100	34,323,000.00
1.15.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			17,081,000.00
1.15.01.18.05	Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	KSP/USP di Kabupaten Soppeng	100	7,829,000.00
1.15.01.18.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pengurus, Pengawas dan anggota koperasi/USP	100	9,252,000.00
2.06.00.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			75,550,000.00
2.06.00.15.02	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Masyarakat konsumen	100	30,000,000.00
2.06.00.15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Pengusaha penyedia barang dan jasa	100	30,000,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)	
1	2	3	4	5	
2.06.00.15.04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Pemilik/Pengguna alat UTTP dan BDKT di Kabupaten Soppeng	100	15,550,000.00	
2.06.00.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			1,307,310,000.00	
2.06.00.18.02	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Pelaku usaha perdagangan dan jasa	100	23,150,000.00	
2.06.00.18.03	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	MAsyarakat konsumen dan pedagang	100	27,125,000.00	
2.06.00.18.05	Pengembangan pasar lelang daerah	Pelaku usaha di Kabupaten Soppeng	100	12,025,000.00	
8	2.06.00.18.08	Pengembangan Pasar Tradisional Modern (DAK)	Pelaku usaha di Kabupaten Soppeng	100	1,245,010,000.00
2.07.00.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			130,103,000.00	
2.07.00.16.08	Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit	Masyarakat kurang mampu	100	23,558,000.00	
2.07.00.16.15	Pelatihan Teknologi Proses Pembuatan	Masyarakat kurang mampu	100	41,230,000.00	
2.07.00.16.18	Pelatihan Teknologi Proses Pembuatan	Masyarakat kurang mampu	100	38,115,000.00	
2.07.00.16.19	Pelatihan Industri Keripik Pisang	Masyarakat kurang mampu	100	27,200,000.00	
2.07.00.17	Program Penibgkatan Kemampuan Teknologi Industri			164,000,000.00	
2.07.00.17.02	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Masyarakat kurang mampu	100	164,000,000.00	
Jumlah Belanja Langsung				3,182,210,000.00	



Urusan : 1.17 Kebudayaan dan Pariwisata

SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.17.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,328,150,000.00
1.17.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Soppeng dan Obyek Wisata	100	78,400,000.00
1.17.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua	100	3,500,000.00
1.17.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	PNS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100	71,750,000.00
1.17.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100	28,800,000.00
1.17.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat Listrik pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100	2,500,000.00
1.17.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Soppeng	100	6,000,000.00
1.17.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Logistik Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Soppeng	100	1,800,000.00
1.17.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	PNS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Soppeng	100	250,000,000.00
1.17.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Persediaan ATK, Materai, Makanan dan Minuman barang cetakan dan penggandaan, serta jasa tenaga non PNS	100	885,400,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.17.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			224,655,000.00
1.17.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100	78,975,000.00
1.17.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua	100	138,000,000.00
1.17.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Inventaris Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100	7,680,000.00
1.17.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			15,000,000.00
1.17.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan	PNS Dinas Kebudayaan dan	100	15,000,000.00
1.17.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			8,207,000.00
1.17.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	PNS Dinas Kebudayaan dan	100	5,760,000.00
1.17.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100	2,447,000.00
1.17.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			210,000,000.00
1.17.01.15.01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Masyarakat, Kelompok	100	210,000,000.00
1.17.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			123,522,000.00
1.17.01.16.05	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian	Situs BCB	100	123,522,000.00
1.17.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			317,000,000.00
1.17.01.17.01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Masyarakat, Kelompok	100	302,000,000.00
1.17.01.17.03	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Masyarakat, Kelompok Kesenian Perempuan dan Anak.	100	15,000,000.00
2.04.00.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			161,900,000.00
2.04.00.15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di	Pelaku dan Pengguna Jasa	100	61,000,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
2.04.00.15.08	Pelatihan pemandu wisata terpadu	Pelaku dan Pengguna Jasa Keperiwisataan	100	100,900,000.00
2.04.00.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			308,866,000.00
2.04.00.16.01	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Kawasan Objek Wisata Alam	100	195,296,000.00
2.04.00.16.05	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata	Kawasan Wisata Alam dan Sektor Kepariwisataan	100	113,570,000.00
Jumlah Belanja Langsung				2,697,300,000.00



Urusan : 1.19 Kesbang dan Politik Dalam Negeri

SKPD : BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS

No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.19.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			328,085,000.00
1.19.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Lingkup Badan Kesbang ,Politik dan Linmas Kabupaten Soppeng	100	21,000,000.00
1.19.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional/ STNK Lingkup Badan Kesbang,Politik	100	1,850,000.00
1.19.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Lingkup SKPD Badan Kesbang,Politik dan Linmas Kab. Soppeng	100	14,400,000.00
1.19.01.01.12	Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD Baadan Kesbang,Politik dan Linmas Kab. Soppeng	100	1,000,000.00
1.19.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundaang-undangan	SKPD Badan Kesbang,Politik dan Linmas Kab. Soppeng	100	5,000,000.00
1.19.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Lingkup SKPD Badan Kesbang,Politik dan Linmas Kab. Soppeng	100	1,200,000.00
1.19.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Lingkup SKPD Badan Kesbang,Politik dan Linmas Kab. Soppeng	100	107,715,000.00
1.19.01.01.20	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lingkup SKPD Badan Kesbang,Politik dan Linmas Kab. Soppeng	100	175,920,000.00
1.19.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			71,550,000.00
1.19.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD Lingkup Badan Kesbang,Politik dan Linmas Kabupaten Soppeng	100	3,750,000.00
1.19.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD Lingkup Badan Kesbang,Politik dan Linmas Kabupaten Soppeng	100	63,000,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.19.01.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD Lingkup Badan Kesbang,Politik dan Linmas Kab. Soppeng	100	4,800,000.00
1.19.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			30,000,000.00
1.19.01.05.03	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-	SKPD Badan Kesbang,Politik dan	100	30,000,000.00
1.19.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			95,600,000.00
1.19.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD Lingkup Badan Kesbang,Politik dan Linmas Kab. Soppeng	100	41,900,000.00
1.19.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	SKPD Lingkup Badan Kesbang,Politik dan Linmas Kab. Soppeng	100	27,000,000.00
1.19.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD Lingkup Badan Kesbang,Politik dan Linmas Kab. Soppeng	100	26,700,000.00
1.19.01.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			210,445,000.00
1.19.01.15.01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	70 Desa/Kelurahan dan 8 Kecamatan di Kab. Soppeng	100	80,570,000.00
1.19.01.15.07	Peningkatan Efektifitas Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Daerah	Aparat Keamanan dan Pemerintah pada 8 Kecamatan di Kabupaten Soppeng	100	129,875,000.00
1.19.01.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal			183,000,000.00
1.19.01.16.04	Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskam Swakarsa di Daerah	Terselenggaranya Rapat Forum Komunitas Inteligen Daerah dan Pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kab. Soppeng	100	183,000,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.19.01.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			45,450,000.00
1.19.01.17.02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Tokoh Suku,Etnis,Ras dan Masyarakat	100	45,450,000.00
1.19.01.18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			88,895,000.00
1.19.01.18.01	Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Tokoh Agama, Masyarakat	100	49,850,000.00
1.19.01.18.02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan		100	39,045,000.00
1.19.01.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat			113,855,000.00
1.19.01.21.01	Penyuluhan Kepada Masyarakat	Pendidik,Ormas/Lsm,tokoh agama,pemuda,pelajar,anggota parpol,unsur terkait lainnya	100	36,590,000.00
1.19.01.21.03	koordinasi forum-forum diskusi politik	PARPOL YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPR	100	56,115,000.00
1.19.01.21.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	ORMAS,LSM,LNL di Kabupaten Soppeng	100	21,150,000.00
Jumlah Belanja Langsung				1,166,880,000.00



Urusan : 1.19 Kesbang dan Politik Dalam Negeri

SKPD : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.19.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			891,580,880.00
1.19.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Pol. PP	100	21,000,000.00
1.19.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Operasional Pol. PP	100	7,170,000.00
1.19.02.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Aparatur Sat. Pol. PP	100	2,000,000.00
1.19.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Aparatur Sat. Pol. PP	100	2,000,000.00
1.19.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparat Pol. PP	100	8,000,000.00
1.19.02.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kantor Pol. PP	100	1,620,000.00
1.19.02.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Aparat Pol. PP	100	105,400,000.00
1.19.02.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kantor. Pol. PP	100	744,390,880.00
1.19.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			148,256,000.00
1.19.02.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Aparat Pol. PP	100	34,000,000.00
1.19.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Aparat Pol. PP	100	108,556,000.00
1.19.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kantor Pol. PP	100	5,700,000.00
1.19.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			33,000,000.00
1.19.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan KApasitas SDM Aparat Pol. PP	100	33,000,000.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.19.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			28,200,000.00
1.19.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kantor Pol. PP	100	28,200,000.00
1.19.02.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			1,204,800,000.00
1.19.02.15.01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Aparat Pol. PP	100	777,600,000.00
1.19.02.15.05	Pengendalian keamanan lingkungan	Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	100	427,200,000.00
1.19.02.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal			198,000,000.00
1.19.02.16.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Aparat Pol. PP	100	198,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung				2,503,836,880.00



Urusan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KAB. SOPPENG

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
19.001 - Bagian Administrasi Pemerintahan Umum				2,151,840,000.00
1.09.00.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			1,777,850,580.00
1.09.00.16.01	Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan	Tanah aset Pemda Kab	100	1,722,559,450.00
1.09.00.16.03	Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah	Tanah masyarakat	100	55,291,130.00
1.09.00.17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			121,529,600.00
1.09.00.17.01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Aset Pemerintah Daerah	100	59,621,550.00
1.09.00.17.02	Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah		100	61,908,050.00
1.19.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan			96,125,120.00
1.19.02.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD	Aset Pemerintah Daerah	100	96,125,120.00
1.20.03.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			62,615,150.00
1.20.03.27.06	Koodinasi dan Monitoring Pembakuan Unsur Buatan	Pemerintah Kecamatan	100	62,615,150.00
1.20.03.28	Program Penguatan Kelembagaan			93,719,550.00
1.20.03.28.03	Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	Pemerintah Kecamatan	100	93,719,550.00
19.002 - Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat				1,034,900,000.00
1.20.03.34	Program Fasilitasi dan Koordinasi di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			1,034,900,000.00
1.20.03.34.01	Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Instansi terkait bidang pendidikan dan kesehatan	100	14,305,000.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.03.34.02	Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Masyarakat	100	1,154,950.00
1.20.03.34.03	Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan KB	Masyarakat	100	1,046,400.00
1.20.03.34.04	Fasilitasi Pelaksanaan Pemberangkatan/Pemulangan Jamaah Haji	Instansi Terkait	100	384,722,950.00
1.20.03.34.05	Fasilitasi Pelaksanaan Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan	Safari Ramadhan, MTQ Tradisional, Maulid, Isra	100	172,834,775.00
1.20.03.34.06	Fasilitasi pelaksanaan/keikutsertaan STQ/MTQ	Masyarakat	100	68,994,000.00
1.20.03.34.07	Fasilitasi Pelaksanaan Festival Anak Shaleh	Masyarakat Kab. Soppeng	100	109,173,375.00
1.20.03.34.08	Fasilitasi Penanganan Narkoba Melalui Sistem Pencegahan, Penyalahgunaan dan Pemberantasan Gelap Narkoba	Masyarakat	100	150,000,000.00
1.20.03.34.10	Pengembangan Nilai Budaya LASQI	Kegiatan Organisasi /	100	58,500,550.00
1.20.03.34.11	Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan	Aparat dan Masyarakat di sekitar Kantor Bupati	100	36,757,600.00
1.20.03.34.12	Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Zoonosis	Masyarakat	100	37,410,400.00
19.003 - Bagian Administrasi Kemasyarakatan				<u>200,000,000.00</u>
1.20.03.33	Program Pengkajian Kebijakan Pemda di Bidang Politik, Kesbang, Pemuda dan Olahraga, dan			200,000,000.00
1.20.03.33.01	Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Instansi terkait (BPM Pemdes) Kec./Desa/Kelurahan	100	56,560,250.00
1.20.03.33.02	Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi bidang Kesbang dan Politik	Instansi terkait (KPUD, Dinas Kesbangpol dan 8 Kecamatan)	100	66,611,700.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.03.33.03	Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Pemuda dan Olahraga	Instansi Terkait (Pemuda dan Olahraga, Koperindag, Dinas	100	76,828,050.00
19.004 - Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol				<u>984,520,000.00</u>
1.20.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			467,500,000.00
1.20.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Kantor Sekretariat Daerah	100	300,000,000.00
1.20.03.01.26	Penyediaan Operasional Mess Pemda Jakarta	Mess Jakarta / Kantor Bupati Soppeng	100	167,500,000.00
1.20.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			20,000,000.00
1.20.03.02.30	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Studio dan	Aparat pemerintah daerah	100	20,000,000.00
1.25.00.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			361,636,075.00
1.25.00.15.02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan	Aparat pemerintah daerah	100	165,625,000.00
1.25.00.15.03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi	Aparat Pemda	100	114,700,000.00
1.25.00.15.12	Peningkatan Kegiatan Kprotokoleran	Aparat Pemerintah Daerah	100	81,311,075.00
1.25.00.17	Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi			32,608,750.00
1.25.00.17.03	Orientasi Keprotokoleran	Masyarakat dan Aparat	100	32,608,750.00
1.25.00.18	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media			102,775,175.00
1.25.00.18.02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Masyarakat dan Aparat	100	102,775,175.00
19.005 - Bagian Administrasi Pembangunan				<u>1,036,030,000.00</u>
1.20.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan			31,840,000.00
1.20.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Stakeholder Perencanaan	100	31,840,000.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.16.00.17	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah			128,422,900.00
1.16.00.17.02	Pengendalian dan Peningkatan Data Pembangunan se-Kabupaten Soppeng	SKPD Pemkab. Soppeng dan L/K/D/I yang terkait	100	19,847,900.00
1.16.00.17.03	Pembinaan Jasa Konstruksi/Kabupaten	SKPD Pemkab. Soppeng dan L/K/D/I yang terkait	100	108,575,000.00
1.20.03.28	Program Penguatan Kelembagaan			35,000,000.00
1.20.03.28.14	Evaluasi, Monitoring dan Koordinasi Bidang Perhubungan, Budaya dan Pariwisata	SKPD Pemkab. Soppeng dan L/K/D/I yang terkait	100	35,000,000.00
1.20.03.38	Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa			840,767,100.00
1.20.03.38.01	Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Instansi Terkait dan kelompok	100	198,664,300.00
1.20.03.38.02	Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)	Instansi Terkait	100	602,072,700.00
1.20.03.38.03	Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa	Instansi yang terkait dan penyedia barang/Pemerintah	100	40,030,100.00
19.006 - Bagian Administrasi Sumberdaya Alam				<u>91,428,250.00</u>
1.20.03.28	Program Penguatan Kelembagaan			91,428,250.00
1.20.03.28.04	Evaluasi monitoring dan koordinasi bidang peternakan dan perikanan	Instansi terkait	100	39,430,100.00
1.20.03.28.05	Evaluasi, monitoring dan koordinasi bidang tanaman pangan dan hortikultura	Instansi Terkait	100	22,265,750.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.03.28.06	Evaluasi monitoring dan koordinasi bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan energi dan lingkungan hidup	Instansi Terkait	100	29,732,400.00
19.007 - Bagian Administrasi Perekonomian				488,998,462.00
1.13.00.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan			71,022,125.00
1.13.00.16.09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan	Aparat pemerintahan yang menangani pelayanan	100	71,022,125.00
1.16.00.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			62,999,025.00
1.16.00.15.06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia	Aparat Pemerintah yang Menangani Pelayanan	100	2,999,075.00
1.16.00.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Aparat Setda	100	59,999,950.00
1.20.03.25	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah			15,977,312.00
1.20.03.25.02	Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi	Aparat Pemerintah yang Menangani Pelayanan	100	15,977,312.00
1.20.03.35	Program Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perekonomian dan Pembangunan			339,000,000.00
1.20.03.35.04	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Aparat pemerintah dan	100	55,000,000.00
1.20.03.35.05	Koordinasi Pembinaan dan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Ilegal	Aparat pelayanan perindustrian dan perdagangan	100	184,000,000.00
1.20.03.35.08	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	Aparat pelayanan	100	100,000,000.00
19.008 - Bagian Hukum dan Perundang-undangan				869,550,000.00
1.20.03.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			263,391,200.00
1.20.03.20.02	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Konsultan Hukum Pemerintah Daerah	100	182,000,000.00
1.20.03.20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Aparat pemerintah daerah	100	81,391,200.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.03.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			555,658,700.00
1.20.03.26.03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Rancangan Peraturan Daerah	100	172,399,900.00
1.20.03.26.04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Rancangan Peraturan Daerah	100	40,696,900.00
1.20.03.26.05	Publikasi peraturan perundang-undangan	Masyarakat dan Aparat	100	157,837,150.00
1.20.03.26.06	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Produk-produk hukum daerah	100	84,724,750.00
1.20.03.26.08	Publikasi peraturan perundang-undangan berupa Sosialisasi Peraturan Tentang Rokok/Pajak Tembakau	Masyarakat	100	100,000,000.00
1.20.03.36	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan			50,500,100.00
1.20.03.36.04	Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Informasi Pelayanan	Pemerintah Kabupaten	100	50,500,100.00
19.009 - Bagian Organisasi dan Tatalaksana				<u>587,676,000.00</u>
1.20.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			214,629,325.00
1.20.03.01.21	Penyediaan Jasa Perkantoran	Tenaga kontrak/honorer	100	214,629,325.00
1.20.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			88,793,650.00
1.20.03.03.06	Pembinaan Kepegawaian	Pegawai lingkup Sekretariat	100	51,533,250.00
1.20.03.03.07	Evaluasi dan Monitoring Kinerja Aparatur	Pegawai lingkup Sekretariat	100	37,260,400.00
1.20.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya			80,669,975.00
1.20.03.05.03	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	Aparat lingkup sekretariat daerah Kab. Soppeng	100	80,669,975.00
1.20.03.28	Program Penguatan Kelembagaan			203,583,050.00
1.20.03.28.09	Penyusunan Rencana Kerja Kelembagaan Daerah	Organisasi perangkat daerah	100	50,870,125.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.03.28.10	Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik	SKPD Pengelola Pelayanan Publik	100	66,664,575.00
1.20.03.28.12	Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Kesenjangan antara Profil Pegawai dan Syarat Jabatan	Organisasi Perangkat Daerah	100	86,048,350.00
19.010 - Bagian Keuangan				<u>2,037,984,000.00</u>
1.20.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,853,540,800.00
1.20.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pengelola Keuangan Daerah	100	353,540,800.00
1.20.03.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Organisasi perangkat daerah	100	1,500,000,000.00
1.20.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			103,749,811.00
1.20.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD Setda	100	69,102,818.00
1.20.03.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD SETDA	100	34,646,993.00
1.20.03.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			80,693,389.00
1.20.03.17.16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Aset/Barang daerah/Setda	100	80,693,389.00
19.011 - Bagian Umum				<u>10,584,919,250.00</u>
1.20.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4,135,424,500.00
1.20.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Setda, Rujab dan asrama IMPS	100	900,000,000.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.03.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pegawai Sekretariat Daerah	100	55,300,000.00
1.20.03.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kantor penghubung, Setda dan	100	214,650,000.00
1.20.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Penyedia komponen instalasi	100	150,000,000.00
1.20.03.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	PNS dan Non PNS lingkup	100	43,540,000.00
1.20.03.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Pegawai Lingkup Sekretriati	100	1,651,934,500.00
1.20.03.01.23	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH	Rumah Tangga Bupati/Wakil Bupati	100	1,020,000,000.00
1.20.03.01.24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	Bupati dan wakil Bupati	100	100,000,000.00
1.20.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			4,161,494,750.00
1.20.03.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Sarana dan Prasarana Kantor	100	20,156,750.00
1.20.03.02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Peralatan rumah Jabatan/Dinas	100	201,821,000.00
1.20.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Mess Jakarta / Kantor Bupati	100	759,751,500.00
1.20.03.02.10	Pengadaan mebeleur	Peralatan rumah jabatan/dinas	100	303,000,000.00
1.20.03.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Rumah jabatan Bupati/Wakil	100	143,000,000.00
1.20.03.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Rumah dinas pemerintah	100	100,000,000.00
1.20.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung/kantor Pemda Kab.	100	207,000,000.00
1.20.03.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Mobil dinas pejabat	100	519,765,500.00
1.20.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobil dinas dan operasional	100	1,505,000,000.00
1.20.03.02.27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Rumah Jabatan	100	95,000,000.00
1.20.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Aparat Setda	100	107,000,000.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.03.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman, Taman, Pagar, Tempat Parkir	Aparat Setda	100	200,000,000.00
1.20.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			92,500,000.00
1.20.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Bupati dan Wakil Bupati	100	92,500,000.00
1.20.03.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			2,195,500,000.00
1.20.03.16.01	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,	Masyarakat	100	697,500,000.00
1.20.03.16.02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Tamu Pejabat	100	809,400,000.00
1.20.03.16.05	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Bupati / Wakil Bupati	100	143,600,000.00
1.20.03.16.06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Bupati dan Wakil Bupati	100	545,000,000.00
Jumlah Belanja Langsung				20,067,845,962.00



Urusan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
SKPD : SEKRETARIAT DPRD

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,760,750,000.00
1.20.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Gedung DPRD dan Rumah Jabatan Pimpinan	100	441,000,000.00
1.20.04.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas yang diperpanjang STNK-nya maupun penggantian STNK.	100	60,000,000.00
1.20.04.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Lantai, Ruangan dan Halaman Gedung Kantor DPRD dan Rujab	100	150,000,000.00
1.20.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Gedung DPRD dan Rujab Pimpinan	100	50,000,000.00
1.20.04.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Gedung DPRD	100	58,790,000.00
1.20.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD	100	450,000,000.00
1.20.04.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Gedung DPRD dan Rujab Pimpinan	100	25,000,000.00
1.20.04.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Pegawai Sekretariat DPRD dan Non PNS yang ditugaskan	100	400,000,000.00
1.20.04.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Anggota DPRD, Pegawai Set. DPRD, Tamu DPRD dan Tamu Pimpinan DPRD.	100	1,050,960,000.00
1.20.04.01.22	Penyediaan jasa jaminan asuransi kesehatan DPRD	Tersedianya jasa jaminan asuransi kesehatan DPRD	100	75,000,000.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			1,705,350,000.00
1.20.04.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kasubag Dokumentasi dan Dokter Klinik	100	20,000,000.00
1.20.04.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dewan dan sekretariat DPRD	100	65,900,000.00
1.20.04.02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Rumah Jabatan Pimpinan	100	212,110,000.00
1.20.04.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Gedung DPRD	100	178,945,000.00
1.20.04.02.10	Pengadaan mebeleur	Pimpinan DPRD	100	21,595,000.00
1.20.04.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Rumah Jabatan Pimpinan	100	50,000,000.00
1.20.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung dan Halaman Kantor DPRD	100	50,000,000.00
1.20.04.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Mobil Dinas Pimpinan	100	344,000,000.00
1.20.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Sekretariat DPRD	100	596,800,000.00
1.20.04.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung	Perlengkapan kantor yang rusak	100	58,500,000.00
1.20.04.02.27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah	Rumah Jabatan Pimpinan	100	27,500,000.00
1.20.04.02.40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Gedung DPRD Kab. Soppeng	100	80,000,000.00
1.20.04.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			348,950,000.00
1.20.04.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Anggota DPRD Kab. Soppeng, Staf DPRD, Dokter & Perawat Klinik	100	341,700,000.00
1.20.04.03.07	Evaluasi dan Monitoring Kinerja Aparatur	Pegawai Sekretariat DPRD	100	7,250,000.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			880,000,000.00
1.20.04.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Pegawai Sekretariat DPRD	100	440,000,000.00
1.20.04.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-	Pegawai Sekretariat DPRD	100	440,000,000.00
1.20.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100,100,000.00
1.20.04.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		100	45,650,000.00
1.20.04.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD	100	46,450,000.00
1.20.04.06.05	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Pegawai Sekretariat DPRD	100	8,000,000.00
1.20.04.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			11,055,046,000.00
1.20.04.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kab. Soppeng	100	563,950,000.00
1.20.04.15.02	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	Pemerintah Daerah, Masyarakat, Elemen Lainnya	100	30,000,000.00
1.20.04.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Pemerintah Daerah, Masyarakat dan DPRD	100	552,800,000.00
1.20.04.15.04	Rapat-rapat paripurna	Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Semua Elemen Lainnya	100	291,600,000.00
1.20.04.15.05	Kegiatan Reses	Konstituen (Rakyat)	100	943,500,000.00
1.20.04.15.06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Masyarakat Kab. Soppeng dan Elemen Lainnya.	100	250,000,000.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.04.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Pimpinan dan Anggota DPRD	100	7,187,896,000.00
1.20.04.15.08	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Sosialisasi	100	1,150,000,000.00
1.20.04.15.09	Fasilitasi Kegiatan Kehumasan dan Keprotokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD	Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Sosialisasi	100	85,300,000.00
1.20.04.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi			308,200,000.00
1.20.04.23.01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Tersedianya Informasi layanan publik (website)	100	308,200,000.00
Jumlah Belanja Langsung				17,158,396,000.00



Urusan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
SKPD : INSPEKTORAT

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			539,189,800.00
1.20.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Kab. Soppeng	100	28,876,000.00
1.20.05.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Surat Tanda Kendaraan Dinas Inspektorat Kab. Soppeng	100	4,720,000.00
1.20.05.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Inspektorat Kab. Soppeng	100	9,100,000.00
1.20.05.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat Kab. Soppeng	100	1,670,000.00
1.20.05.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Inspektorat Kab. Soppeng	100	8,000,000.00
1.20.05.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Kab. Soppeng	100	2,000,000.00
1.20.05.01.18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar	Pegawai Inspektorat Kabupaten	100	253,000,000.00
1.20.05.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Pegawai Inspektorat kabupaten Soppeng	100	231,823,800.00
1.20.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			488,535,000.00
1.20.05.02.05	Pengadaan Kendaraan Operasional	Pegawai Inspektorat Kab. Soppeng	100	63,800,000.00
1.20.05.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kantor Inspektorat Kab. Soppeng	100	13,750,000.00
1.20.05.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Inventaris Kantor	100	61,700,000.00
1.20.05.02.10	Pengadaan mebeleur	Kantor Inspektorat Kabupaten Soppeng	100	85,470,000.00
1.20.05.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kantor Inspektorat Kab. Soppeng	100	17,400,000.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.05.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Inspektorat Kab. Soppeng	100	126,920,000.00
1.20.05.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Kantor Inspektorat	100	19,495,000.00
1.20.05.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.	Kantor Inspektorat	100	100,000,000.00
1.20.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			414,000,000.00
1.20.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sertifikasi dan Diklat JFA, P2UPD	100	88,000,000.00
1.20.05.05.03	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	Pegawai Inspektorat	100	326,000,000.00
1.20.05.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			2,376,675,200.00
1.20.05.20.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	SKPD Lingkup Se- Kab. Soppeng	100	1,755,660,000.00
1.20.05.20.02	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkup Pem. Kab. Soppeng	100	263,090,200.00
1.20.05.20.06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (Pemutahiran Data)	Tindak Lanjut Temuan Aparat Pengawasan	100	33,250,000.00
1.20.05.20.08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Seluruh SKPD (Objek pemeriksaan) Lingkup Pemkab Soppeng	100	134,600,000.00
1.20.05.20.09	Desk Pendampingan SKPD	SKPD Lingkup Kab. Soppeng	100	50,000,000.00
1.20.05.20.10	Evaluasi LAKIP	SKPD se Kab. Soppeng	100	51,000,000.00
1.20.05.20.11	Asistensi Penyusunan RKA SKPD	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100	89,075,000.00
1.20.05.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga			147,600,000.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.05.21.02	Pelatihan Tehnis Pengawasan, Pengadaan Barang dan Jasa, Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) dan Investigasi	Seluruh Pegawai Inspektorat Kab. Soppeng	100	147,600,000.00
Jumlah Belanja Langsung				3,966,000,000.00



Urusan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,010,045,514.00
1.20.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	aparatur BKD	100	88,960,000.00
1.20.06.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas	100	5,000,000.00
1.20.06.01.08	Penyediaan layanan kebersihan kantor	Aparatur BKD	100	2,974,000.00
1.20.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	aparatur BKD	100	3,407,650.00
1.20.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	aparatur BKD	100	8,000,000.00
1.20.06.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	aparatur bkd	100	4,000,000.00
1.20.06.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar	aparatur BKD	100	590,000,000.00
1.20.06.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	aparatur BKD	100	307,703,864.00
1.20.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			374,500,000.00
1.20.06.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	100	34,000,000.00
1.20.06.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor Untuk	100	83,500,000.00
1.20.06.02.10	Pengadaan Mebeulair	Tersedianya Meubiler Kantor	100	107,500,000.00
1.20.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor Yang	100	15,000,000.00
1.20.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Terpeliharanya Kendaraan	100	116,500,000.00
1.20.06.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	100	18,000,000.00
1.20.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya			60,000,000.00
1.20.06.05.03	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur BKD	100	60,000,000.00
1.20.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem			24,705,000.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.06.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	aparatur BKD	100	11,705,000.00
1.20.06.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Aparatur BKD	100	13,000,000.00
1.20.06.30	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya			59,525,000.00
1.20.06.30.07	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS	100	59,525,000.00
1.20.06.39	Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Dalam Jabatan			1,559,414,500.00
1.20.06.39.02	Pengiriman Peserta Diklat Pra Jabatan dan Dalam	aparatur Pemda	100	294,452,000.00
1.20.06.39.05	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV	CPNS	100	735,335,000.00
1.20.06.39.08	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Capra IPDN	100	73,110,000.00
1.20.06.39.09	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tenaga Pendidik	aparatur pemda	100	417,000,000.00
1.20.06.39.11	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tenaga Penyuluh	Apratur Pemda	100	39,517,500.00
1.20.06.40	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara			87,722,000.00
1.20.06.40.03	Pengelolaan Tugas Belajar dann Izin Belajar	Aparatur Pemda	100	21,350,000.00
1.20.06.40.04	Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi	Aparatur Pemda	100	39,512,000.00
1.20.06.40.05	Pengelolaan Kinerja dann Disiplin Aparatur Sipil	aparatur BKD	100	26,860,000.00
1.20.06.41	Program Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian			103,578,450.00
1.20.06.41.01	Pengelolaan Pengadministrasian Berkas-Berkas	Aparatur Pemda	100	11,225,000.00
1.20.06.41.02	Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai	Aparatur Pemda	100	79,453,450.00
1.20.06.41.03	Pelayanan Kartu Identitas dan Atribut Pegawai	aparatur BKD	100	12,900,000.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.06.42	Program Penataan dan Perencanaan Aparatur Sipil Negara			404,855,500.00
1.20.06.42.01	Pengelolaan Perencanaan, Penyeleksian dan	Aparatur Pemda	100	163,285,000.00
1.20.06.42.02	Pengelolaan Pengadministrasian Penempatan Pegawai	Aparatur Pemda	100	232,483,000.00
1.20.06.42.03	Pengelolaan Pengadministrasian Pemberhentian	aparatur BKD	100	9,087,500.00
1.20.06.43	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen			171,844,700.00
1.20.06.43.02	Pembangunan, Pengembangan Sistem Informasi, dan	Aparatur Pemda	100	131,169,700.00
1.20.06.43.04	Pengelolaan Informasi melalui Media Elektronik	Aparatur Pemda	100	33,500,000.00
1.20.06.43.05	Perencanaan, pembinaan, dan Evaluasi Pelaksanaan	aparatur BKD	100	7,175,000.00
Jumlah Belanja Langsung				3,856,190,664.00



Urusan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandi
SKPD : PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			6,707,807,700.00
1.20.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor DPPKAD, Pasar GPM, Pusper dan Penerangan Jalan	100	5,260,000,000.00
1.20.07.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Kendaraan Dinas / Operasional DPPKAD	100	30,000,000.00
1.20.07.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Gedung, Halaman dan Peralatan Kantor	100	67,000,000.00
1.20.07.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor DPPKAD, GPM dan Pusper Watansoppeng	100	12,000,000.00
1.20.07.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pegawai dan Tamu Dinas PPKAD	100	11,000,000.00
1.20.07.01.15	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pegawai Dinas PPKAD	100	9,950,000.00
1.20.07.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Peralatan Rumah Tangga Kantor DPPKAD	100	6,000,000.00
1.20.07.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Pegawai Dinas PPKAD	100	556,000,000.00
1.20.07.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Pegawai Dinas PPKAD	100	755,857,700.00
1.20.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			2,910,519,800.00
1.20.07.02.03	Pembangunan gedung kantor	Pegawai Dinas PPKAD	100	992,000,000.00
1.20.07.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pegawai Dinas PPKAD	100	83,000,000.00
1.20.07.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	UPTD dan Pegawai Dinas PPKAD	100	185,350,000.00
1.20.07.02.10	Pengadaan mebeleur	Pegawai DPPKAD	100	150,000,000.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.07.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bangunan Kantor dan Tempat Kerja, Pasar, Pertokoan dan Gedung Pertemuan	100	75,000,000.00
1.20.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Pegawai Dinas PPKAD	100	285,000,000.00
1.20.07.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan Kantor DPPKAD	100	13,369,800.00
1.20.07.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.	Kantor UPTD Kec. Donri - Donri, Liriaja dan Kantor Pelayanan Pajak dan retribusi Daerah	100	506,800,000.00
1.20.07.02.46	Pemeliharaan Rutin / Berkala Aplikasi	Aplikasi SIAKD, MAPATDA, SIMGAJI dan SIMPEG	100	120,000,000.00
1.20.07.02.49	Pembangunan Fasilitas Pasar	Aplikasi SIAKD, MAPATDA, SIMGAJI dan SIMPEG	100	250,000,000.00
1.20.07.02.50	Pembangunan Lapak Pedagang Pasar/Pedagang Kaki Lima	Aplikasi SIAKD, MAPATDA, SIMGAJI dan SIMPEG	100	250,000,000.00
1.20.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			190,000,000.00
1.20.07.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		100	40,000,000.00
1.20.07.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pejabat Struktural dan Staf DPPKAD	100	150,000,000.00
1.20.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			135,000,000.00
1.20.07.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	Laporan Capaian Kinerja, Lakip,	100	15,000,000.00
1.20.07.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan Keuangan Semesteran	100	10,000,000.00
1.20.07.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Pegawai DPPKAD	100	20,000,000.00
1.20.07.06.07	Penyusunan laporan keuangan semesteran kabupaten		100	90,000,000.00
1.02.00.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			15,695,568,000.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.02.00.16.26	Pelayanan Kesehatan Gratis	Pelayanan Kesehatan Gratis	100	15,695,568,000.00
1.20.07.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			3,603,996,121.00
1.20.07.17.02	Penyusunan standar satuan harga	SKPD, Lurah, Kepala Desa,	100	102,500,000.00
1.20.07.17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	100	331,000,000.00
1.20.07.17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	SKPD Lingkup Kab. Soppeng	100	15,000,000.00
1.20.07.17.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	SKPD Se Kabupaten Soppeng	100	332,000,000.00
1.20.07.17.09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	SKPD Se Kabupaten Soppeng	100	20,000,000.00
1.20.07.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	SKPD Se Kabupaten Soppeng	100	125,000,000.00
1.20.07.17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	SKPD Se Kabupaten Soppeng	100	120,000,000.00
1.20.07.17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Kec. Lalabata, Donri-Donri, Liliriaja, Lilirilau, Marioriawa, Marioriwawo, Ganra dan Citta	100	50,000,000.00
1.20.07.17.16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Aset / Barang Daerah	100	150,000,000.00
1.20.07.17.20	Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan Dana Transfer dengan Instansi Terkait	SKPD Terkait	100	115,000,000.00
1.20.07.17.22	Penyediaan Barang Cetakan Benda/Barang Berharga	Stake Holder pengelola PAD	100	299,971,121.00
1.20.07.17.23	Peningkatan Manajemen Tuntutan Ganti Kerugian	Pegawai Negeri Sipil	100	102,000,000.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.07.17.25	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Asli Daerah	Kec. Lalabata, Donri-Donri, Liliriaja, Lilirilau, Marioriawa, Marioriwawo, Ganra dan Citta	100	30,000,000.00
1.20.07.17.33	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Kec. Lalabata, Donri-Donri, Liliriaja, Lilirilau, Marioriawa, Marioriwawo, Ganra dan Citta	100	226,000,000.00
1.20.07.17.34	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah	Kec. Lalabata, Donri-Donri, Liliriaja, Lilirilau, Marioriawa, Marioriwawo, Ganra dan Citta	100	400,000,000.00
1.20.07.17.35	Pengamanan Aset-Aset Pemerintah Daerah	Kec. Lalabata, Donri-Donri, Liliriaja, Lilirilau, Marioriawa, Marioriwawo, Ganra dan Citta	100	85,000,000.00
1.20.07.17.36	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-	Kecamatan Lalabata	100	50,000,000.00
1.20.07.17.37	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Tim verifikasi dan pengendalian	100	287,000,000.00
1.20.07.17.38	Sosialisasi APBD Pokok dan Perubahan	Kec. Lalabata, Donri-Donri, Liliriaja, Lilirilau, Marioriawa, Marioriwawo, Ganra dan Citta	100	90,000,000.00
1.20.07.17.41	Penyusunan Standar Biaya Umum	Kecamatan Lalabata	100	5,525,000.00
1.20.07.17.43	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Kecamatan Lalabata	100	30,000,000.00
1.20.07.17.45	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan	Kecamatan Lalabata	100	53,000,000.00
1.20.07.17.46	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah	Kecamatan Lalabata	100	35,000,000.00
1.20.07.17.48	Pembentukan dan pemutakhiran basis data objek pajak	Kec. Lalabata, Donri-Donri, Liliriaja, Lilirilau, Marioriawa, Marioriwawo, Ganra dan Citta	100	200,000,000.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.07.17.49	Pendataan dan Verifikasi Data Objek Pajak Daerah	Kec. Lalabata, Donri-Donri, Liliriaja, Lilirilau, Marioriawa, Marioriwawo, Ganra dan Citta	100	200,000,000.00
1.20.07.17.50	Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Daerah	Kec. Lalabata, Donri-Donri, Liliriaja, Lilirilau, Marioriawa, Marioriwawo, Ganra dan Citta	100	50,000,000.00
1.20.07.17.51	Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah	Kec. Lalabata, Donri-Donri, Liliriaja, Lilirilau, Marioriawa, Marioriwawo, Ganra dan Citta	100	100,000,000.00
1.20.07.35	Program Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perekonomian dan Pembangunan			100,000,000.00
1.20.07.35.06	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Kecamatan Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri - Donri, Marioriawa, Marioriwawo, Ganra	100	50,000,000.00
1.20.07.35.07	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	Kecamatan Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri - Donri, Marioriawa, Marioriwawo, Ganra	100	50,000,000.00
Jumlah belanja langsung				29,342,891,621.00



Urusan : 1.20 Pemerintahan Umum

SKPD : Kantor Pelayanan Terpadu

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			385,860,000.00
1.20.08.01.02	Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pegawai Kantor Pelayanan Terpadu	100	78,000,000.00
1.20.08.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		100	2,500,000.00
1.20.08.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Petugas Kebersihan & Pegawai	100	14,500,000.00
1.20.08.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ruang Kerja Kator Pelayanan Terpadu	100	3,500,000.00
1.20.08.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan per Undang-Undangan	Pegawai Kantor Pelayanan Terpadu	100	9,500,000.00
1.20.08.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Gas Kantor	100	700,000.00
1.20.08.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Aparat Kantor Pelayanan Terpadu	100	60,000,000.00
1.20.08.01.20	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Pelayanan Terpadu	100	217,160,000.00
1.20.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			121,140,000.00
1.20.08.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pegawai Kantor Pelayanan Terpadu	100	18,000,000.00
1.20.08.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	KPT	100	17,600,000.00
1.20.08.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	KPT	100	18,040,000.00
1.20.08.02.24	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan Dinas Operasional	100	22,500,000.00
1.20.08.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlatan dan Perlengkapan Kantor	100	10,000,000.00
1.20.08.02.46	Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi	Petugas Pelayanan Perizinan KPT	100	35,000,000.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.08.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			17,200,000.00
1.20.08.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Aparat Kantor Pelayanan Terpadu	100	17,200,000.00
1.20.08.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			30,000,000.00
1.20.08.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparat Kantor Pelayanan Terpadu	100	30,000,000.00
1.20.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			12,750,000.00
1.20.08.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RENJA, RKA, DPA dan LAKIP	100	6,450,000.00
1.20.08.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	100	6,300,000.00
1.20.08.36	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik			279,250,000.00
1.20.08.36.01	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan Publik		100	7,500,000.00
1.20.08.36.03	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan		100	61,200,000.00
1.20.08.36.04	Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Informasi Pelayanan	Data dan Informasi Pelayanan	100	193,100,000.00
1.20.08.36.05	Survey Indkes Kepuasan Masyarakat	Masyarakat Pelaku Usaha	100	17,450,000.00
Jumlah Belanja Langsung				846,200,000.00



Urusan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
SKPD : KECAMATAN LALABATA

No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
KANTOR KECAMATAN LALABATA				1,589,808,006.00
1.20.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			239,806,522.00
1.20.09.01.02	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor kecamatan Lalabata	100	24,300,000.00
1.20.09.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Operasional Kantor Camat Lalabata	100	1,550,000.00
1.20.09.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Gedung Kantor Camat Lalabata	100	6,466,700.00
1.20.09.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Gedung Kantor Camat Lalabata	100	2,860,400.00
1.20.09.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Aparat Kantor Camat Lalabata	100	5,000,000.00
1.20.09.01.16	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Rumah Dinas dan Kantor Camat	100	1,980,000.00
1.20.09.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar	Aparat Kecamatan Lalabata	100	68,100,000.00
1.20.09.01.20	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Camat Lalabata	100	129,549,422.00
1.20.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			190,968,000.00
1.20.09.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rumah Dinas dan Kantor Camat	100	12,450,000.00
1.20.09.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor Kecamatan Lalabata	100	29,648,000.00
1.20.09.02.10	Pengadaan mebeleur	Kantor Kecamatan Lalabata	100	32,850,000.00
1.20.09.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Gedung, Halaman Rumah Dinas	100	7,150,000.00
1.20.09.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung, Halaman dan Tanah Kantor	100	3,200,000.00
1.20.09.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Kantor Camat Lalabata	100	99,280,000.00
1.20.09.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan Kantor Camat Lalabata	100	6,390,000.00
1.20.09.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya			7,750,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.09.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Aparat Kantor Camat Lalabata	100	7,750,000.00
1.20.09.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya			10,000,000.00
1.20.09.05.03	Bimbingan Tekhnis Impelementasi dan perundang-	Aparat Kantor Camat Lalabata	100	10,000,000.00
1.19.00.19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			12,000,000.00
1.19.00.19.02	Penyuluhan Kamtibmas	Aparat dan Masyarakat kecamatan	100	12,000,000.00
1.20.09.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			14,700,000.00
1.20.09.19.04	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Desa Se Kecamatan Lalabata	100	14,700,000.00
1.20.00.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			1,114,583,484.00
1.20.00.15.13	Fasilitasi Kader Posyandu		100	1,114,583,484.00
Kelurahan Lalabata Rilau				60,000,000.00
1.20.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			34,320,000.00
1.20.09.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Kantor Kelurahan Lalabata Rilau	100	5,084,000.00
1.20.09.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kendaraan Operasional Kantor Kelurahan Lalabata Rilau	100	500,000.00
1.20.09.01.12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kendaraan Operasional Kantor Kelurahan Lalabata Rilau	100	815,000.00
1.20.09.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Lalabata Rilau	100	3,120,000.00
1.20.09.01.16	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Aparat Kelurahan Lalabata Rilau	100	990,000.00
1.20.09.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Luar dan dalam Daerah	Aparat Kantor Kelurahan Lalabata Rilau	100	1,500,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.09.01.20	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Lalabata Rilau	100	22,311,000.00
1.20.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			23,205,000.00
1.20.09.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kelurahan Lalabata Rilau	100	6,305,000.00
1.20.09.02.10	Pengadaan mebeleur	Kantor Kelurahan Lalabata Rilau	100	9,200,000.00
1.20.09.02.22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor Kelurahan Lalabata	100	3,400,000.00
1.20.09.02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan	Kendaraan Dinas Roda 2	100	4,300,000.00
1.20.09.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100	2,475,000.00
1.20.09.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Aparatur Kantor Kelurahan Lalabata	100	2,475,000.00
Kelurahan Ompo				60,000,000.00
1.20.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			31,368,000.00
1.20.09.01.02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Kelurahan Ompo	100	7,440,000.00
1.20.09.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Operasional Kantor Kelurahan Ompo	100	750,000.00
1.20.09.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Gedung Kantor Kelurahan Ompo	100	646,000.00
1.20.09.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Gedung Kantor Kelurahan Ompo	100	653,500.00
1.20.09.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparatur Kantor Kelurahan Ompo	100	2,910,000.00
1.20.09.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kantor Kelurahan Ompo	100	990,000.00
1.20.09.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar	Kantor Kelurahan Ompo	100	2,835,000.00
1.20.09.01.20	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Kelurahan Ompo	100	15,143,500.00
1.20.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			26,387,000.00
1.20.09.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor Kelurahan Ompo	100	17,797,000.00
1.20.09.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Kelurahan Ompo	100	1,870,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.09.02.24	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan	100	4,600,000.00
1.20.09.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan	100	2,120,000.00
1.20.09.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100	2,245,000.00
1.20.09.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Aparatur Kantor Kelurahan Ompo	100	2,245,000.00
Kelurahan Botto				60,000,000.00
1.20.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			29,556,400.00
1.20.09.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelurahan Botto	100	3,240,000.00
1.20.09.01.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Operasiona Kantor Kelurahan Botto	100	750,000.00
1.20.09.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Aparat Kantor Kelurahan Botto	100	1,200,000.00
1.20.09.01.16	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kelurahan Botto	100	990,000.00
1.20.09.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar	Aparat Kelurahan Botto	100	5,113,600.00
1.20.09.01.20	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Botto	100	18,262,800.00
1.20.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			26,193,600.00
1.20.09.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kantor Kelurahan Botto	100	2,995,500.00
1.20.09.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor Kelurahan Botto	100	12,402,000.00
1.20.09.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor Kelurahan Botto	100	4,230,000.00
1.20.09.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan	100	6,146,100.00
1.20.09.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Kelurahan Botto	100	420,000.00
1.20.09.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100	4,250,000.00
1.20.09.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Aparatur Kantor Kelurahan Ompo	100	4,250,000.00
25.004 - Kelurahan Lemba				60,000,000.00
1.20.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			30,790,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.09.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Kantor Kelurahan Lemba	100	3,600,000.00
1.20.09.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Kelurahan Lemba	100	1,000,000.00
1.20.09.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Aparat Kelurahan Lemba	100	2,640,000.00
1.20.09.01.16	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kelurahan Lemba	100	990,000.00
1.20.09.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar	Aparat Kelurahan Lemba	100	3,810,200.00
1.20.09.01.20	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Lemba	100	18,749,800.00
1.20.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			21,190,000.00
1.20.09.02.10	Pengadaan mebeleur	Kelurahan Lemba	100	8,625,000.00
1.20.09.02.22	Pemeliharaan/Rutin Berkala Gedung Kantor	Kantor Kelurahan Lemba	100	3,995,000.00
1.20.09.02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan	Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan	100	6,000,000.00
1.20.09.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kantor Kelurahan Lemba	100	2,570,000.00
1.20.09.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100	8,020,000.00
1.20.09.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Aparatur Kantor Kelurahan Lemba	100	8,020,000.00
Kelurahan Bila				60,000,000.00
1.20.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			30,898,000.00
1.20.09.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan	Kantor Kelurahan Bila	100	2,040,000.00
1.20.09.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Kelurahan Bila	100	1,000,000.00
1.20.09.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Aparat Kantor Kelurahan Bila	100	1,320,000.00
1.20.09.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar	Aparat Kantor Kelurahan Bila	100	5,630,000.00
1.20.09.01.20	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Kelurahan Bila	100	20,908,000.00
1.20.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			21,752,000.00
1.20.09.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Aparat Kelurahan Bila	100	9,382,000.00
1.20.09.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kantor Kelurahan Bila	100	2,550,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.09.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan Bila	100	7,700,000.00
1.20.09.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Aparat Kantor Kelurahan Bila	100	2,120,000.00
1.20.09.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100	7,350,000.00
1.20.09.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Aparatur Kantor Kelurahan Lemba	100	7,350,000.00
Kelurahan Lapajung				60,000,000.00
1.20.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			35,425,000.00
1.20.09.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelurahan Lapajung	100	2,280,000.00
1.20.09.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Kelurahan Lapajung	100	750,000.00
1.20.09.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kendaraan Dinas Kelurahan Lapajung	100	1,132,000.00
1.20.09.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparat Kantor Kelurahan Lapajung	100	3,000,000.00
1.20.09.01.16	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Kelurahan Lapajung	100	990,000.00
1.20.09.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar	Aparat Kantor Kelurahan Lapajung	100	6,200,000.00
1.20.09.01.20	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Lapajung	100	21,073,000.00
1.20.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			24,575,000.00
1.20.09.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kelurahan Lapajung	100	6,900,000.00
1.20.09.02.10	Pengadaan mebeleur	Kelurahan Lapajung	100	9,450,000.00
1.20.09.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Kelurahan Lapajung	100	2,975,000.00
1.20.09.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan	100	5,250,000.00
25.007 - Kelurahan Salokaraja				60,000,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			30,097,000.00
1.20.09.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Kelurahan Salokaraja	100	2,600,000.00
1.20.09.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan Salokaraja	100	1,000,000.00
1.20.09.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kantor Kelurahan Salokaraja	100	536,750.00
1.20.09.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Kelurahan Salokaraja	100	497,250.00
1.20.09.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kantor Kelurahan Salokaraja	100	2,940,000.00
1.20.09.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Aparat Kantor Kelurahan Salokaraja	100	1,000,000.00
1.20.09.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Kelurahan Salokaraja	100	500,000.00
1.20.09.01.18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar	Aparat Kantor Kelurahan Salokaraja	100	5,917,000.00
1.20.09.01.20	Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Kelurahan Salokaraja	100	15,106,000.00
1.20.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			29,903,000.00
1.20.09.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kelurahan Salokaraja	100	408,250.00
1.20.09.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kelurahan Salokaraja	100	11,524,750.00
1.20.09.02.10	Pengadaan mebeleur	Kantor Kelurahan Salokaraja	100	5,145,000.00
1.20.09.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Kelurahan Salokaraja	100	3,505,000.00
1.20.09.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan	100	6,750,000.00
1.20.09.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Kantor Kelurahan Salokaraja	100	2,570,000.00
Jumlah Belanja Langsung				2,009,808,006.00



Urusan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
SKPD : KECAMATAN DONRI-DONRI

No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			217,398,800.00
1.20.10.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Camat Donri-Donri	100	36,240,000.00
1.20.10.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kantor Camat Donri-Donri	100	1,700,000.00
1.20.10.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kantor Camat Donri-Donri	100	400,000.00
1.20.10.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Camat Donri-Donri	100	915,000.00
1.20.10.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Camat Donri-Donri	100	5,000,000.00
1.20.10.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kantor Camat Donri-Donri	100	1,800,000.00
1.20.10.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kantor Camat Donri-Donri	100	85,000,000.00
1.20.10.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Camat Donri-Donri	100	86,343,800.00
1.20.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			106,207,017.00
1.20.10.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kantor Camat Donri-Donri	100	29,706,757.00
1.20.10.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Camat Donri-Donri	100	4,500,000.00
1.20.10.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kantor Camat Donri-Donri	100	70,500,260.00
1.20.10.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kantor Camat Donri-Donri	100	1,500,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.08.03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			17,750,000.00
1.20.08.03.02	Pengadaan pakaian dinas dan atribut	Kantor Camat Donri-Donri	100	17,750,000.00
1.20.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			10,000,000.00
1.20.10.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Aparat Kantor Camat Donri-Donri	100	10,000,000.00
1.19.00.19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			12,000,000.00
1.19.00.19.02	Penyuluhan Kamtibmas	Kantor Camat Donri-Donri	100	12,000,000.00
1.20.10.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			29,700,000.00
1.20.10.19.04	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Kecamatan Donri-Donri	100	29,700,000.00
Jumlah Belanja Langsung				393,055,817.00



Urusan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD : KECAMATAN LILIRIAJA

No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran
1	2	3	4	5
KANTOR CAMAT LILIRIAJA				1,028,369,676.00
1.20.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			274,584,548.00
1.20.11.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Penyelesaian Administrasi	100	39,819,000.00
1.20.11.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase Kendaraan Dinas yang Memiliki STNK yang berlaku	100	1,875,000.00
1.20.11.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Persentase Luas Area Kantor yang di	100	18,978,000.00
1.20.11.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Alat Listrik	100	3,820,000.00
1.20.11.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Meningkatnya pengetahuan aparat	100	10,000,000.00
1.20.11.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan BBG	100	3,360,000.00
1.20.11.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Persentase Rapat Konsultasi yang di Ikuti	100	75,326,898.00
1.20.11.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Penyelesaian Perkantoran tepat	100	121,405,650.00
1.20.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			244,903,000.00
1.20.11.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kantor Kecamatan Liliriaja	100	46,060,000.00
1.20.11.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor Camat Liliriaja	100	8,250,000.00
1.20.11.02.10	Pengadaan Meubeler	Pejabat eselon III dan IV	100	45,074,000.00
1.20.11.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Kecamatan Liliriaja	100	65,000,000.00
1.20.11.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas operasional kantor	100	69,249,000.00
1.20.11.02.28	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor	100	11,270,000.00
1.20.09.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			7,700,000.00
1.20.09.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Aparat Kecamatan Liliriaja	100	7,700,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran
1	2	3	4	5
1.20.11.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya			16,000,000.00
1.20.11.05.03	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	Aparat Kecamatan Liliriaja	100	16,000,000.00
1.20.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			10,526,350.00
1.20.11.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Kantor Kecamatan Liliriaja	100	10,526,350.00
1.19.00.19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			12,000,000.00
1.19.00.19.02	Penyuluhan Kamtibmas	Wilayah Kecamatan Liliriaja	100	12,000,000.00
1.20.11.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			19,700,000.00
1.20.11.19.04	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Desa se - Kec. Liliriaja	100	19,700,000.00
1.20.00.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			442,955,778.00
1.20.00.15.13	Fasilitasi Kader Posyandu		100	442,955,778.00
Kelurahan Apanang				60,000,000.00
1.20.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			40,700,000.00
1.20.11.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Penyelesaian Administrasi	100	1,380,000.00
1.20.11.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase Kendaraan Dinas yang Memiliki STNK yang berlaku	100	800,000.00
1.20.11.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Alat Listrik	100	904,000.00
1.20.11.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Meningkatnya pengetahuan aparat	100	3,200,000.00
1.20.11.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan BBG	100	500,000.00
1.20.11.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Persentase Rapat Konsultasi yang di Ikuti	100	8,000,000.00
1.20.11.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Penyelesaian Perkantoran tepat	100	25,916,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran
1	2	3	4	5
1.20.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			19,300,000.00
1.20.11.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor Kelurahan Appanang	100	6,000,000.00
1.20.11.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Kelurahan Appanang	100	4,070,000.00
1.20.11.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kantor Kelurahan Appanang	100	8,400,000.00
1.20.11.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kantor Kelurahan Appanang	100	830,000.00
Kelurahan JennaE				60,000,000.00
1.20.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			33,136,500.00
1.20.11.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Penyelesaian Administrasi	100	1,450,000.00
1.20.11.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase Kendaraan Dinas yang Memiliki STNK yang berlaku	100	450,000.00
1.20.11.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Persentase Luas Area Kantor yang di	100	1,200,000.00
1.20.11.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Alat	100	260,000.00
1.20.11.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Meningkatnya pengetahuan aparat	100	3,600,000.00
1.20.11.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan BBG	100	480,000.00
1.20.11.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Persentase Rapat Konsultasi yang di Ikuti	100	4,185,000.00
1.20.11.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Penyelesaian Perkantoran tepat	100	21,511,500.00
1.20.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			26,863,500.00
1.20.11.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor Kelurahan Jennae	100	9,500,000.00
1.20.11.02.10	Pengadaan mebeleur	Kantor Kelurahan Jennae	100	4,163,500.00
1.20.11.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Kelurahan Jennae	100	1,860,000.00
1.20.11.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kantor Kelurahan Jennae	100	6,900,000.00
1.20.11.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kantor Kelurahan Jennae	100	1,940,000.00
1.20.11.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.	Kantor Kelurahan Jennae	100	2,500,000.00



No. Rekening	Program / Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Platfon Anggaran
1	2	3	4	5
Kelurahan Galung				60,000,000.00
1.20.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			40,702,000.00
1.20.11.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Penyelesaian Administrasi	100	1,210,000.00
1.20.11.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase Kendaraan Dinas yang Memiliki STNK yang berlaku	100	600,000.00
1.20.11.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Alat Listrik	100	260,000.00
1.20.11.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Meningkatnya pengetahuan aparat	100	2,100,000.00
1.20.11.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan BBG	100	800,000.00
1.20.11.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Persentase Rapat Konsultasi yang di Ikuti	100	5,622,000.00
1.20.11.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Penyelesaian Perkantoran tepat	100	30,110,000.00
1.20.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			19,298,000.00
1.20.11.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kantor Kelurahan Galung	100	4,056,000.00
1.20.11.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor Kelurahan Galung	100	3,000,000.00
1.20.11.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Kelurahan Galung	100	3,050,000.00
1.20.11.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kantor Kelurahan Galung	100	7,832,000.00
1.20.11.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kantor Kelurahan Galung	100	1,360,000.00
Jumlah Belanja Langsung				1,208,369,676.00



Urusan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
SKPD : KECAMATAN LILIRILAU

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
KANTOR CAMAT LILIRILAU				<u>1,061,597,873.00</u>
1.20.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			256,530,168.00
1.20.12.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air, Listrik dan Telepon untuk menunjang Pelayanan Administrasi	100	24,480,000.00
1.20.12.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	100	1,700,000.00
1.20.12.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Tersedinya Gedung Kantor yang Bersih,	100	17,581,000.00
1.20.12.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Alat-alat Listrik dan Penerangan	100	3,034,050.00
1.20.12.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	100	6,000,000.00
1.20.12.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik sebagai	100	2,400,000.00
1.20.12.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Terwujudnya Komunikasi dan Koordinasi yang baik antar dalam dan luar Daerah	100	82,974,200.00
1.20.12.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya ATK, Materai, Makan	100	118,360,918.00
1.20.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			177,695,000.00
1.20.12.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor (PIK)	Kantor Camat Lilirilau	100	4,485,000.00
1.20.12.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor Camat lilirilau dan Rumah Dinas	100	36,360,000.00
1.20.12.02.10	Pengadaan mebeleur	Kantor Camat dan Rumah Dinas Camat	100	38,000,000.00
1.20.12.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor Kecamatan Lilirilau	100	18,040,000.00



No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.12.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan operasional Kecamatan	100	76,250,000.00
1.20.12.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kantor Camat Lilirilau	100	4,560,000.00
1.20.12.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			14,755,000.00
1.20.12.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		100	14,755,000.00
1.20.12.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya			4,000,000.00
1.20.12.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-	Aparat Kantor Camat Lilirilau	100	4,000,000.00
1.19.00.19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			12,000,000.00
1.19.00.19.02	Penyuluhan Kamtibmas	Aparat dan Masyarakat Kecamatan	100	12,000,000.00
1.20.12.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			27,200,000.00
1.20.12.19.04	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Penerimaan Honorarium dan pendamping	100	27,200,000.00
1.22.00.15	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			569,417,705.00
1.22.00.15.13	Fasilitasi Kader Posyandu		100	569,417,705.00
Kelurahan Ujung				64,050,000.00
1.20.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			31,380,000.00
1.20.12.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Kelurahan Ujung	100	1,200,000.00
1.20.12.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Administrasi Kendaraan Dinas	100	4,050,000.00
1.20.12.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Gedung Kantor Lurah Ujung	100	435,000.00



No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.12.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Lurah Ujung	100	655,000.00
1.20.12.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparat Kantor Lurah Ujung	100	3,520,000.00
1.20.12.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kantor Lurah Ujung	100	640,000.00
1.20.12.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Aparat Kantor Lurah Ujung	100	8,000,000.00
1.20.12.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Lurah Ujung	100	12,880,000.00
1.20.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			27,555,000.00
1.20.12.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Aparat Kelurahan Ujung	100	9,165,000.00
1.20.12.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor Lurah Ujung	100	3,000,000.00
1.20.12.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Operasional	100	14,390,000.00
1.20.12.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kantor Lurah Ujung	100	1,000,000.00
1.20.12.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			5,115,000.00
1.20.12.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Aparat Kelurahan Ujung	100	5,115,000.00
28.002 - Kelurahan Cabenge				64,050,000.00
1.20.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			44,412,500.00
1.20.12.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Aparat Kantor Lurah Cabenge	100	2,244,000.00
1.20.12.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tim pengelola keuangan Kantor Lurah	100	4,050,000.00
1.20.12.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Gedung Kantor Lurah Cabenge	100	685,000.00
1.20.12.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Lurah Cabenge	100	509,000.00
1.20.12.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparat Kantor Lurah Cabenge	100	2,800,000.00



No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.12.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kantor Lurah Cabenge	100	900,000.00
1.20.12.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar	Aparat Kantor Lurah Cabenge	100	14,962,000.00
1.20.12.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Lurah Cabenge	100	18,262,500.00
1.20.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			19,637,500.00
1.20.12.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor Lurah Cabenge	100	6,032,000.00
1.20.12.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor Lurah Cabenge	100	3,145,000.00
1.20.12.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kantor Lurah Cabenge	100	9,460,500.00
1.20.12.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kantor Lurah Cabenge	100	1,000,000.00
Kelurahan Pajalesang				64,050,000.00
1.20.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			46,202,500.00
1.20.12.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Aparat Kantor Lurah Pajalesang	100	3,240,000.00
1.20.12.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tim pengelola keuangan	100	4,050,000.00
1.20.12.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kantor Lurah Pajalesang	100	2,066,000.00
1.20.12.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Lurah Pajalesang	100	1,100,200.00
1.20.12.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparat Kantor Lurah Pajalesang	100	2,500,000.00
1.20.12.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kantor Lurah Pajalesang	100	640,000.00
1.20.12.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar	Aparat Kantor Lurah Pajalesang	100	12,456,000.00
1.20.12.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Lurah Pajalesang	100	20,150,300.00
1.20.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			11,942,500.00
1.20.12.02.10	Pengadaan mebeleur	Aparat Kantor Lurah Pajalesang	100	2,300,000.00
1.20.12.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Sarana dan Prasarana Kantor	100	9,222,500.00
1.20.12.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan Kantor	100	420,000.00



No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.12.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			5,905,000.00
1.20.12.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kantor Lurah Pajalesang	100	5,905,000.00
	Kelurahan Macanre			60,000,000.00
1.20.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			39,348,000.00
1.20.12.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Aparat Kantor Lurah Macanre	100	2,160,000.00
1.20.12.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kantor Lurah Macanre	100	1,500,000.00
1.20.12.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Aparat Kelurahan Macanre	100	2,500,000.00
1.20.12.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Bahan Logistik kantor	100	600,000.00
1.20.12.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar	Aparat Kantor Lurah Macanre	100	12,910,000.00
1.20.12.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Kantor Lurah Macanre	100	19,678,000.00
1.20.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			20,652,000.00
1.20.12.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Aparat Kantor Lurah Macanre	100	9,177,000.00
1.20.12.02.10	Pengadaan mebeleur	Aparat Kantor Lurah Macanre	100	3,500,000.00
1.20.12.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor Lurah Macanre	100	1,700,000.00
1.20.12.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Kantor Lurah Macanre	100	6,275,000.00
Jumlah Belanja Langsung				1,313,747,873.00



Urusan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
SKPD : KECAMATAN MARIORIAWA

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
KANTOR CAMAT MARIORIAWA				1,623,780,037.00
1.20.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			240,480,817.00
1.20.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Camat Marioriawa	100	52,500,000.00
1.20.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas Kec. Marioriawa	100	2,225,000.00
1.20.13.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Aparat Kantor Camat Marioriawa	100	5,000,000.00
1.20.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Aparat Kantor Camat Marioriawa	100	2,000,000.00
1.20.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparat Kantor Camat Marioriawa	100	5,000,000.00
1.20.13.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Aparat Kantor Camat Marioriawa	100	1,200,000.00
1.20.13.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Aparat Kantor Camat Marioriawa	100	56,750,000.00
1.20.13.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Aparat Kantor Camat Marioriawa	100	115,805,817.00
1.20.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			652,435,000.00
1.20.13.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Aparat Kantor Camat Marioriawa	100	15,980,000.00
1.20.13.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Aparat Kantor Camat Marioriawa	100	44,635,000.00



No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.13.02.10	Pengadaan mebeleur		100	305,150,000.00
1.20.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Halaman Rumah Dinas	100	3,400,000.00
1.20.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas Kantor Camat Marioriwawa	100	80,460,000.00
1.20.13.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor Kec. Marioriwawa	100	3,000,000.00
1.20.13.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Halaman, Taman, Pagar, Tempat Parkir		100	199,810,000.00
1.20.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			15,000,000.00
1.20.13.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Aparat Kantor Camat Marioriwawa	100	15,000,000.00
1.20.00.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			12,000,000.00
1.20.13.19.04	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Desa se Kecamatan Marioriwawa	100	12,000,000.00
1.20.13.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			19,700,000.00
1.20.13.19.04	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Desa se Kecamatan Marioriwawa	100	19,700,000.00
1.20.00.15	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			684,164,220.00
1.20.00.15.13	Fasilitasi Kader Posyandu		100	684,164,220.00
Kelurahan Batu-Batu				60,000,000.00



No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			32,650,000.00
1.20.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Lurah Batu-Batu	100	1,200,000.00
1.20.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kendaraan dinas/operasional Kantor Kelurahan Batu-Batu	100	450,000.00
1.20.13.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Aparat Kantor Kel. Batu-Batu	100	1,000,000.00
1.20.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Aparat Kantor Lurah Batu-Batu	100	500,000.00
1.20.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparat Kantor Lurah Batu-Batu	100	2,500,000.00
1.20.13.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Aparat Kantor Lurah Batu-Batu	100	1,200,000.00
1.20.13.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Aparat Kantor Lurah Batu-Batu	100	10,000,000.00
1.20.13.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Aparat Kantor Lurah Batu-Batu	100	15,800,000.00
1.20.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			27,350,000.00
1.20.13.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Aparat Kantor Kel. Batu-Batu	100	6,900,000.00
1.20.13.02.10	Pengadaan mebeleur	Aparat Kantor Kelurahan Batu-Batu	100	3,450,000.00
1.20.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung, Halaman & Segitiga Kelurahan Batu-Batu	100	1,000,000.00
1.20.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Lurah Batu-Batu	100	15,000,000.00



No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.13.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Aparat Kantor Lurah Batu-Batu	100	1,000,000.00
Kelurahan Kaca				60,000,000.00
1.20.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			32,650,000.00
1.20.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Aparat Kantor Lurah Kaca	100	1,200,000.00
1.20.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas/Operasional	100	450,000.00
1.20.13.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Aparat Kantor Kel. Kaca	100	1,000,000.00
1.20.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Aparat Kantor Lurah Kaca	100	500,000.00
1.20.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparat Kantor Lurah Kaca	100	2,500,000.00
1.20.13.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Aparat Kantor Lurah Kaca	100	1,200,000.00
1.20.13.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Aparat Kantor Lurah Kaca	100	10,000,000.00
1.20.13.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Aparat Kantor Lurah Kaca	100	15,800,000.00
1.20.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			27,350,000.00
1.20.13.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Aparat Kantor Kelurahan Kaca	100	6,900,000.00
1.20.13.02.10	Pengadaan mebeleur	Aparat Kantor Kelurahan Batu-Batu	100	3,450,000.00



No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung & halaman Kantor Lurah Kaca	100	1,000,000.00
1.20.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional Kantor Lurah Kaca	100	15,000,000.00
1.20.13.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Kantor Lurah Kaca	100	1,000,000.00
Kelurahan Attangsalo				60,000,000.00
1.20.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			32,650,000.00
1.20.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Aparat Kantor Kel. Attangsalo	100	1,200,000.00
1.20.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional	100	450,000.00
1.20.13.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Aparat Kantor Kel. Attangsalo	100	500,000.00
1.20.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Aparat Kantor Kel. Attangsalo	100	1,000,000.00
1.20.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparat Kantor Kel. Attangsalo	100	2,500,000.00
1.20.13.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Aparat Kantor Lurah Attangsalo	100	1,200,000.00
1.20.13.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Aparat Kantor Lurah Attangsalo	100	10,000,000.00
1.20.13.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Aparat Kantor Kel. Attangsalo	100	15,800,000.00
1.20.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			27,350,000.00



No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.13.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor Lurah Attangsalo	100	6,900,000.00
1.20.13.02.10	Pengadaan mebeleur	Aparat Kantor Kelurahan Attangsalo	100	3,450,000.00
1.20.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Halaman & Gedung Kantor Lurah Attangsalo	100	1,000,000.00
1.20.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/Operasional Kantor Lurah Attangsalo	100	15,000,000.00
1.20.13.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Gedung Kantor Lurah Attangsalo	100	1,000,000.00
29.004 - Kelurahan Manorangsalu				60,000,000.00
1.20.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			24,142,400.00
1.20.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Aparat Kantor Lurah Manorangsalu	100	3,000,000.00
1.20.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Aparat kantor Kelurahan Manorangsalu	100	300,000.00
1.20.13.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Aparat Kantor Kel. Manorangsalu	100	1,160,000.00
1.20.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Aparat Kantor Lurah Manorangsalu	100	1,100,000.00
1.20.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparat Kantor Lurah Manorangsalu	100	3,500,000.00
1.20.13.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Aparat Kantor Lurah Manorangsalu	100	1,200,000.00
1.20.13.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Aparat Kantor Lurah Manorangsalu	100	3,000,000.00



No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.13.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Aparat Kantor Lurah Manorangsalu	100	10,882,400.00
1.20.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			35,857,600.00
1.20.13.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Aparat Kantor Kel. Manorangsalu	100	6,600,000.00
1.20.13.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Aparat Kantor Kel. Manorangsalu	100	10,909,600.00
1.20.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Halaman dan Kantor Kel. Manorangsalu	100	5,250,000.00
1.20.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Aparat Kantor Lurah Manorangsalu	100	11,098,000.00
1.20.13.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Aparat Kantor Lurah Manorangsalu	100	2,000,000.00
Kelurahan Lompomajang				60,000,000.00
1.20.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			33,300,000.00
1.20.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Aparat Kantor Lurah Lompomajang	100	1,200,000.00
1.20.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Lurah Lompomajang	100	450,000.00
1.20.13.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Aparat Kantor Kel. Lompomajang	100	1,000,000.00
1.20.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Aparat Kantor Lurah Lompomajang	100	840,000.00
1.20.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparat Kantor Lurah Lompomajang	100	2,500,000.00
1.20.13.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Aparat Kantor Lurah Lompomajang	100	1,200,000.00



No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.13.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Aparat Kantor Lurah Limpomajang	100	11,000,000.00
1.20.13.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Aparat Kantor Lurah Limpomajang	100	15,110,000.00
1.20.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			26,700,000.00
1.20.13.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor Lurah Limpomajang	100	6,000,000.00
1.20.13.02.10	Pengadaan mebeleur	Kantor Lurah Limpomajang	100	3,000,000.00
1.20.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung & halaman Kantor Kelurahan	100	1,000,000.00
1.20.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/Operasional Kantor	100	15,000,000.00
1.20.13.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Kantor Lurah Limpomajang	100	1,700,000.00
Jumlah Belanja Langsung				1,923,780,037.00



Urusan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
SKPD : KECAMATAN MARIORIWAWO

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
KANTOR CAMAT MARIORIWAWO				734,492,332.00
1.20.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			244,910,240.00
1.20.14.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pegawai Kecamatan Marioriwawo	100	32,400,000.00
1.20.14.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	100	2,300,000.00
1.20.14.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Pegawai Kecamatan Marioriwawo	100	7,800,000.00
1.20.14.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pegawai Kecamatan Marioriwawo	100	2,800,000.00
1.20.14.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Kecamatan	100	4,775,000.00
1.20.14.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pegawai Kecamatan Marioriwawo	100	5,000,000.00
1.20.14.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Pegawai Kecamatan Marioriwawo	100	1,800,000.00
1.20.14.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Pegawai Kecamatan Marioriwawo	100	48,000,000.00
1.20.14.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Pegawai Kecamatan Marioriwawo	100	140,035,240.00
1.20.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			151,018,240.00
1.20.14.02.07	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Aparat Kantor Camat Marioriwawo	100	16,989,240.00
1.20.14.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Aparat Kantor Camat Marioriwawo	100	37,254,000.00
1.20.14.02.10	Pengadaan mebeleur		100	8,275,000.00
1.20.14.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Halaman Rumah Dinas	100	14,500,000.00
1.20.14.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas Kantor Camat	100	68,000,000.00



No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.14.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor Kec.	100	6,000,000.00
1.20.14.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			8,800,000.00
1.20.13.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya	Aparat Kantor Camat Marioriwawo	100	8,800,000.00
1.20.14.05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			7,000,000.00
1.20.13.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-	Pegawai Kecamatan Marioriwawo	100	7,000,000.00
1.20.14.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			10,000,000.00
1.20.14.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pegawai Kecamatan Marioriwawo	100	10,000,000.00
1.19.00.19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			12,000,000.00
1.19.00.19.02	Penyuluhan Kamtibmas	Masyarakat Lingkup Wilayah Kecamatan	100	12,000,000.00
1.20.14.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			34,700,000.00
1.20.14.19.04	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Desa se kecamatan marioriwawo	100	34,700,000.00
1.20.00.15	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			266,063,852.00
1.20.00.15.13	Fasilitasi Kader Posyandu		100	266,063,852.00
Kelurahan Labessi				60,000,000.00
1.20.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			34,605,000.00
1.20.14.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pegawai Kelurahan Labessi	100	1,500,000.00
1.20.14.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Pegawai Kelurahan Labessi	100	4,400,000.00
1.20.14.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pegawai Kelurahan Labessi	100	4,000,000.00



No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.20.14.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Pegawai Kelurahan Labessi	100	960,000.00
1.20.14.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Pegawai Kelurahan Labessi	100	23,745,000.00
1.20.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			25,395,000.00
1.20.14.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kantor Kel. Labessi	100	8,667,500.00
1.20.14.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pegawai Kantor Lurah Labessi	100	6,656,000.00
1.20.14.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung dan Halaman Kantor Kelurahan	100	4,000,000.00
1.20.14.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Roda Dua	100	6,071,500.00
Kelurahan TettikenraraE				60,000,000.00
1.20.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			35,992,500.00
1.20.14.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pegawai Kelurahan TettikenraraE	100	1,500,000.00
1.20.14.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Pegawai Kelurahan TettikenraraE	100	4,400,000.00
1.20.14.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pegawai Kelurahan TettikenraraE	100	2,500,000.00
1.20.14.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Pegawai Kelurahan TettikenraraE	100	1,800,000.00
1.20.14.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Pegawai Kelurahan TettikenraraE	100	25,792,500.00
1.20.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			24,007,500.00
1.20.14.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Marioriwawo	100	13,970,000.00
1.20.14.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Roda 2 Kelurahan	100	8,342,500.00
1.20.14.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pegawai Kelurahan TettikenraraE	100	1,695,000.00
Jumlah Belanja Langsung				854,492,332.00



Urusan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
SKPD : KECAMATAN GANRA

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran
1	2	3	4	5
1.20.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			201,880,062.00
1.20.15.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Kecamatan Ganra	100	22,792,172.00
1.20.15.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas	100	1,700,000.00
1.20.15.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	kantor Kecamatan Ganra	100	9,200,000.00
1.20.15.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Kecamatan Ganra	100	2,000,000.00
1.20.15.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kantor Kecamatan Ganra	100	1,190,000.00
1.20.15.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Kecamatan Ganra	100	5,000,000.00
1.20.15.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kantor Kecamatan Ganra	100	1,280,000.00
1.20.15.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Pejabat/PNS Kantor Kecamatan Ganra	100	70,000,000.00
1.20.15.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Kecamatan Ganra	100	88,717,890.00
1.20.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			125,974,350.00
1.20.15.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor Kecamatan Ganra	100	18,304,000.00
1.20.15.02.10	Pengadaan mebeleur	Kantor Kecamatan Ganra	100	12,400,000.00



No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran
1	2	3	4	5
1.20.15.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sarana dan Prasarana	100	11,174,950.00
1.20.15.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas	100	79,575,400.00
1.20.15.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Ganra	100	4,520,000.00
1.20.15.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			7,600,000.00
1.20.15.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Aparatur	100	7,600,000.00
1.20.15.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			4,000,000.00
1.20.15.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur	100	4,000,000.00
1.19.00.19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			12,000,000.00
1.19.00.19.02	Penyuluhan Kamtibmas	Aparat	100	12,000,000.00
1.20.15.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			17,200,000.00
1.20.15.19.04	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Desa se Kecamatan Ganra	100	17,200,000.00
Jumlah Belanja Langsung				368,654,412.00



Urusan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
SKPD : KECAMATAN CITTA

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran
1	2	3	4	5
1.20.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			202,961,603.00
1.20.16.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik	Kantor Kec. Citta	100	15,600,000.00
1.20.16.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Kantor Kec. Citta	100	2,300,000.00
1.20.16.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kantor Kec. Citta	100	10,200,000.00
1.20.16.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Gedung Kantor Kec.Citta	100	1,873,560.00
1.20.16.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Aparat Kantor Kec. Citta	100	5,000,000.00
1.20.16.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Aparat Kantor Kec. Citta	100	1,550,000.00
1.20.16.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Aparat Kantor Kec. Citta	100	80,072,380.00
1.20.16.01.20	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Kec. Citta	100	86,365,663.00
1.20.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			154,095,620.00
1.20.16.02.05	Pegadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	Kantor Kec. Citta	100	17,000,000.00
1.20.16.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Kec. Citta	100	6,265,000.00
1.20.16.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kantor Kec. Citta	100	24,635,000.00
1.20.16.02.10	Pegadaan meubelair	Kantor Kec. Citta	100	10,950,000.00



No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran
1	2	3	4	5
1.20.16.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Kantor Kec. Citta	100	87,992,000.00
1.20.16.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Perlengkapan/Peralatan Kantor Kec. Citta	100	7,253,620.00
1.20.16.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			20,600,000.00
1.20.16.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kantor Kecamatan Citta	100	20,600,000.00
1.20.16.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			8,000,000.00
1.20.16.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Aparat Kantor Kec. Citta	100	8,000,000.00
1.19.00.19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			12,000,000.00
1.19.00.19.02	Penyuluhan Kamtibmas	Masyarakat lingkup kecamatan Citta	100	12,000,000.00
1.20.16.19	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa			17,200,000.00
1.20.16.19.04	Fasilitas Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Tim Pendamping ADD Kec. Citta	100	17,200,000.00
Jumlah Belanja Langsung				414,857,223.00



Urusan : 1.21 Ketahanan Pangan

SKPD : BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.21.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			601,080,850.00
1.21.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BP3KP	100	45,000,000.00
1.21.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas/Operasional BP3KP	100	15,000,000.00
1.21.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	BP3KP	100	15,000,000.00
1.21.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	BP3KP	100	4,000,000.00
1.21.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	BP3KP	100	7,000,000.00
1.21.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	BP3KP	100	1,200,000.00
1.21.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	BP3KP	100	333,021,600.00
1.21.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	BP3KP	100	180,859,250.00
1.21.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			95,000,000.00
1.21.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BP3KP	100	30,000,000.00
1.21.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas/Operasional BP3KP	100	40,000,000.00
1.21.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan Gedung Kantor BP3KP	100	25,000,000.00
1.21.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			25,000,000.00
1.21.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	BP3KP	100	25,000,000.00
1.21.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			35,000,000.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.21.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BP3KP	100	15,000,000.00
1.21.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Aparat BP3KP	100	10,000,000.00
1.21.01.06.06	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	BP3KP	100	10,000,000.00
2.01.00.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			250,000,000.00
2.01.00.15.01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Gapoktan dan Kelompok Tani	100	160,000,000.00
2.01.00.15.02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Gapoktan	100	45,000,000.00
2.01.00.15.03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Gapoktan, Kelompok Tani	100	45,000,000.00
2.01.00.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan			467,940,750.00
2.01.00.16.01	Penanganan daerah rawan pangan	Masyarakat	100	76,205,900.00
2.01.00.16.03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	BP3KP	100	67,062,700.00
2.01.00.16.04	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah	BP3KP	100	22,734,650.00
2.01.00.16.05	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Anggota Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	100	48,689,050.00
2.01.00.16.09	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	Kelompok Wanita Tani	100	51,481,800.00
2.01.00.16.10	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Aparat dan Masyarakat	100	20,000,000.00
2.01.00.16.13	Pengembangan cadangan pangan daerah		100	95,000,000.00
2.01.00.16.14	Pengembangan desa mandiri pangan	Kelompok Afinitas	100	13,647,750.00
2.01.00.16.19	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Poktan/Gapoktan	100	12,401,500.00
2.01.00.16.22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Masyarakat	100	39,577,400.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
2.01.00.16.31	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	BP3KP	100	21,140,000.00
2.01.00.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			30,000,000.00
2.01.00.18.04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Penyuluh dan Kelompok Tani	100	30,000,000.00
2.01.00.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan			145,875,000.00
2.01.00.19.01	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Penyuluh dan Kelompok Tani	100	145,875,000.00
2.01.00.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan		100	1,278,025,000.00
2.01.00.20.01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Penyuluh PNS dan THL-TBPP		40,000,000.00
2.01.00.20.02	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Penyuluh dan THL-TBPP	100	54,515,000.00
2.01.00.20.03	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Penyuluh PNS, THL-TBPP	100	40,000,000.00
2.01.00.20.05	Replikasi Pemberdayaan Balai Penyuluh Kecamatan	Penyuluh dan Kelompok Tani	100	40,000,000.00
2.01.00.20.07	Peningkatan Sarana dan Prasarana Tenaga Penyuluhan		100	1,103,510,000.00
2.01.00.24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan		100	43,628,000.00
2.01.00.24.04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna	Pelaku Utama		43,628,000.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
2.01.00.17	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan		100	55,612,900.00
2.01.00.17.05	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	Kelompok Tani Hutan	100	55,612,900.00
2.01.00.22	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan		100	42,347,500.00
2.01.00.22.01	Kajian sistem penyuluhan perikanan	Aparat penyuluhan dan kelompok tani	100	42,347,500.00
Jumlah Belanja Langsung				3,069,510,000.00



Urusan : 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.22.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			737,969,200.00
1.22.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	BPM dan Pemdes Kel. Lalabata	100	29,500,000.00
1.22.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Roda 4 [1 buah] & Roda 2 [4 buah]	100	5,678,000.00
1.22.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Cleaning Service 2 orang BPM	100	10,030,000.00
1.22.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan	Alat komponen Liastrik Kantor	100	2,675,000.00
1.22.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat pembersih Kantor BPM dan Pemdes	100	1,300,000.00
1.22.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar/Majalah/ Tabloid/Iklan	100	7,000,000.00
1.22.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tabung gas	100	1,800,000.00
1.22.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Perjalanan dinas dalam daerah &	100	486,549,200.00
1.22.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Alat tulis ktr, Perangko & beda pos lainnya, Belanja cetak & penggandaan Belanja makan/ minuman	100	126,237,000.00
1.22.01.01.21	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jasa pramubakti pengemudi/sopir	100	67,200,000.00
1.22.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			158,951,400.00
1.22.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		100	13,800,000.00
1.22.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor		100	37,813,400.00
1.22.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Operasional BPM & Pemdes	100	86,518,000.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.22.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	BPM & Pemdes	100	15,000,000.00
1.22.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BPM & PEMDES	100	5,820,000.00
1.22.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			41,500,000.00
1.22.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Aparatur BPM & PEMDES	100	41,500,000.00
1.22.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			16,720,000.00
1.22.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPM & PEMDES	100	8,900,000.00
1.22.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	BPM & Pemdes KAb.Soppeng	100	3,820,000.00
1.22.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	BPM & Pemdes	100	4,000,000.00
1.22.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			136,058,000.00
1.22.01.15.07	Evaluasi dan Monitoring Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)	Anak Sekolah Kurang Mampu	100	22,928,000.00
1.22.01.15.09	Pembinaan, Evaluasi, dan Monitoring Baruga Sayang	5 D/K di Kab.Soppeng	100	17,800,000.00
1.22.01.15.14	Fasilitasi 10 Program Pokok PKK	Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan	100	95,330,000.00
1.22.01.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			52,517,500.00
1.22.01.16.12	Pembinaan dan Penagihan kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat Marginal (P2M2)	Kelompok MAsyarakat Marginal	100	3,000,000.00
1.22.01.16.13	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang BUMDES	8 kecamatan	100	16,595,000.00
1.22.01.16.14	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Tentang BUMDES	8 Kecamatan	100	18,437,500.00
1.22.01.16.15	Sosialisasi Posyantekdes (Pos Pelayanan TTG)	Aparat Kecamatan, desa/kel.	100	14,485,000.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.22.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Pedesaan			82,691,900.00
1.22.01.17.06	Pencanangan/Penutupan Bulan Bakti Gotong Royong	1 Desa/Kelurahan di Kab.Soppeng	100	15,925,000.00
1.22.01.17.08	Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Masyarakat Kab.Soppeng	100	2,400,000.00
1.22.01.17.09	Evaluasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan	Desa/Kel.	100	64,366,900.00
1.22.01.18	Peniingkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			217,592,000.00
1.22.01.18.02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan	49 Desa	100	27,486,000.00
1.22.01.18.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	49 Desa Kab. Soppeng	100	51,820,000.00
1.22.01.18.05	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana ADD	Aparat Desa di Kab. Soppeng	100	71,622,500.00
1.22.01.18.06	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan BPD	Pemerintah Desa	100	7,947,000.00
1.22.01.18.07	Fasilitasi Penyusunan LPPD	Aparat Pemerintah Daerah	100	21,890,000.00
1.22.01.18.08	Fasilitasi Penyusunan APBDesa	Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng	100	11,829,000.00
1.22.01.18.09	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng	100	24,997,500.00
Jumlah Belanja Langsung				1,444,000,000.00



Urusan : 1.17 Perpustakaan

SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			380,275,220.00
1.01.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Soppeng	100	40,000,000.00
1.01.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Soppeng	100	3,800,000.00
1.01.02.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Soppeng	100	9,688,000.00
1.01.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Soppeng	100	2,000,000.00
1.01.02.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Soppeng	100	8,777,000.00
1.01.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Soppeng	100	15,000,000.00
1.01.02.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Soppeng	100	1,980,000.00
1.01.02.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Soppeng	100	131,074,970.00
1.01.02.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Soppeng	100	164,955,250.00
1.01.02.01.25	Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Soppeng		3,000,000.00
1.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			182,972,680.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.01.02.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Soppeng	100	18,500,000.00
1.01.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Soppeng	100	4,300,000.00
1.01.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Soppeng	100	34,092,500.00
1.01.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Perpustakaan Desa / Kelurahan	100	8,500,000.00
1.01.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Soppeng	100	15,300,000.00
1.01.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	100	97,180,180.00
1.01.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Soppeng	100	5,100,000.00
1.01.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100	40,996,000.00
1.01.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Aparat Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	100	40,996,000.00
1.01.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			14,708,750.00
1.01.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Soppeng	100	13,558,500.00
1.01.02.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Soppeng	100	1,150,250.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
1.01.02.21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			187,846,600.00
1.01.02.21.01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Sisa / Siswi Tingkat Sekolah Dasar	100	20,007,100.00
1.01.02.21.02	Pengembangan minat dan budaya baca	Siswa / Siswi Sekolah Dasar, Play Group	100	8,004,000.00
1.01.02.21.03	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan	Pengelola Perpustakaan	100	26,099,600.00
1.01.02.21.08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Pustakawan, Pengelola Perpustakaan	100	33,735,900.00
1.01.02.21.09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	100	100,000,000.00
1.24.00.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah			44,000,750.00
1.24.00.16.02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	100	12,700,000.00
1.24.00.16.05	Penyimpanan dan Penataan Arsip	SKPD	100	31,300,750.00
Jumlah Belanja Langsung				850,800,000.00



Urusan : 2.01 Pertanian

SKPD : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SOPPENG

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
2.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			794,785,380.00
2.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng	100	97,000,000.00
2.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Perpanjangan/Pengesahan STNK Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	100	9,187,500.00
2.01.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Petugas Kebersihan Kantor (Cleaning	100	20,621,000.00
2.01.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng	100	3,693,000.00
2.01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng	100	13,230,000.00
2.01.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik	Bahan logistik kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura kab. Soppeng	100	4,763,000.00
2.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Aparat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng	100	333,425,000.00
2.01.01.01.20	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Aparat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng	100	204,810,380.00
2.01.01.01.25	Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Aparat Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Soppeng	100	108,055,500.00
2.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			479,887,800.00
2.01.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Aparat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng	100	40,000,000.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
2.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura Kab.	100	85,075,000.00
2.01.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Soppeng	100	18,000,000.00
2.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung & Halaman Kantor Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Soppeng	100	11,550,000.00
2.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Soppeng	100	218,412,800.00
2.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Soppeng	100	28,350,000.00
2.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terehabilitasinya bangunan gedung kantor Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura	100	78,500,000.00
2.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			105,000,000.00
2.01.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Aparat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng	100	105,000,000.00
2.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			41,313,000.00
2.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen RKA, DPA dan DPPA, Laporan LAKIP, LKPJ serta LPPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng	100	22,453,700.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
2.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Tahunan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng	100	18,859,300.00
2.01.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			190,439,000.00
2.01.01.15.02	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan petani dalam pengelolaan kelembagaannya	100	33,075,000.00
2.01.01.15.03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Mantapnya kelembagaan petani di Kabupaten Soppeng	100	33,075,000.00
2.01.01.15.06	Sosialisasi Sistem Kredit/Pembiayaan Usaha Tani Terhadap Kelompok Tani	Meningkatnya pengetahuan petani tentang sistem kredit / pembiayaan usahatani	100	37,039,000.00
2.01.01.15.08	Penyuluhan dan Bimbingan Pengelolaan Sumberdaya Petani melalui Bantuan Pemerintah	Meningkatnya pengetahuan & wawasan petani dalam pengelolaan sumberdaya	100	42,000,000.00
2.01.01.15.09	Pelatihan dan Bimbingan Kewirausahaan Bagi	Meningkatnya kualitas SDM bagi	100	45,250,000.00
2.01.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan			8,344,674,335.00
2.01.01.16.02	Penyusunan data base potensi produk pangan	Tersedianya informasi/data tentang potensi & keadaan produksi pangan melalui survey pertanian (SP)	100	62,532,500.00
2.01.01.16.12	Penanganan Pasca Panen dan pengolahan Hasil	Meningkatnya kualitas produksi &	100	125,889,800.00
2.01.01.16.16	Pengembangan Diversifikasi Tanaman	Berkembangnya berbagai macam usahatani komoditi hortikultura	100	80,500,000.00
2.01.01.16.17	Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering	Meningkatnya potensi lahan dan berkembangnya usahatani pada lahan non	100	2,000,000,000.00
2.01.01.16.20	Pengembangan Pembenihan/Pembibitan	Berkembangnya usaha perbenihan/perbibitan komoditi tanaman	100	190,500,875.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
2.01.01.16.24	Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pengelolaan P3A dan GP3A	100	5,426,331,825.00
2.01.01.16.29	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu Produk	Meningkatnya produksi, produktivitas dan	100	77,365,835.00
2.01.01.16.34	Pembinaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Terbinanya penyaluran pupuk bersubsidi	100	195,885,000.00
2.01.01.16.42	Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi	Terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi	100	185,668,500.00
2.01.01.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan			52,629,830.00
2.01.01.17.07	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	Meningkatnya akses pasar hasil produksi pertanian	100	52,629,830.00
2.01.01.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			8,075,691,050.00
2.01.01.18.02	Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Kelompok tani, UPJA, Gapoktan dan pelaku usaha agribisnis lainnya	100	500,000,000.00
2.01.01.18.05	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Bengkel Alsin/Kelompok tani/UPJA	100	24,769,500.00
2.01.01.18.12	Water Resource and Irigation Sector Management (WISMP)	Petugas, Pengurus GP3A/P3A dan Poktan/Gapoktan	100	145,921,550.00
2.01.01.18.14	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian		100	7,405,000,000.00
2.01.01.19	Program Peningkatan Produksi			303,387,000.00
2.01.01.19.02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Kelompok tani hortikultura	100	80,552,500.00
2.01.01.19.04	Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan	Balai Benih Daerah Timusu	100	52,500,000.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
2.01.01.19.07	Perlindungan Tanaman untuk Peningkatan Pengamanan Produksi Tanaman Pangan	Petani/Kelompok tani yang terkena bencana	100	170,334,500.00
Jumlah Belanja Langsung				18,387,807,395.00



Urusan : 2.01 Pertanian

SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. SOPPENG

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
2.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			442,035,780.00
2.01.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Peternakan dan Perikanan	100	59,244,000.00
2.01.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional	100	14,097,180.00
2.01.02.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Dinas Peternakan dan Perikanan	100	10,605,000.00
2.01.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Dinas Peternakan dan Perikanan	100	3,000,000.00
2.01.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Peternakan dan Perikanan	100	7,000,000.00
2.01.02.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Dinas Peternakan dan Perikanan	100	4,320,000.00
2.01.02.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Aparat Dinas Peternakan dan	100	148,755,000.00
2.01.02.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Peternakan dan Perikanan	100	195,014,600.00
2.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			330,374,516.00
2.01.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Peternakan dan Perikanan	100	24,325,000.00
2.01.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Peternakan dan Perikanan	100	95,247,303.00
2.01.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Peternakan dan Perikanan	100	23,400,000.00
2.01.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas operasional	100	180,256,213.00
2.01.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung Dinas Peternakan dan Perikanan	100	7,146,000.00
2.01.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			50,644,000.00
2.01.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas Peternakan dan Perikanan	100	50,644,000.00
2.01.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			27,015,704.00
2.01.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Peternakan dan Perikanan	100	17,601,679.00
2.01.02.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tim penyusun laporan keuangan	100	9,414,025.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
2.01.02.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak			2,708,000,000.00
2.01.02.21.01	Pendataan masalah peternakan	Peternak dan Kelompok ternak	100	95,400,000.00
2.01.02.21.02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Peternak dan Kelompok ternak	100	250,950,000.00
2.01.02.21.06	Pemberdayaan Puskesmas	4 Puskesmas di Kab.Soppeng	100	105,300,000.00
2.01.02.21.08	Pembangunan Rumah Potong Hewan Ruminansia (DAK)	Peternak dan Kelompok Ternak	100	2,205,000,000.00
2.01.02.21.09	Pembinaan Kesmavet pada Usaha Peternakan	Peternak dan Kelompok Ternak	100	51,350,000.00
2.01.02.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan			886,815,000.00
2.01.02.22.02	Pembibitan dan perawatan ternak	Kelompok ternak	100	747,690,000.00
2.01.02.22.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kelompok peternak	100	40,155,000.00
2.01.02.22.15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dana Bergulir	Kelompok peternak	100	98,970,000.00
2.01.02.23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan			39,205,000.00
2.01.02.23.07	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. _	Kelompok ternak	100	39,205,000.00
2.01.02.24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan			89,135,000.00
2.01.02.24.02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Kelompok ternak	100	59,735,000.00
2.01.02.24.05	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	Kelompok ternak	100	29,400,000.00
2.05.00.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan			1,248,148,500.00
2.05.00.20.01	Pengembangan Perikanan (Bibit Ikan Unggul Air Tawar)	BBI Ompo, Lajoa, Citta	100	165,718,750.00
2.05.00.20.04	Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) dan Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP)	Kelompok pembudidaya, pengolah dan pemasar perikanan	100	68,849,750.00
2.05.00.20.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Perikanan		100	1,013,580,000.00
2.05.00.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap			169,281,550.00
2.05.00.21.07	Pembinaan dan Pengawasan Danau Tempe	Nelayan	100	124,881,575.00
2.05.00.21.08	Pengukuran dan Pemetaan Luasan Lahan Danau Tempe	Danau tempe	100	44,399,975.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
2.05.00.23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan			97,224,950.00
2.05.00.23.03	Pengembangan Agribisnis Perikanan	Kelompok pengolah perikanan	100	38,524,975.00
2.05.00.23.04	Pengembangan Daya Saing Produk Perikanan	Kelompok pengolah perikanan	100	58,699,975.00
Jumlah Belanja Langsung				6,087,880,000.00



Urusan : 2.02 Kehutanan

SKPD : DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. SOPPENG

Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
2.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			903,975,000.00
2.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	100	97,000,000.00
2.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	100	17,000,000.00
2.02.01.01.08	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	100	27,000,000.00
2.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	100	2,000,000.00
2.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	100	15,000,000.00
2.02.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	100	3,500,000.00
2.02.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	100	457,375,000.00
2.02.01.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	100	277,000,000.00
2.02.01.01.21	Penyediaan Jasa Perkantoran	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	100	8,100,000.00
2.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			160,000,000.00
2.02.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	100	20,000,000.00
2.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		100	20,000,000.00
2.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	100	110,000,000.00
2.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	100	10,000,000.00
2.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			37,500,000.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
2.02.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pegawai Dinas Kehutanan	100	17,500,000.00
2.02.01.03.06	Pembinaan Kepegawaian	Pegawai Dinas Kehutanan	100	20,000,000.00
2.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			35,000,000.00
2.02.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	100	35,000,000.00
2.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			45,000,000.00
2.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	100	30,000,000.00
2.02.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	100	15,000,000.00
2.01.00.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			75,000,000.00
2.01.00.15.01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Kelompok Tani/Petani kakao	100	75,000,000.00
2.01.00.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan			75,000,000.00
2.01.00.16.29	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	Kelompok Tani Kakao	100	75,000,000.00
2.01.00.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan			11,120,000.00
2.01.00.17.07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	Pekebun/Pengusaha bidang perkebunan/Kehutanan	100	11,120,000.00
2.01.00.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan			75,000,000.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
2.01.00.18.02	Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Kelompok Tani Perkebunan	100	75,000,000.00
2.01.00.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan			3,057,474,564.00
2.01.00.19.02	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Kelompok Tani Kakao	100	1,837,474,564.00
2.01.00.19.03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Kelompok tani Kakao	100	610,000,000.00
2.01.00.19.11	Pengembangan Tanaman Alternatif Perkebunan	Kelompok Tani Perkebunan	100	110,000,000.00
2.01.00.19.12	Peningkatan Produksi dan Kualitas Tembakau	Kelompok Tani/Petani Tembakau	100	500,000,000.00
2.02.01.15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan			1,014,650,000.00
2.02.01.15.02	Pengembangan hutan tanaman	Masyarakat disekitar kawasan hutan dan Pengamanan hutan	100	764,650,000.00
2.02.01.15.03	Pengembangan hasil hutan non-kayu	Kelompok Tani Sutera	100	75,000,000.00
2.02.01.15.04	Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan	Kelompok Tani Pemegang Izin Pemanfaatan HKm dan Calon Pemegang Izin HKm	100	75,000,000.00
2.02.01.15.06	Pengelolaan dan pemanfaatan hutan	Kelompok Tani dan tenaga teknis	100	100,000,000.00
2.02.01.16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan			712,945,000.00
2.02.01.16.01	Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan	Kawasan Hutan di Kabupaten soppeng	100	56,000,000.00



Nomor Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran	Target (%)	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3	4	5
2.02.01.16.05	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Kelompok tani hutan dan sumberdaya hutan	100	307,645,000.00
2.02.01.16.06	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Kelompok tani dan masyarakat sekitar kawasan hutan	100	52,000,000.00
2.02.01.16.08	Pembuatan Bangunan Konservasi		100	297,300,000.00
2.02.01.19	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan			97,000,000.00
2.02.01.19.02	Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan	Pelaku Usaha Bidang Kehutanan/Penyuluh	100	75,000,000.00
2.02.01.19.03	Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan	Masyarakat pemegang IUPHHK	100	22,000,000.00
2.02.01.20	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan			150,500,000.00
2.02.01.20.03	Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Kehutanan dan Perkebunan	Data Potensi Kehutanan dan Perkebunan	100	50,000,000.00
2.02.01.20.04	Pembuatan Hutan Kota	Data Potensi Kehutanan dan Perkebunan	100	100,500,000.00
Jumlah Belanja Langsung				6,450,164,564



BAB VI

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2016 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2016.